

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam Pelaksanaan dan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Lampiran III dan IV, maka pemerintah daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak ditetapkannya peraturan tersebut di atas. Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Sebagai komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan tahun 2023, yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Di samping itu, 47 entitas akuntansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menyusun pula laporan keuangan SKPD tahun 2023 yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Fakfak disusun sebagai bagian dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan anggaran, penetapan anggaran bersama-sama dengan DPRD, pelaksanaan anggaran dan pelaporan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi Pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

2. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana.

3. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023 disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 23 ayat 1, khususnya bagian yang mengatur tentang keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lampiran III dan IV dicabut);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
20. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 45 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Fakfak;
21. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
22. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

23. Keputusan Bupati Fakfak Nomor 900.1.2.4-121 Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Keputusan Bupati Fakfak Nomor 900.1.2.4-454 Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai berikut.

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Pencapaian program Pemerintah Daerah Terkait *Mandatory Spending*
- 3.3 Pencapaian Program Pemerintah Daerah terkait Dana Otonomi Khusus
- 3.4 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP Pemerintah Daerah

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Neraca

- 5.3.1 Aset
- 5.3.2 Kewajiban
- 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1 Kegiatan Operasional
 - 5.4.2 Kegiatan Non Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1 Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Laporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Laporan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.4 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas
 - 5.5.5 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendaharan Penerimaan
 - 5.5.6 Saldo Akhir Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- 6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas
- 6.3 Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun 2023

Bab VII PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Kabupaten Fakfak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini terletak di Kota Fakfak. Kabupaten Fakfak mempunyai luas wilayah 14,320 Km² terletak pada 131°53'03" BT - 133°29'19" BT dan 2°30'58" - 3°57'51" LS. Dalam perkembangannya telah mengalami pemekaran wilayah Distrik, Kelurahan maupun Kampung. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penghapusan Kampung dan Pengesahan Pembentukan Kampung-Kampung Baru Dalam Distrik Se Kabupaten Fakfak dan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Distrik Pariwari, Wartutin, Fakfak Timur Tengah, Arguni, Mbahamdandara, Kayauni, Furwagi dan Tomage, maka secara keseluruhan kabupaten Fakfak memiliki 17 Distrik, 7 Kelurahan dan 142 Kampung. Secara umum batas wilayah Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Teluk Bintuni;
- Sebelah Selatan : Laut Arafura dan Kabupaten Kaimana;
- Sebelah Barat : Laut Seram dan Teluk Berau;
- Sebelah Timur : Kabupaten Fakfak.

Kabupaten ini secara administrasi terbentuk pada tanggal 16 November 1900. Oleh karenanya, setiap tanggal 16 November diperingati sebagai hari jadi Kota Fakfak yang dirayakan secara meriah dengan berbagai festival adat dan budaya serta *expo* pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Disertai dengan digelarnya pameran-pameran pembangunan dan budaya sebagai upaya menggali dan mempromosikan daerah dalam mendorong kreatifitas daerah dan investasi.

Sejak lama, Kabupaten Fakfak terkenal dengan berbagai sebutan. Sebutan sebagai Kota Tua, Kota Sejarah dan Kota Perjuangan, Kota Pemerintahan dan Kota Pala karena terkenal dengan komoditasnya. Dikenal sebagai Kota Tua karena keberadaannya telah disebutkan sejak lama pada beberapa masehi yang lalu hingga di masa Kerajaan Majapahit dalam kitab klasik Negara Kertagama (1365 M) yang menyatakan sejumlah nama daerah yang terletak di bagian Timur Indonesia disebut nama Wanin, Sran dan Timur. Wanin menurut ahli Jawa Kuno adalah nama lain daerah Onin (Jazirah Onin) di Fakfak sehingga saat ini menjadi salah satu kabupaten tertua di Tanah Papua. Disebut sebagai kota sejarah dan perjuangan karena memiliki sejarah perjuangan masa lalu yang dibuktikan dengan banyaknya peninggalan di zaman perang dunia II. Disebut sebagai Kota Pemerintahan karena pada zaman dahulu telah menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan yang dikenal mulai dari zaman kerajaan atau petuanan yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, hingga dijadikan sebagai kota pemerintahan pertama pada masa pemerintahan Kolonial Belanda di West Nieuw Guinea (Irian Barat/Irian Jaya/Tanah Papua sekarang). Pada tahun 1898 sebagai karesidenan atau *afdeeling* bersama dengan Manokwari.

Sesuai dengan peta Pulau Papua, posisi Kabupaten Fakfak berada tepat di kawasan Kepala Burung Papua bagian selatan Provinsi Papua Barat yang berdekatan dengan beberapa

kabupaten seperti, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Sorong. Dengan luasan yang dimiliki, mempunyai kondisi bervariasi, relatif berbukit-bukit sehingga berpengaruh pada perkembangannya. Keberadaannya menjadi terkenal dengan sebutan sebagai Kota yang memiliki Moto “*Satu Tungku Tiga Batu*” sebagai alat pemersatu dalam membangun ikatan kekeluargaan dan harmonisasi dalam mendukung proses pembangunan yang berjalan secara aman, nyaman dan damai. Dalam era otonomi daerah, pembangunan terus diarahkan kepada tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera, sebagaimana Visi Kabupaten Fakfak 2022-2026 “*Terwujudnya Fakfak yang Terdepan Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Mandiri*”. Atau dikenal dengan Moto pembangunan “*Fakfak Tersenyum*”. Untuk itu partisipasi masyarakat, perangkat daerah dan pihak-pihak tertentu (*stakeholder*) mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Fakfak.

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Kabupaten Fakfak, yaitu (minimal):

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 21,38%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,52%
3. Gini Ratio sebesar 0,35%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,85%
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 1,63%
6. Tingkat Inflasi sebesar 0,45%
7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) sebesar 5.811.460,42 juta rupiah.

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin provinsi/kabupaten/kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis

kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Fakfak

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1	Kabupaten Fakfak (%)	22,06%	21,38%	Turun
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	18,13 Jiwa	17,84 Jiwa	Turun
3	Provinsi Papua Barat (%)	21,33%	20,49%	Turun
4	Nasional (%)	9,54	9,36	Turun
5	Peringkat Provinsi	8	8	Tetap
6	Peringkat Nasional	48	52	Naik

Sumber Dokumen: BPS Fakfak

Persentase penduduk miskin Kabupaten Fakfak pada Tahun 2022 sebesar 22,06% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 21,38% dan diharapkan pada tahun 2024 terus menurun hingga angka 20,00%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Fakfak masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Fakfak

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Fakfak	5,33%	4,92%	Turun
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	4,82%	4,94%	Naik
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,59%	1,53%	Turun
4	Peringkat Provinsi	8	8	Turun
5	Peringkat Nasional	30	35	Naik

Sumber Dokumen: BPS Fakfak

Tabel 3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Fakfak

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	1,92%	1,62%	Turun
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	1,6%	1,71%	Naik
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,39%	0,38%	Turun
4	Peringkat Provinsi	5	7	Naik
5	Peringkat Nasional	19	27	Naik

Sumber Dokumen: BPS Fakfak

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat/Kabupaten Fakfak

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Fakfak Tahun 2023 adalah sebesar 6,52%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Fakfak

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	6,75%	6,52%	Turun
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,37%	5,38%	Naik
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86%	5,32%	Turun
4	Peringkat Provinsi	2	2	Tetap
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Fakfak

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Fakfak Tahun 2023 menurut data BPS sebesar 6,52% , sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 6,75%. TPT Provinsi Papua Barat tahun 2023 sebesar 5,38%, sedangkan tahun 2022 sebesar 5,37% dan TPT Nasional tahhun 2023 sebesar 5,32%, sedangkan tahun 2022 sebesar 5,86%.

2.1.3. Indek Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Indeks Gini

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1	Kabupaten Fakfak	0,330%	0,359%	Naik
2	Tingkat Provinsi	0,370%	0,370%	Tetap
3	Tingkat Nasional	0,384%	0,388%	Naik
4	Peringkat Nasional	24%	38%	Naik

Sumber Dokumen: BPS Pusat, BPS Fakfak

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- 1. Rendah (< 60);
- 2. Sedang (60≤IPM<70);
- 3. Tinggi (70 ≤IPM<80);
- 4. SangatTinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak realisasi pencapaian

IPM Kabupaten Fakfak Tahun 2023 adalah sebesar 69,12 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun
1	Kabupaten Fakfak	70,26	70,85	Naik
2	Provinsi Papua Barat	66,72	67,47	Naik
3	Indonesia/Nasional	73,77	74,39	Naik
4	Peringkat Provinsi	3	3	Tetap
5	Peringkat Nasional	333	335	Naik

Sumber Dokumen BPS Fakfak

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Fakfak Tahun 2023 adalah sebesar 70,85 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 70,26 poin mengalami kenaikan sebesar 0,59 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), dan harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 69,02 tahun pada Tahun 2023, lebih lama 0,27 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,17 tahun dengan harapan lama sekolah 14,78 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun senilai Rp7.678.000,00 atau menurun Rp232.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kabupaten Fakfak pada saat ini berada pada urutan 3 dari Kab/Kota yang ada di Provinsi Papua Barat dan berada pada urutan 201 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Fakfak (miliar rupiah)

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	3.474,01	3.545,46	3.503,35	64.964,02	12.301.393.60
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,97	2,06	1,63	2,01	5,31
3	Peringkat Provinsi	9	6	10	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Fakfak

Selama kurun waktu Tahun 2021 - Tahun 2023 perekonomian Kabupaten Fakfak

mengalami kenaikan sebesar 0,66. Pada periode Tahun 2021 – Tahun 2022 pertumbuhan perkonomian Kabupaten Fakfak sebesar 1,09 dan pada kurun waktu Tahun 2022 - 2023 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Fakfak sebesar -0,43.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Fakfak dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

1. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*), ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*).Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
3. Inflasi Berat (*High Inflation*), mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
4. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tingkat Inflasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Tingkat Inflasi

No	Uraian	Desember 2022	Desember 2023	Naik/Turun
1	Tingkat Provinsi Gabungan 2 (dua) Kota (%)	0,387	0,45	Naik
2	Tingkat Nasional (%)	5,510	2,61	Turun

Sumber Dokumen: BPS Fakfak

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Fakfak

Struktur perekonomia Provinsi Kabupaten Fakfak dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(juta rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	860.095,48	868.507,75	902.729,61	901,489,90	907.009,36
2	Pertambangan dan penggalian	65.202,48	62.438,10	66.338,33	64.896,97	67.273,66
3	Industri pengolahan	167.260,71	171.462,07	177.034,88	188.428,98	191.152,09
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.821,01	3.054,84	3.324,99	3.551,34	3.512,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	9.515,44	9.726,53	9.924,37	9.692,67	9.701,34
6	Konstruksi	1.493.132,48	1.409.837,17	1.453.431,14	1.515.506,67	1.533.012,26

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
7	Pengadaan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil	633.264,05	648.795,45	675.652,50	731.206,01	763.559,57
8	Transportasi & Pergudangan	294.634,15	256.172,07	264.912,15	324.839,73	345.020,17
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	61.931,60	62.561,08	65.356,00	76.012,83	78.776,04
10	Informasi & Komunikasi	154.468,50	170.550,67	171.951,62	174.808,05	185.856,34
11	Jasa Keuangan & Asuransi	75.083,26	87.551,90	84.987,57	89.058,85	95.206,82
12	Real Estate	121.766,06	123.227,34	125.812,39	127.208,10	129.655,14
13	Jasa Perusahaan	9.607,29	9.692,43	9.872,43	10.476,46	10.842,49
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial	988.255,78	992.547,06	993.020,88	1.032.169,88	1.138.957,38
15	Jasa Pendidikan	240.278,02	236.272,33	238.562,31	244.627,93	254.041,19
16	Jasa Kesehatan & Sosial	70.040,72	72.326,78	79.361,72	77.094,65	77.365,11
17	Jasa Lainnya	16.042,99	16.210,74	18.205,37	19.391,05	20.519,32
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		5.263.400,01	5.200.934,32	5.340.478,25	5.590.515,09	5.811.460,42
PDRB Provinsi Papua Barat		84.356.967,99	83.588.641,76	85.078.415,82	91.292.024,84	97.675.838,53
PDRB Nasional (Milyar Rupiah)		15.832.657,20	15.443.353,20	16.976.690,90	19.588.445,60	20.892.376,70
Peringkat Provinsi		5	5	5	5	5
Peringkat Nasional		-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Fakfak

2.2. Kebijakan Keuangan

2.2.1. Pendapatan Daerah

Dengan memperhatikan potensi, permasalahan serta tantangan yang mungkin akan dihadapi dan berpotensi menjadi hambatan maupun peluang serta realisasi PAD tahun anggaran 2022, maka target pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan PAD tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran 2022 dari senilai Rp61.858.409.615,00 menjadi senilai Rp63.635.103.931,00 di tahun 2023 atau naik senilai Rp1.776.694.316,00; sedangkan penerimaan daerah lainnya dari sektor non-PAD yaitu pendapatan transfer tahun 2023 dianggarkan senilai Rp1.411.653.436.492,00 mengalami kenaikan senilai Rp155.284.019.056,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya dianggarkan senilai Rp1.256.369.417.436,00.

Terkait gambaran proyeksi pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi, mendorong ke arah *full employment* sehingga jumlah pengangguran bisa menurun dan akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

2.2.2. Belanja Daerah

Pada sisi belanja daerah dari tahun ke tahun Pemerintah Kabupaten Fakfak selalu melakukan perbaikan dan peningkatan *quality spending* diharapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada sisi belanja daerah semakin baik. Untuk tahun 2023 jumlah total anggaran belanja mencapai Rp1.592.894.105.914,00. Sehubungan dengan

aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong *empowerment* sehingga mampu menjadi pengungkit terhadap penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor pertanian, sektor perdagangan-hotel-restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan insfratraktur serta fasilitas sosial.

Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut di atas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2022-2026.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi, yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2022 - 2026 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektivitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi). Sehingga pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

2.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus yang diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Fakfak juga memberikan penguatan terhadap Bank Papua dalam bentuk penyertaan modal dan terbagi dalam lembar saham biasa, juga selalu ditingkatkan sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah khusus pendapatan Dividen dari Bank Papua, dapat mengalami peningkatan yang dapat memberikan dampak pada kinerja pendapatan daerah semakin tinggi.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Fakfak menganut anggaran surplus/defisit.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Fakfak pada tahun 2023 senilai Rp1.475.288.540.423,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp63.635.103.931,00 dan Pendapatan Transfer senilai Rp1.411.653.436.492,00.

Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Fakfak pada tahun 2023 adalah senilai Rp1.430.219.550.381,59 atau ekuivalen 96,95% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp46.854.845.867,59 ekuivalen 73,63% dan Pendapatan Transfer senilai Rp1.383.364.704.514,00 ekuivalen tercapai 98,00%.

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Fakfak pada tahun 2023 senilai Rp1.592.894.105.914,00 dan direalisasikan senilai Rp1.506.021.842.520,79 atau ekuivalen 94,55% yang terdiri dari Anggaran Belanja Operasi senilai Rp1.095.804.321.611,00 dan terealisasi senilai Rp1.028.766.926.910,05 atau ekuivalen 93,88%. Anggaran Belanja Modal senilai Rp301.837.979.123,00 dan terealisasi senilai Rp279.222.686.938,74 atau ekuivalen 92,51%. Anggaran Belanja Tak Terduga adalah senilai Rp14.107.285.887,00 dan terealisasi senilai Rp14.070.365.920,00 atau ekuivalen 99,74%. Anggaran Belanja Transfer senilai Rp181.144.519.293,00 dan terealisasi senilai Rp183.961.862.752,00 atau ekuivalen 101,56%.

Dengan demikian terjadi defisit senilai Rp75.802.292.139,20 jika dibandingkan antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja. Sedangkan realisasi pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak, yaitu realisasi penerimaan pembiayaan senilai Rp118.740.799.114,93 dan realisasi pengeluaran pembiayaan senilai Rp1.000.000.000,00, sehingga pembiayaan netto senilai Rp117.740.799.114,93.

Secara ringkas realisasi APBD Kabupaten Fakfak tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Pendapatan	1.475.288.540.423,00	1.430.219.550.381,59	96,95

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah - LRA	63.635.103.931,00	46.854.845.867,59	73,63
4.2	Pendapatan Transfer - LRA	1.411.653.436.492,00	1.383.364.704.514,00	98,00
5	Belanja	1.592.894.105.914,00	1.506.021.842.520,79	94,55
5.1	Belanja Operasi	1.095.804.321.611,00	1.028.766.926.910,05	93,88
5.2	Belanja Modal	301.837.979.123,00	279.222.686.938,74	92,51
5.3	Belanja Tak Terduga	14.107.285.887,00	14.070.365.920,00	99,74
5.4	Belanja Transfer	181.144.519.293,00	183.961.862.752,00	101,56
	Surplus / (Defisit)	(117.605.565.491,00)	(75.802.292.139,20)	64,45
6	Penerimaan Pembiayaan	118.605.565.491,00	118.660.049.113,93	100,05
6.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	118.605.565.491,00	118.660.049.113,93	100,05
7	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
7.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	Pembiayaan Netto	117.605.565.491,00	117.660.049.113,93	100,05
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	41.938.506.975,73	0

3.2. Pencapaian program Pemerintah Daerah Terkait *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sesuai amanat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3) Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;

Berikut disajikan tingkat pemenuhan alokasi anggaran *mandatory spending* pada Pemerintah Kabupaten Fakfak TA 2023.

1) Alokasi Pendidikan Sebesar 20%

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menganggarkan alokasi untuk fungsi pendidikan senilai Rp341.620.602.435,00. Apabila dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah senilai Rp1.592.894.105.914,00 maka rasio alokasi anggaran pendidikan terhadap total belanja daerah adalah sebesar 21,45%. Alokasi tersebut melebihi ketentuan alokasi anggaran yang diamanatkan peraturan perundangan yaitu minimal sebesar 20% untuk fungsi pendidikan.

2) Alokasi Kesehatan Sebesar 10%

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan alokasi untuk fungsi kesehatan senilai Rp249.868.300.064,00. Apabila dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah di luar gaji senilai Rp1.287.790.979.785,00 maka rasio alokasi anggaran kesehatan terhadap total belanja daerah di luar gaji adalah sebesar 19,40%. Alokasi tersebut melebihi ketentuan alokasi anggaran yang diamanatkan peraturan perundangan yaitu minimal sebesar 10% untuk fungsi kesehatan.

3) Alokasi Infrastruktur Pelayanan Publik Sebesar 40%

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan alokasi untuk infrastruktur pelayanan publik senilai Rp579.398.246.829,00. Apabila dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa senilai Rp1.411.749.586.621,00, maka rasio alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik terhadap anggaran belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah 41,04%. Alokasi tersebut melebihi alokasi anggaran yang diamanatkan peraturan perundangan yaitu minimal sebesar 40% untuk infrastruktur pelayanan publik.

3.3. Pencapaian Program Pemerintah Daerah terkait Dana Otonomi Khusus

3.3.1. Regulasi terkait dengan Penetapan Alokasi

Sesuai Undang-Undang APBN TA. 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA. 2023 serta Surat Edaran Gubernur Papua Barat Nomor 850/2558/2023 tentang Perubahan Perkiraan Besaran Pembagian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas Otsus Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Fakfak memperoleh penerimaan dalam rangka Otsus senilai Rp.280.193.556.334 yang terdiri dari:

1. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum senilai Rp59.833.161.000,00
2. Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya senilai Rp74.791.451.000,00
3. Dana Tambahan Infrastruktur senilai Rp35.559.339.000,00
4. Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi (Tambahan DBH Migas) senilai Rp110.009.605.334,00.

3.3.2. Regulasi Pemda terkait dengan Pemanfaatan Dana Otsus, DTI, dan Tambahan DBH Migas

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus Kabupaten Fakfak merujuk pada aturan teknis terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembagian, Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

3.3.3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otsus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Tahun Anggaran 2023

Selama tahun 2023 dari alokasi pagu penerimaan dalam rangka Otsus, DTI dan Tambahan DBH Migas senilai Rp.280.193.556.334 telah terealisasi senilai Rp252.666.154.489 atau mencapai 90,18% dengan capaian kinerja keluaran (*output*) mencapai sebesar 95,42%. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja keluaran Kabupaten Fakfak sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja

No	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Dana Otsus yang Bersifat Umum (<i>Blogrant</i>) : Rp59.833.161.000,00						
1	Belanja Administrasi Pemerintahan	23.751.454.271,00	21.383.540.560,00	90,03	93,74	
2	Belanja Infrastruktur	3.936.006.122,00	3.855.797.980,00	97,96	100	
3	Belanja Infrastruktur Air Bersih	1.995.730.598,00	1.871.210.100,00	93,76	100	
4	Belanja Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	2.289.529.985,00	2.279.043.522,00	99,54	100	
5	Belanja Keagamaan	6.000.000.000,00	5.395.000.000,00	89,92	90	
6	Belanja Kebudayaan	1.650.647.611,00	1.645.483.361,00	99,69	100	
7	Belanja Kesehatan	567.033.937,00	566.963.926,00	99,99	100	
8	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	7.676.590.513,00	7.049.698.312,00	91,83	94,49	
9	Belanja Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan	88.957.529,00	86.257.529,00	96,96	100	
10	Belanja Pendidikan	991.391.652,00	782.481.764,00	78,93	100	
11	Belanja Penguatan Kelembagaan	300.002.000,00	299.839.800,00	99,95	100	
12	Belanja Pertanahan	529.619.160,00	240.543.000,00	45,42	45,42	
13	Belanja Sosial	9.813.788.734,00	8.595.807.952,00	87,59	90,45	
14	Bukan Papua	242.408.888,00	242.408.888,00	100	100	
Total		59.833.161.000,00	54.294.076.694,00	90,74	93,75	

No	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Dana Otsus yang telah Ditentukan Penggunaannya (<i>Specific grant</i>) : Rp74.791.451.000,00						
1	Belanja Administrasi Pemerintahan	1.041.718.733,00	987.261.772,00	94,77	100	
2	Belanja Kebudayaan	299.112.433,00	299.112.433,00	100	100	



3	Belanja Kepemudaan dan Olah Raga	3.562.565.478,00	3.437.594.418,00	96,49	100	
4	Belanja Kesehatan	16.324.099.565,00	14.900.370.675,00	91,28	92,34	
5	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	34.385.973.773,00	33.051.035.580,00	96,12	99,28	
6	Belanja Pendidikan	18.677.984.326,00	17.264.875.341,00	92,43	100	
7	Belanja Sosial	499.996.692,00	493.222.192,00	98,65	100	
Total		74.791.451.000,00	70.433.472.411,00	94,17	98	

No	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Dana Tambahan Infrastruktur : Rp35.559.339.000,00						
1	Belanja Administrasi Pemerintahan	249.999.920,00	248.971.920,00	99,59	100	
2	Belanja Infrastruktur	1.796.248.958,00	1.746.175.000,00	97,21	100	
3	Belanja Infrastruktur Air Bersih	6.696.567.156,00	6.370.403.700,00	95,13	100	
4	Belanja Infrastruktur Perhubungan	22.285.538.479,00	21.365.833.530,00	95,87	99,42	
5	Belanja Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	2.180.986.858,00	2.000.761.180,00	91,74	92,24	
6	Belanja Infrastruktur Telekomunikasi	2.349.997.629,00	2.349.226.395,00	99,97	100	
Total		35.559.339.000,00	34.081.371.725,00	95,84	99,16	

No	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus : Rp110.009.605.334,00						
1.	Pendidikan	28.884.029.084,00	24.724.832.241,00	85,60	90,51	
2.	Kesehatan	27.423.501.893,00	19.156.280.514,00	69,85	75,79	
3.	Infrastruktur	33.391.230.170,00	30.272.465.806,00	90,66	96,69	
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat	20.310.844.187,00	19.703.655.098,00	97,01	100	
Total		110.009.605.334,00	93.857.233.659,00	85,32	90,75	

2. Rencana dan Realisasi per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Dana Otsus yang Bersifat Umum (Blogrant) : Rp59.833.161.000,00						
1.	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
2.	Belanja Barang dan Jasa	38.003.459.453,00	35.662.063.622,00	93,84	98,00	
3.	Belanja Hibah	6.000.000.000,00	5.395.000.000,00	89,92	96,00	
4.	Belanja Bantuan Sosial	9.766.115.201,00	9.125.000.000,00	93,44	98,00	

5.	Belanja Modal	6.063.586.346,00	4.112.013.072,00	67,81	83,00	
Total		59.833.161.000,00	54.294.076.694,00	90,74	93,75	

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Dana Otsus yang telah Ditentukan Penggunaannya (Specific grant) : Rp74.791.451.000,00						
1.	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
2.	Belanja Barang dan Jasa	62.795.957.042,00	58.665.099.124,00	93,42	98,00	
3.	Belanja Modal	11.995.493.958,00	11.768.373.287,00	98,11	99,00	
Total		74.791.451.000,00	70.433.472.411,00	94,17	98,00	

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Dana Tambahan Infrastruktur : Rp35.559.339.000,00						
1.	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.315.811.859,00	3.266.979.625,00	98,53	99,00	
3.	Belanja Modal	32.243.527.141,00	30.814.392.100,00	95,57	99,00	
Total		35.559.339.000,00	34.081.371.725,00	95,84	99,16	

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ket
Tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus : Rp110.009.605.334,00						
1.	Belanja Pegawai	361.160.000,00	354.020.000,00	98,02	100,00	
2.	Belanja Barang dan Jasa	33.665.633.230,00	30.975.371.972,00	92,01	93,00	
3.	Belanja Hibah Uang	27.243.365.149,00	24.104.331.281,00	88,48	90,00	
3.	Belanja Modal	48.739.446.955,00	38.423.510.406,00	78,83	80,00	
Total		110.009.605.334,00	93.857.233.659,00	85,32	90,75	

3.3.4. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja Pengelolaan Dana Otsus Tahun 2023

Dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten Fakfak TA 2023 terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

- 1. Adanya komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan pembangunan dibidang SDM, infrastruktur dan perekonomian rakyat serta bidang lainnya untuk OAP;
- 2. Kondisi keamanan yang kondusif, sehingga kegiatan pembangunan bisa lancar dan sesuai dengan target yang diharapkan;
- 3. Adanya dukungan dari masyarakat dan tokoh adat setempat sehingga melancarkan proses pembangunan;
- 4. Adanya Dukungan dari semua pihak dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang OTSUS.

Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu:

1. Masih lemahnya manajemen pengelolaan Dana Otsus di SKPD khususnya dalam penyajian laporan pelaksanaan kegiatan;
2. Kurangnya koordinasi antara SKPD Pengelola Dana Otsus dengan Tim Perencanaan dan Penganggaran daerah sehingga terjadi miss antara anggaran dan realisasi yang terdapat di dalam sistem pengelolaan keuangan daerah (SIKD dan FMIS);
3. Masih terdapat SDM pengelola yang belum memahami esensi dari pentingnya keselarasan antara RAP OTSUS dan APBD;
4. Kesulitan mengidentifikasi Sub Kegiatan yang di biayai melalui dana OTSUS dalam aplikasi SIPD dan FMIS.

3.4. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi terdapat dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Transparansi penetapan formula pengalokasian dana-dana di luar DAU belum nyata (daerah kesulitan menentukan asumsi penerimaan untuk tahun yang akan datang);
2. Banyaknya dana dari pusat yang langsung diberikan kepada berbagai instansi sementara Pemerintah Kabupaten Fakfak tidak diberitahu berapa alokasi dana yang diberikan maupun peruntukannya;
3. Keuangan daerah masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dengan persentase PAD yang sangat kecil terhadap APBD.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari Pemerintah Pusat agar prediksi penerimaan daerah yang masuk ke dalam APBD makin realistis.
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan hukum masyarakat, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kualitas pelayanan dengan biaya yang murah.

Adapun permasalahan umum Belanja Daerah yang dihadapi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Pengeluaran yang digunakan untuk Belanja Program Prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan jalan, masih terbatas.
2. Pengeluaran untuk Belanja Pegawai Negeri dan Tenaga Honorer Daerah masih cukup besar dibanding penerimaan DAU.

Guna mengatasi permasalahan di atas maka belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam Laporan Keuangan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut.

1.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan keuangan.

Entitas akuntansi atau entitas pelaporan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 terdiri dari 46 (empat puluh enam) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 7 (tujuh) Kelurahan dan 2 (dua) BUMD yaitu sebagai berikut.

1.1.1. SKPD

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Dinas Sosial
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
14. Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
16. Dinas kearsipan dan Perpustakaan
17. Dinas Kelautan dan Perikanan
18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
19. Dinas Perkebunan
20. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
22. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD

25. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Distrik Arguni
31. Distrik Pariwari
32. Distrik Fakfak
33. Distrik Wartutin
34. Distrik Mbahamdandara
35. Distrik Karas
36. Distrik fakfak Barat
37. Distrik Kokas
38. Distrik Tomage
39. Distrik fakfak Timur Tengah
40. Distrik Furwagi
41. Distrik Bomberay
42. Distrik Fakfak Timur
43. Distrik Kramongmongga
44. Distrik Kayauni
45. Distrik Fakfak Tengah
46. Distrik Teluk Patipi
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.1.2 Keluarahan

1. Kelurahan Danaweria
2. Keluarah Fakfak Utara
3. Kelurahan Fakfak selatan
4. Kelurahan Wagom
5. Keluarahan Wagom Utara
6. Kelurahan Dulanpokpok
7. Kelurahan Kokas

4.1.3 BUMD

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala
2. Perusahaan Daerah (PD) Mbiah Pahi

1.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

1.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan suatu laporan keuangan terdiri dari:

1. Pengukuran kas dan setara kas
2. Pengukuran persediaan
3. Pengukuran piutang, dana bergulir dan kerugian daerah
 - a. Pengukuran piutang
 - b. Pengukuran dana bergulir
 - c. Pengukuran kerugian daerah
 - d. Pengukuran kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan
4. Pengukuran aset tetap
5. Pengukuran aset lainnya
6. Pengukuran beban

4.3.1 Pengukuran kas dan setara kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan yang mempunyai jangka waktu kurang dari 3 (bulan) dari tanggal perolehannya.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.2 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

Harga perolehan terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.

Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

4.3.3 Pengukurann Piutang, Dana Bergulir dan Kerugian Daerah

Piutang adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak ketiga atau entitas lainnya kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang ditimbulkan sebagai akibat adanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dan atau akibat lainnya yang sah.

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

1. Pengukuran Piutang

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1) *Metode official assessment*

- a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

- b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2) Untuk metode self assessment dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
 - 3) Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang.
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Penjualan
Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - 3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - 4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
 - 5) Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar pemerintah daerah.
- c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat) disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah;
 - 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar hak tagih yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.
 - 4) Dana Otonomi Khusus disajikan sebesar hak tagih yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- e. Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- f. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- g. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
2. Pengukuran Dana Bergulir
- Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- Dana bergulir dicatat dengan harga perolehan yaitu sebesar dana yang digulirkan.
3. Pengukuran Kerugian Daerah
- Kerugian daerah adalah kekuarangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- a. Pengukuran nilai kerugian daerah karena bendahara terdiri dari :
- 1) Uang tunai diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya;
 - 2) Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan bendahara dibanding dengan jumlah semestinya;

- 3) Kerugian daerah berbentuk barang milik daerah diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik daerah di bawah pengawasan bendahara dibanding dengan jumlah semestinya.
- b. Pengukuran nilai kerugian daerah yang karena pegawai bukan bendahara:
 - 1) Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan pegawai bukan bendahara dibanding dengan jumlah semestinya;
 - 2) Kerugian daerah berbentuk barang milik daerah diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh tim yang dibentuk untuk menangani kerugian daerah di bawah pengawasan pegawai negeri bukan bendahara dibanding dengan jumlah semestinya.
- c. Pengukuran nilai kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan
Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena putusan pengadilan adalah sebagai berikut:
 - 1) Beban kerugian daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh ahli;
 - 2) Piutang ganti kerugian daerah dan pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim;
 - 3) Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di kas Negara.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

1. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
2. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
3. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

4. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
5. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
6. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
7. Atribusi biaya administrasi dan umum diatur sebagai berikut:
 - a. Pengadaankonstruksi berupa gedung atau jalan dan jaringan yang diadakan tersendiri (tunggal). Seluruh biaya administrasi dan umum yang meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan biaya umum dan administrasi lainnya diatribusikan sebagai perolehan aset tersebut.
 - b. Pengadaan barang selain konstruksi yang hanya sejenis dalam suatu kegiatan. Seluruh biaya administrasi dan umum yang meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis kantor dan seluruh biaya umum dan administrasi lainnya diatribusikan sebagai perolehan aset tersebut.
 - c. Pengadaan barang/konstruksi yang terdiri dari berbagai jenis. Seluruh biaya administrasi dan umum yang meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis kantor dan seluruh biaya umum dan administrasi lainnya tidak diatribusikan sebagai perolehan aset tersebut.
8. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara prorata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.
9. Atribusi biaya umum dan administratif yang terkait langsung dengan aset tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaporan. Misal biaya panitia lelang yang merupakan gabungan dari berbagai macam pengadaan barang modal yang jika harus diatribusikan ke masing-masing aset tetap jumlahnya tidak terlalu material dan menimbulkan kesulitan dalam pelaporan, maka dapat diatribusikan ke aset-aset tertentu yang memiliki nilai paling material yang dominan dalam pengadaan tersebut sepanjang tidak menyesatkan pembaca laporan.
10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
11. Setiap potongan dagang/rabat dikurangkan dari harga pembelian.

12. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
13. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
14. Perolehan aset tetap yang nilainya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetapi diberlakukan sebagai persediaan atau aset lainnya.
15. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal
 - a. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.
 - b. Untuk menentukan nilai penyusutan aset tetap maka terlebih dahulu harus diketahui:
 - 1) Biaya perolehan, nilai wajar dan nilai penilaian kembali
 - 2) Umur ekonomis/masa manfaat
 - 3) Metode penyusutan yang digunakan
 - c. Suatu aset dianggap telah mempunyai umur ekonomis apabila saat perolehannya paling kurang 15 (lima belas) hari sebelum tanggal laporan, dan dikenakan menjadi 1 (satu) bulan.
 - d. Perolehan aset sampai dengan tanggal 15 dalam suatu bulan perolehan, maka dikenakan menjadi 1 (satu) bulan.
 - e. Terhadap aset yang telah mempunyai umur ekonomis maka harus dihitung penyusutannya.
 - f. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula sebagai berikut:
$$\text{Nilai penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan, nilai wajar, nilai penilaian kembali}}{\text{Umur ekonomis/masa manfaat}}$$
 - g. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
16. Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan
 - a. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
 - b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

- c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan konstruksi;
 - 4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
 - 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- d. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - 1) Asuransi;
 - 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - 3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- e. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- f. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.
- g. Setiap pembayaran termin kontrak konstruksi dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan.
- h. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- i. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- j. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
- k. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- l. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya

pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

- m. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
- n. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

4.3.5 Pengukuran Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah/bendahara penerimaan BPKAD atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari aset tetap.
5. Bangun Guna Serah (BGS) yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
6. Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:
 - a) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
7. Bangun Serah Guna (BSG) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah daerah ditambah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut dikurangi penyusutan.
8. Aset Bangun Serah Kelola yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

9. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
10. Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus disesuaikan dengan kriteria masing-masing aset tetap tidak berwujud.
11. Aset tidak berwujud berupa *software computer* akan dihapus setelah benar-benar tidak memberikan lagi manfaat dan/atau tidak digunakan lagi dalam operasional suatu entitas.
12. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

4.3.6 Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban diukur sesuai dengan:

1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
3. Nilai buku atas aset yang tidak diketahui nilai perolehannya dan telah ditetapkan oleh Tim Penilai Aset Daerah.
4. Beban bantuan sosial diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa.
5. Bantuan sosial yang disalurkan melalui lembaga penyalur, beban bantuan sosial diukur sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur tersebut.
6. Bantuan sosial dalam bentuk barang, beban bantuan sosial diukur sebesar nilai barang yang telah diserahkan kepada penerima. Sedangkan barang yang belum diserahkan kepada penerima akan dicatat sebagai persediaan dan dinilai dan disajikan sebesar:
 - a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) biaya standar apabila diproduksi sendiri;
 - c) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam

satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

1 Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar di muka dan persediaan.

1. Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak.
- 2) Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan membayar pengeluaran daerah.
- 3) Kas di bendahara pengeluaran/pemegang kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran/pemegang kas yang berasal dari uang persediaan (UP), ganti uang (GU) dan tambah uang (TU) yang belum disetor ke RKUD per tanggal neraca.
- 4) Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo rekening di bank dan saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan bendahara penerimaan yang bersangkutan yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.
- 5) Kas lainnya adalah kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan (UP), ganti uang (GU), tambah uang (TU) yang belum disetor ke RKUD per tanggal neraca.
- 6) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Fakfak untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 7) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan yang mempunyai jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- 8) Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhtungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- 9) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktifitas.

- 10) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
- 11) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah sisa kas dari bantuan sosial yang sampai dengan akhir periode masih terdapat pada rekening penyalur dan akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial pada periode berikutnya.
- 12) Secara berkala dilakukan rekonsiliasi antara kas di RKUD dengan kas di BUD, dan antara bendahara pengeluaran/penerimaan dengan BUD.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- 1) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) sampai 12 bulan;
- 2) Surat Utang Negara (SUN); dan
- 3) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Sesuai dengan PMK No. 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada bagan akun standar, piutang terbagi menjadi:

- 1) Piutang pendapatan;
- 2) Piutang Lainnya.

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan

secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- 1) Penilaian Kualitas Piutang;
- 2) Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penyisihan piutang ditentukan berdasarkan kualitas piutang yang dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) Kualitas lancar
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dan umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun.
- 2) Kualitas kurang lancar
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan dan umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun.
- 3) Kualitas diragukan
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan dan umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun.
- 4) Kualitas macet
Kualitas macet adalah piutang yang: 1) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau 2) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara dan umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- 1) 0,5% (nol perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
- 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

4. **Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

5. **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui:

- 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

2. **Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Menurut sifat penanaman, investasi jangka panjang terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut.

a. **Investasi Jangka Panjang Permanen**

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi jangka panjang permanen berupa:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan usaha milik negara, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. **Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi jangka panjang non permanen berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- 4) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi jangka panjang permanen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Fakfak adalah:

- 1) Investasi pada PT. Bank Papua; dengan tingkat kepemilikan 2,13% (per 30 September 2023)
- 2) Investasi pada PD. Mbiah Pahi, dengan tingkat kepemilikan 100%; dan
- 3) Investasi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala, dengan tingkat kepemilikan 100%.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- 1) Metode Biaya;
- 2) Metode Ekuitas; dan
- 3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

Untuk penilaian investasi jangka panjang permanen yang saat ini dimiliki Pemerintah Kabupaten Fakfak dinilai dengan:

- 1) Metode biaya untuk investasi jangka panjang pada PT. Bank Papua;
- 2) Metode ekuitas untuk investasi pada PD. Mbiah Pahi dan PDAM Kabupaten Fakfak.

3. Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (PSAP 07 Paragraf 7) yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
 - 1) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah

- dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode.
- c. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - d. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
 - e. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - f. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - g. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;
 - 3) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 4) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 5) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 6) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - 7) Memiliki nilai sebesar batas kapitalisasi ke atas.
 - h. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.
 - i. Untuk menentukan nilai penyusutan aset tetap maka terlebih dahulu harus

diketahui:

- 1) Biaya perolehan, nilai wajar dan nilai penilaian kembali;
 - 2) Umur ekonomis/masa manfaat;
 - 3) Metode penyusutan yang digunakan.
- j. Suatu aset dianggap telah mempunyai umur ekonomis apabila saat perolehannya paling kurang 15 (lima belas) hari sebelum tanggal laporan, dan dikenakan menjadi 1 (satu) bulan.
- k. Perolehan aset sampai dengan tanggal 15 dalam suatu bulan perolehan, maka dikenakan menjadi 1 (satu) bulan.
- l. Terhadap aset yang telah mempunyai umur ekonomis maka harus dihitung penyusutannya.
- m. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula sebagai berikut:

Nilai penyusutan =
$$\frac{\text{Harga perolehan, nilai wajar, nilai penilaian kembali}}{\text{Umur ekonomis/masa manfaat}}$$

- n. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5



Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

- o. Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan.
- p. Kebijakan akuntansi tentang penyusutan diterapkan setelah penataan aset tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak selesai dilaksanakan.
- q. Aset tetap dapat diakui apabila nilainya pada saat perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan mencapai batas minimal kapitalisasi aset tetap.
- r. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Satuan Minimum Biaya Per Unit	
2.	Peralatan Mesin		
2.1	Alat-alat Berat	≥	50.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	≥	5.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel	≥	2.500.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/ Peternakan	≥	2.500.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	≥	700.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	≥	1.500.000,00
2.7	Alat Ukur	≥	1.500.000,00
2.8	Alat-alat Kedokteran	≥	1.500.000,00
2.9	Alat-alat Laboratorium	≥	1.500.000,00
2.10	Alat Keamanan/ persenjataan	≥	1.500.000,00
3.	Gedung dan Bangunan		
3.1	Bangunan Gedung	≥	40.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	≥	20.000.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya		
5.1	Buku dan Perpustakaan	≥	250.000,00
5.2	Barang Kebudayaan/Olahraga	≥	250.000,00
5.3	Hewan	≥	1.500.000,00
5.4	Hewan Ternak Kecil	≥	1.500.000,00
5.5	Hewan Ternak Besar	≥	3.000.000,00
5.6	Aneka Ternak/ Unggas	≥	500.000,00
5.7	Ikan	≥	350.000,00
5.8	Tanaman	≥	350.000,00

- s. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan awal (renovasi) diatur sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Satuan	Nilai (Rp)
1.	Tanah		≥ 0,00
2.	Peralatan Mesin, terdiri dari :		

No	Jenis Aset	Satuan	Nilai (Rp)
1.	Tanah		≥ 0,00
2.1	Alat-alat Berat	Unit/buah	≥ 25.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Unit/set	≥ 2.500.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel	Unit/set	≥ 2.500.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/ Peternakan	Unit/set	≥ 500.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit/set	≥ 500.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Unit/set	≥ 1.500.000,00
2.7	Alat Ukur	Unit/set	≥ 1.000.000,00
2.8	Alat-alat Kedokteran	Unit/set	≥ 1.000.000,00
2.9	Alat-alat Laboratorium	Unit/set	≥ 1.000.000,00
2.10	Alat Keamanan/ persenjataan	Unit/set	≥ 1.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan		
3.1	Bangunan Gedung	Unit	≥ 20.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Unit	≥ 15.000.000,00
5.	Aset Lainnya		
5.1	Aset Tak Berwujud	-	≥ 3.000.000,00

4. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan Pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lainnya terdiri dari:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- c. Aset Tidak Berwujud;
- d. Aset Lain-lain.

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1. Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2. Kewajiban Jangka Panjang

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset

dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;
2. Pendapatan Transfer – LRA; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetorkan ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari Hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk menandai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;
6. Pendapatan telah diterima direkening penampungan penerimaan yang dibuka atas nama BUD.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D nihil;
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan, dan dana bagi hasil.

Pengakuan transfer masuk dan pendapatan transfer yaitu sebagai berikut.

1. Untuk kepentingan penyajian tranfer masuk pada laporan realisasi anggaran, pengakuan atas trnsfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk RKUD.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada laporan operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengakuan transfer keluar dan beban transfer yaitu sebagai berikut.

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada laporan realisasi anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penusunan laporan operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Kabupaten Fakfak kepada Pemerintah daerah lainnya/Kampung.

Pengukuran transfer masuk dan pendapatan transfer yaitu sebagai berikut.

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada laporan realisasi anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada laporan operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

Pengukuran transfer keluar dan beban transfer yaitu sebagai berikut.

1. Untuk kepentingan penyusunan laporan realisasi anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan laporan operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Kabupaten Fakfak kepada Pemerintah Daerah lainnya/Kampung berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan, dan
2. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Pendapatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan–LO dapat diakui:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pendapatan direalisasi, yaitu setelah adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang.

Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban terdiri dari:

1. Beban Operasi;
2. Beban Transfer;
3. Beban Non Operasional; dan
4. Beban Luar Biasa.

Beban dapat diakui pada saat:

1. timbulnya kewajiban;
2. terjadinya konsumsi aset; dan
3. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan:

1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya;
3. Nilai buku atas aset yang tidak diketahui perolehannya dan telah ditetapkan oleh Tim Penilaian Aset Daerah.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

1. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - 1) Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - 2) Kesalahan yang berulang.
2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun beban.
3. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun beban.
4. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun

- mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
5. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
 6. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 7. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Lampiran I.

5.1.1. Pendapatan

Anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Fakfak, adalah sebagai berikut:

Kodefikasi				Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4				PENDAPATAN – LRA	1.475.288.540.423,00	1.430.219.550.381,59	96,95
4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH -LRA	63.635.103.931,00	46.854.845.867,59	73,63
4	1	1		Pajak Daerah - LRA	8.175.986.365,00	9.023.874.467,00	110,37
4	1	2		Retribusi Daerah - LRA	3.437.297.557,00	3.446.922.122,51	100,28
4	1	3		Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LRA	6.299.000.024,00	4.169.644.947,00	66,20
4	1	4		Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah - LRA	45.722.819.985,00	30.214.404.331,08	66,08
4	2			PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.411.653.436.492,00	1.383.364.704.514,00	98,00
4	2	1		TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.009.024.154.912,00	967.128.059.446,00	95,85
4	2	1	1	Dana Bagi Hasil	144.297.077.870,00	129.012.569.375,00	89,41
4	2	1	2	Dana Alokasi Umum	681.078.687.042,00	655.353.979.578,00	96,22
4	2	1	3	Dana Alokasi Khusus	183.648.390.000,00	182.761.510.493,00	99,52
4	2	2		TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	393.378.912.348,00	401.512.601.334,00	102,07
4	2	2	1	Dana Otonomi Khusus	275.469.539.348,00	280.193.556.334,00	101,71
4	2	2	2	Dana Desa	117.909.373.000,00	121.319.045.000,00	102,89
4	2	3		TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	9.250.369.232,00	14.724.043.734,00	159,17
4	2	3	1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9.250.369.232,00	14.724.043.734,00	159,17
4	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	0,00	0,00	0,00
4	3	3		Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00

1. Pendapatan Asli Daerah - LRA

Realisasi Pendapatan Asli Dareah - LRA sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp46.854.845.867,59 atau ekuivalen 73,63% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp63.635.103.931,00 dengan rincian:

a. Pajak Daerah - LRA

Pendapatan pajak daerah – LRA sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp9.023.874.467,00 atau ekuivalen 110,37% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp8.175.986.365,00. Pendapatan Pajak Daerah - LRA menurut objek pendapatan tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak hotel - LRA	167.953.642,00	803.345.593,00	478,31
2	Pajak restoran - LRA	2.402.207.992,00	3.261.129.098,00	135,76
3	Pajak hiburan - LRA	12.479.350,00	19.786.365,00	158,55
4	Pajak reklame - LRA	113.571.050,00	127.824.000,00	112,55
5	Pajak penerangan jalan - LRA	2.151.629.419,00	2.449.118.928,00	113,83
6	Pajak mineral bukan logam dan batuan - LRA	112.278.000,00	5.858.320,00	5,22
7	Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan – LRA	1.515.777.236,00	1.596.637.213,00	105,33
8	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) – LRA	1.700.089.676,00	760.174.950,00	44,71
Jumlah		8.175.986.365,00	9.023.874.467,00	110,37

b. Retribusi Daerah - LRA

Pendapatan retribusi daerah - LRA sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp3.446.922.122,51 atau ekuivalen 100,28% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp3.437.297.557,00. Pendapatan Retribusi Daerah - LRA menurut objek pendapatan tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	2.847.769.536,00	3.019.495.310,51	106,03
2	Retribusi Perizinan Tertentu	589.528.021,00	427.426.812,00	72,50
Jumlah		3.437.297.557,00	3.446.922.122,51	100,28

1) Retribusi Jasa Umum

Realisasi pendapatan dari Retribusi Jasa Umum sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp3.019.495.310,51 atau ekuivalen 106,03% dari target yang dianggarkan senilai Rp2.847.769.536,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.712.769.536,00	2.503.632.310,51	146,17
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	58.069.000,00	59.520.000,00	102,50
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.076.931.000,00	455.943.000,00	42,34
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	400.000,00	0,00
Jumlah		2.847.769.536,00	3.019.495.310,51	106,03

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.503.632.310,51 atau ekuivalen 146,17% dari target yang dianggarkan senilai Rp1.712.769.536,00 dengan rincian

sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	149.494.001,51	0,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling	190.361.700,00	0,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.522.407.836,00	2.354.138.309,00	154,63
Jumlah		1.712.769.536,00	2.503.632.310,51	146,17

Anggaran “retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas” dianggarkan pada rekening “retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Keliling”, yang seharusnya pada rekening “retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas” sehingga pada retribusi pelayanan kesehatan tidak ada anggaran namun ada realisasinya, dan pada retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Keliling ada anggarannya namun tidak ada realisasinya.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Realisasi pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp59.520.000,00 atau ekuivalen 102,50% dari target yang dianggarkan senilai Rp58.069.000,00.

c) Retribusi Pelayanan Pasar

Realisasi pendapatan dari Retribusi Pelayanan Pasar sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp455.943.000,00 atau ekuivalen 42,34% dari target yang dianggarkan senilai Rp1.076.931.000,00 yang merupakan retribusi los.

d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi pendapatan dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp400.000,00 atau ekuivalen 0,00% karena tidak dianggarkan dalam DPA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023.

2) Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi pendapatan dari Retribusi Perizinan Tertentu sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp427.426.812,00 atau ekuivalen 72,50% dari target yang dianggarkan senilai Rp589.528.021,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	35.056.334,00	220.161.712,00	628,02
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	12.686.440,00	300.000,00	2,36
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	541.785.247,00	206.965.100,00	38,20
Jumlah		589.528.021,00	427.426.812,00	72,50

c. **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp4.169.644.947,00 atau ekuivalen 66,20% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp6.299.000.024,00 bersumber dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.662.002.461,00	4.169.644.947,00	73,64
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	636.997.563,00	0,00	0,00
Jumlah		6.299.000.024,00	4.169.644.947,00	66,20

1) **Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)**

Pendapatan dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp4.169.644.947,00 atau ekuivalen 73,64% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp5.662.002.461,00 yang merupakan pendapatan deviden tahun 2022 atas penyertaan modal pada Bank papua yang diterima di RKUD KAB. FAK FAK pada tanggal 30 Maret 2023.

2) **Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)**

Pendapatan dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) merupakan pendapatan deviden atas penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala yang sampai dengan Laporan ini dibuat belum menyetorkan deviden kepada pemerintah daerah.

d. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah – LRA sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp30.214.404.331,08 atau ekuivalen 66,08% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp45.722.819.985,00. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah – LRA menurut objek pendapatan tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	658.082.565,00	990.543.980,00	150,52
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.927.360.000,00	419.936.445,00	14,35
3	Jasa Giro	3.696.850.269,00	1.370.278.751,24	37,07
4	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	40.360.756,00	1,61

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.522.403.000,00	0,00	-
6	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	1.713.011.186,00	2.149.943.717,84	125,51
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	144.984.224,00	558.901.800,00	385,49
8	Pendapatan dari Pengembalian	211.229.128,00	419.227.472,00	198,47
9	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	32.348.899.613,00	24.265.211.409,00	75,01
Jumlah		45.722.819.985,00	30.214.404.331,08	66,08

Untuk poin 4 tabel di atas, direncanakan akan menempatkan sebagian uang pemerintah daerah pada deposito, namun sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 tidak terlaksana, sehingga pendapatan bunga deposito tidak sesuai dengan yang direncanakan.

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp990.543.980,00 atau ekuivalen 150,52% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp658.082.565,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	658.082.565,00	829.913.869,00	126,11
2	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	0,00	160.630.111,00	0,00
Jumlah		658.082.565,00	990.543.980,00	150,52

a) Hasil Penjualan Alat Angkutan

Hasil Penjualan Alat Angkutan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp829.913.869,00 atau ekivalen 126,11% dari target yang dianggarkan senilai Rp658.082.565,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hasil Penjualan Kendaraan Roda Empat	823.923.825,00
2	Hasil Penjualan Kendaraan Roda Dua	5.990.044,00
Jumlah		829.913.869,00

b) Hasil Penjualan Bangunan Gedung

Hasil Penjualan Bangunan Gedung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp160.630.111,00 atau ekivalen 0,00% karena tidak dianggarkan dalam DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023. Bangunan gedung yang dijual merupakan bangunan gedung rumah dinas.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp419.936.445,00 atau ekuivalen 14,43% dari anggaran

yang ditargetkan senilai Rp2.927.360.000,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hasil Sewa BMD	927.360.000,00	42.300.000,00	4,56
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2.000.000.000,00	377.636.445,00	18,88
Jumlah		2.927.360.000,00	419.936.445,00	14,35

a) Hasil Sewa BMD

Hasil Sewa BMD sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp42.300.000,00 atau ekivalen 4,56% dari target yang dianggarkan senilai Rp927.360.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hasil sewa gedung diklat	4.700.000,00
2	Hasil sewa Gedung Koni/Lapangan Basket	15.100.000,00
3	Hasil sewa Gedung untuk Apotik Kimia Farma pada RSUD	22.500.000,00
Jumlah		42.300.000,00

b) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp377.636.445,00 atau ekivalen 18,88% dari target yang dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hasil pemanfaatan lahan pelabuhan	300.300.000,00
2	Hasil pemanfaatan lahan dengan PT. Rimbun Menara papua (lahan untuk Hotel Grand Papua Fakfak)	77.336.445,00
Jumlah		377.636.445,00

3) Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan Jasa Giro sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.370.278.751,24 atau ekuivalen 37,07% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp3.696.850.269,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.196.850.269,00	1.305.512.475,00	40,84
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000,00	57.429.093,24	11,49
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	175.603,00	0,00
4	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	7.161.580,00	0,00
Jumlah		3.696.850.269,00	1.370.278.751,24	37,07

a) Jasa Giro pada Kas Daerah

Realisasi pendapatan Jasa Giro pada Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.305.512.475,00 atau ekuivalen 40,84% dari target yang dianggarkan senilai Rp3.196.850.269,00 dengan rincian sebagai berikut:

Periode	RKUD	Otsus 1%	Otsus 1,25%	DTI	DBH Otsus	Jumlah
Januari	61.777.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.777.128,00

Periode	RKUD	Otsus 1%	Otsus 1,25%	DTI	DBH Otsus	Jumlah
2023						
Februari 2023	62.546.231,00	772.848,00	845.628,00	1.384.098,00	1.922.296,00	67.471.101,00
Maret 2023	81.448.902,00	4.792.511,00	5.243.316,00	3.227.844,00	11.919.203,00	106.631.776,00
April 2023	82.528.787,00	4.642.584,00	5.086.976,00	3.125.304,00	11.483.076,00	106.866.727,00
Mei 2023	73.593.094,00	9.090.637,00	5.377.620,00	3.231.068,00	11.573.947,00	102.866.366,00
Juni 2023	53.453.376,00	0,00	5.224.007,00	2.907.476,00	10.907.484,00	72.492.343,00
Juli 2023	58.725.954,00	7.179.440,00	10.375.470,00	5.617.606,00	14.912.747,00	96.811.217,00
Agustus 2023	30.549.641,00	7.937.289,00	14.668.840,00	9.450.598,00	16.240.008,00	78.846.376,00
September 2023	82.022.342,00	4.098.037,00	11.137.069,00	8.899.441,00	42.206.025,00	148.362.914,00
Oktober 2023	56.412.677,00	8.818.923,00	15.068.411,00	8.969.699,00	66.434.365,00	155.704.075,00
November 2023	87.707.304,00	3.371.419,00	6.664.980,00	4.396.294,00	60.042.739,00	162.182.736,00
Desember 2023	50.494.445,00	14.030.622,00	18.613.387,00	13.764.651,00	48.596.611,00	145.499.716,00
Total	781.259.881,00	64.734.310,00	98.305.704,00	64.974.079,00	296.238.501,00	1.305.512.475,00

b) Jasa Giro pada Kas di Bendahara

Realisasi pendapatan Jasa Giro dari Kas di Bendahara sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp57.429.093,24 atau ekuivalen 11,49% dari target yang dianggarkan senilai Rp500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
1	Distrik Fakfak Tengah	Setoran jasa giro ke RKUD TA 2022	5.282,00
2	Distrik Tomage	Setoran jasa giro ke RKUD TA 2022	8.166,00
3	Distrik Arguni	Setoran jasa giro ke RKUD TA 2022	6.807,00
4	Distrik Furwagi	Setoran jasa giro ke RKUD TA 2022	7.008,00
		Setoran jasa giro ke RKUD TA 2023	35.830.128,63
		Setoran sisa saldo di Kas Bendahara Penerima	863.417,50
6	Dinas Kesehatan	Setoran jasa giro ke RKUD TA 2023	181.562,11
		Setoran jasa giro BOK Puskesmas Bulan Februari s.d November TA 2023	13.006.276,00
		Setoran jasa giro BOK Puskesmas Bulan Desember TA 2023	785.709,00
7	Puskesmas Fakfak	Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Desember TA 2022	164.476,00
		Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Januari sd September TA 2023	2.487.533,00
8	Puskesmas Bomberay	Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Desember TA 2022	52.452,00
9	Puskesmas Degen	Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Desember TA 2022	8.052,00
		Setoran jasa giro Dana JKN Bulan April s.d Juni TA 2023	100.274,00
10	Pukesmas Weri	Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Desember TA 2022	9.712,00

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
		Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Juni TA 2023	18.023,00
11	Pukesmas Fakfak Tengah	Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Desember TA 2022	80.039,00
		Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Januari s.d September TA 2023	407.469,00
		Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Januari s.d Desember TA 2022	97.449,00
12	Puskesmas Sekban	Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Desember TA 2022	128.208,00
		Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Januari s.d Juni TA 2023	919.399,00
13	Puskesmas Kokas	Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Desember TA 2022	5.516,00
		Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Januari sd Juni TA 2023	97.033,00
14	Puskesmas karas	Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Desember TA 2022	45.780,00
15		Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Mei dan Juli TA 2023	61.478,00
16	Pukesmas Werba	Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Januari s.d Desember TA 2022	172.786,00
		Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Januari dan Juni TA 2023	779.375,00
17	Puskesmas Kramongmongga	Setoran jasa giro Dana JKN Bulan Mei dan Juni TA 2023	65.653,00
18	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	Setoran jasa giro ke RKUD TA 2022	832.148,00
19	BAPENDA	Setoran Jasa giro ke RKUD TA 2023	201.882,00
Jumlah			57.429.093,24

4) Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp40.360.756,00 atau ekuivalen 1,61% dari target yang dianggarkan senilai Rp2.500.000.000,00. Pendapatan bunga ini berasal dari bunga deposito dana Pemerintah Daerah di Bank BRI.

5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp0,00 atau ekuivalen 0,00% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp1.522.403.000,00. Tidak ada realisasi dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2023, tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara tidak ada setoran.

6) Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain

Penerimaan komisi potongan atau bentuk lain sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp2.149.943.717,84 atau ekuivalen 125,51% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp1.713.011.186,00.

7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp558.901.800,00 atau ekuivalen 385,49% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp144.984.224,00 yang terdiri dari:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	424.946.800,00
2	Dinas Kesehatan	111.348.000,00
3	Dinas Perhubungan	17.061.000,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	5.546.000,00
Jumlah		558.901.800,00

a) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp424.946.800,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Setoran pengembalian denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Pondok Pesantren Muhammadiyah An. CV. Ugar Sejahtera TA 2022	3.010.000,00
2	Setoran pengembalian denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pondok Pasantren Muhammadiyah An. CV Darma Citra Utama TA 2022	230.000,00
3	Setoran pengembalian denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah tokoh masyarakat An. CV. Renggo Konsultan TA 2022	70.000,00
4	Setoran pengembalian denda keterlambatan pekerjaan atas pekerjaan rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur Jalan Bomberay-Goras TA 2022	51.012.800,00
5	Setoran keterlambatan pekerjaan pembayaran atas pekerjaan rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan di Distrik Furwagi An. CV.Almuklis Pratama Mandiri TA 2022	41.797.000,00
6	Setoran denda keterlambatan pekerjaan atas pekerjaan rekonstruksi/peningkatana kapasitas struktur jalan di Distrik Furwagi An. CV. Almukhlis Pratama Mandiri pada TA 2022	1.695.000,00
7	Setoran atas denda keterlambatan pekerjaan rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan (Fakfak-Waserat) An. CV Mekampuder Jaya TA 2022	87.942.000,00
8	Setoran pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan pematangan Bandara Siboru sisi darat An. PT. Aulia Mitra TA 2021	150.000.000,00
9	Setoran pengembalian kelebihan pembayarana atas pekerjaan pematangan Bandara Siboru sisi darat TA 2021 An. PT. Aulia Mitra Dewata	89.190.000,00
Jumlah		424.946.800,00

b) Dinas Kesehatan

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas

Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp111.348.000,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Setoran pengembalian denda untuk paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Tomage An. CV. Iskarif TA 2022	30.000.000,00
2	Setoran pengembalian denda untuk paket pekerjaan renovasi Puskesmas Fakfak Kota An. CV. Pusaka Papua TA 2022	20.000.000,00
3	Setoran pengembalian kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan pengadaan barangn (<i>refocusing</i>) An.PT. Sinar Medika Papua TA 2021	17.770.000,00
4	Setoran pengembalian kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan pengadaan barangn (<i>refocusing</i>) An. PT. Karya Sindo Papua TA 2021	43.578.000,00
Jumlah		111.348.000,00

c) Dinas Perhubungan

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Perhubungan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp17.061.000,00 yaitu setoran atas perhitungan denda keterlambatan pekerjaan pematangan Bandara Siboru sisi darat An. CV. Mbaham Sejahtera TA 2022.

d) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp5.546.000,00 yaitu setoran pengembalian nilai denda kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan akses TA 2022.

8) Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari pengembalian sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp419.227.472,00 atau ekuivalen 198,47% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp211.229.128,00 yang merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

9) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp24.265.211.409,00 atau ekuivalen 75,01% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp32.348.899.613,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket.
1	Puskesmas Weri	401.291.057,00	208.048.675,00	51,84	-
2	Puskesmas Bomberay	340.704.075,00	227.355.355,00	66,73	-
3	Puskesmas Fakfak Kota	1.798.547.330,00	1.677.824.161,00	93,29	-
4	Puskesmas Fakfak Tengah	1.317.290.248,00	831.270.406,00	63,10	-

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket.
5	Puskesmas Werba	1.042.969.937,00	364.610.497,00	34,96	-
6	Puskesmas Sekban	906.696.237,00	770.804.298,00	85,01	-
7	Puskesmas Karas	366.680.879,00	212.342.307,00	57,91	-
8	Puskesmas Kokas	300.601.441,00	248.850.922,00	82,78	-
9	Puskesmas Kramongmongga	316.417.665,00	295.350.894,00	93,34	-
10	Puskesmas Degen	340.798.792,00	312.135.352,00	91,59	-
11	BPKAD	25.216.901.952,00	19.116.618.542,00	75,81	Mata anggarannya ada di BPKAD
Jumlah		32.348.899.613,00	24.265.211.409,00	75,01	

Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPKAD Kabupaten Fakfak merupakan pendapatan yang diterima oleh RSUD Fakfak, namun dikarenakan anggaran pendapatannya ada pada BPKAD maka realisasi pendapatannya diinputkan pada BPKAD.

2. Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan Transfer – LRA sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.383.364.704.514,00 atau 98,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.411.653.436.492,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.009.024.154.912,00	967.128.059.446,00	95,85
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	393.378.912.348,00	401.512.601.334,00	102,07
3	Transfer Pemerintah Provinsi	9.250.369.232,00	14.724.043.734,00	159,17
Jumlah		1.411.653.436.492,00	1.383.364.704.514,00	98,00

a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp967.128.059.446,00 atau ekuivalen 95,85% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp1.009.024.154.912,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA menurut objek pendapatan tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil	144.297.077.870,00	129.012.569.375,00	89,41
2	Dana Alokasi Umum	681.078.687.042,00	655.353.979.578,00	96,22
3	Dana Alokasi Khusus	183.648.390.000,00	182.761.510.493,00	99,52
Jumlah		1.009.024.154.912,00	967.128.059.446,00	95,85

1) Dana Bagi Hasil

Pendapatan Transfer dari Dana Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp129.012.569.375,00 atau ekuivalen 89,41% dari target yang dianggarkan senilai Rp144.297.077.870,00. Pendapatan daerah dari Transfer Dana Bagi Hasil terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	29.450.674.000,00	10.880.484.375,00	36,94
2	DBH PPh	2.722.424.000,00	2.722.424.000,00	100,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	91.358.276.870,00	30.350.633.000,00	33,22
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	63.293.325.000,00	0,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.813.225.000,00	0,00	0,00
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	1.813.225.000,00	0,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	13.856.713.000,00	13.856.713.000,00	100,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	1.000.000.000,00	0,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	5.095.765.000,00	5.095.765.000,00	100,00
Jumlah		144.297.077.870,00	129.012.569.375,00	89,41

Poin nomor 8 (delapan) pada tabel di atas sesungguhnya adalah Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit, tetapi rekening untuk dana tersebut belum tersedia dalam aplikasi FMIS TA 2023, maka penganggaran dan realisasinya diinput ke dalam rekening Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan.

2) Dana Alokasi Umum

Pendapatan transfer dari Dana Alokasi Umum sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp655.353.979.578,00 atau ekuivalen 96,22% dari target yang dianggarkan senilai Rp681.078.687.042,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAU	659.273.833.042,00	633.549.125.578,00	96,10
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	20.404.854.000,00	20.404.854.000,00	100,00
Jumlah		681.078.687.042,00	655.353.979.578,00	96,22

3) Dana Alokasi Khusus

Pendapatan transfer dari Dana Alokasi Khusus sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp182.761.510.493,00 atau ekuivalen 99,52% dari target yang dianggarkan senilai Rp183.648.390.000,00, terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Transfer Khusus-Dana	102.819.285.000,00	101.638.056.848,00	98,85

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Alokasi Khusus (DAK) Fisik			
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	80.829.105.000,00	81.123.453.645,00	100,36
Jumlah		183.648.390.000,00	182.761.510.493,00	99,52

a) Dana Alokasi Khusus Fisik

Pendapatan transfer dari Dana Alokasi Khusus Fisik sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp101.638.056.848,00 atau ekuivalen 98,85% dari target yang dianggarkan senilai Rp102.819.285.000,00, terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	7.947.928.000,00	7.919.994.290,00	99,65
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	4.792.999.000,00	4.762.597.360,00	99,37
3	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler KB	765.936.000,00	761.521.685,00	99,42
4	DAK Fisik Bidang Jalan Reguler Jalan	27.906.972.000,00	27.902.000.000,00	99,98
5	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	53.310.300.000,00	52.610.725.513,00	98,69
6	DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan Reguler	7.877.746.000,00	7.481.318.000,00	94,97
7	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pengendalian Penyakit	217.404.000,00	199.900.000,00	91,95
Jumlah		102.819.285.000,00	101.638.056.848,00	98,85

b) Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Pendapatan transfer dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp81.123.453.645,00 atau ekuivalen 100,36% dari target yang dianggarkan senilai Rp80.829.105.000,00, terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	26.267.930.000,00	26.194.466.567,00	99,72
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.447.500.000,00	1.402.500.000,00	96,89
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	23.478.035.000,00	26.341.918.000,00	112,20
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.369.500.000,00	1.136.250.000,00	82,97
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.612.710.000,00	6.493.064.000,00	115,69
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.889.880.000,00	1.879.491.600,00	99,45
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	873.860.000,00	872.578.850,00	99,85
8	DAK Non Fisik-BOK	13.468.371.000,00	4.785.857.105,00	35,53
9	DAK Non Fisik-BOKB	3.973.402.000,00	3.819.687.919,00	96,13

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	959.717.000,00	958.967.000,00	99,92
11	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	438.200.000,00	124.859.394,00	28,49
12	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00	585.176.910,00	97,86
13	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	452.000.000,00	452.000.000,00	100,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOK Puskesmas	0	6.076.636.300,00	0,00
Jumlah		80.829.105.000,00	81.123.453.645,00	100,36

b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya tahun 2023 senilai Rp401.512.601.334,00 atau ekuivalen 102,07% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp393.378.912.348,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Otonomi Khusus	275.469.539.348,00	280.193.556.334,00	101,71
2	Dana Desa	117.909.373.000,00	121.319.045.000,00	102,89
Jumlah		393.378.912.348,00	401.512.601.334,00	102,07

1) Dana Otonomi Khusus

Pendapatan Transfer dari Dana Otonomi Khusus tahun 2023 senilai Rp280.193.556.334,00 atau ekuivalen 101,71% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp275.469.539.348,00 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua Barat	239.910.200.348,00	244.634.217.334,00	101,97
2	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	35.559.339.000,00	35.559.339.000,00	100,00
Jumlah		275.469.539.348,00	280.193.556.334,00	101,71

2) Dana Desa

Pendapatan Transfer dari Dana Desa tahun 2023 senilai Rp121.319.045.000,00 atau ekuivalen 102,89% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp117.909.373.000,00.

c. Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp14.724.043.734,00 atau ekuivalen 159,17% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp9.250.369.232,00 yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor	1.492.826.717,00	1.502.077.822,00	100,62

2	Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor	1.048.601.394,00	1.094.431.715,00	104,37
3	Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor	6.708.941.121,00	7.486.537.606,00	111,59
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	4.640.996.591,00	0,00
Jumlah		9.250.369.232,00	14.724.043.734,00	159,17

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp1.502.077.822,00 atau ekuivalen 100,62% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp1.492.826.717,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal Transfer	Nomor SK	Nilai (Rp)
1	DBH Pajak Kendaraan Bermotor/PKB TW 4 TA 2022	03-04-2023	900.1.14.3/43/2/2023	536.646.687,00
2	DBH Pajak Kendaraan Bermotor/PKB TW 1 TA 2023	25-08-2023	900.1.13.1/128/6/2023	447.230.878,00
3	DBH Pajak Kendaraan Bermotor/PKB TW 3 TA 2023	07-12-2023	900.1.14.3/247/11/2023	518.200.257,00
Jumlah				1.502.077.822,00

2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp1.094.431.715,00 atau ekuivalen 104,37% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp1.048.601.394,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal Transfer	Nomor SK	Nilai (Rp)
1	DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB TW 4 TA 2022	03-04-2023	900.1.14.3/43/2/2023	326.639.647,00
2	DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB TW 1 TA 2023	25-08-2023	900.1.13.1/128/6/2023	424.403.875,00
3	DBH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN-KB TW 3 TA 2023	07-12-2023	900.1.14.3/247/11/2023	343.388.193,00
Jumlah				1.094.431.715,00

3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp7.486.537.606,00 atau ekuivalen 111,59% dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp6.708.941.121,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal Transfer	Nomor SK	Nilai (Rp)
1	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB-KB TW 4 TA 2022	03-04-2023	900.1.14.3/43/2/2023	2.834.539.303,00
2	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB-KB TW 1 TA 2023	25-08-2023	900.1.13.1/128/6/2023	2.604.117.831,00

No	Uraian	Tanggal Transfer	Nomor SK	Nilai (Rp)
3	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB-KB TW 3 TA 2023	07-12-2023	900.1.14.3/2 47/11/2023	2.047.880.472,00
Jumlah				7.486.537.606,00

4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

Pendapatan bagi hasil pajak rokok sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp4.640.996.591,00 atau ekuivalen 0,00% karena tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Fakfak TA 2023. Rincian transfer pendapatan bagi hasil pajak sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal Transfer	Nomor SK	Nilai (Rp)
1	DBH Pajak Rokok Kurang Bayar TW 4 Periode Desember TA 2022 di Tahun 2023	23-06-2023	900.1.14.3/1 02/5/2023	689.605.135,00
2	DBH Pajak Rokok TW 1 Periode Januari sd Maret TA 2023	23-06-2023	900.1.14.3/1 02/5/2023	1.208.369.730,00
3	DBH Pajak Rokok TW 2 Periode April sd Juni TA 2023	12-09-2023	900.1.14.3/1 75/8/2023	1.037.569.469,00
4	DBH Pajak Rokok TW 3 periode Juli sd September TA 2023	07-12-2023	900.1.14.3/2 49/11/2023	923.788.858,00
5	DBH Pajak Rokok TW 4 periode Oktober sd November TA 2023	29-12-2023	900.1.14.3/2 91/12/2023	781.663.399,00
Jumlah				4.640.996.591,00

5.1.2. Belanja

1. Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi

Anggaran dan realisasi belanja daerah untuk tahun 2023, berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut:

Kodefikasi			Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5			BELANJA DAERAH	1.592.894.105.914,00	1.506.021.842.520,79	94,55
5	1		Belanja Operasi	1.095.804.321.611,00	1.028.766.926.910,05	93,88
5	1	1	Belanja Pegawai	478.334.782.592,00	460.457.793.507,00	96,26
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	534.143.329.214,00	488.169.452.661,05	91,39
5	1	5	Belanja Hibah	62.962.743.805,00	62.029.323.242,00	98,52
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	20.363.466.000,00	18.110.357.500,00	88,94
5	2		Belanja Modal	301.837.979.123,00	279.222.686.938,74	92,51
5	2	1	Belanja Tanah	3.340.015.500,00	2.220.170.500,00	66,47
5	2	2	Belanja Peralatan dan Mesin	59.509.063.941,00	56.855.527.479,00	95,54
5	2	3	Belanja Gedung dan Bangunan	108.141.219.903,00	95.937.484.162,74	88,72
5	2	4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.300.079.279,00	123.090.729.797,00	95,20
5	2	5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.447.600.500,00	1.018.800.000,00	70,38
5	2	6	Belanja Aset Lainnya	100.000.000,00	99.975.000,00	99,98
5	3		Belanja Tak Terduga	14.107.285.887,00	14.070.365.920,00	99,74
5	3	1	Belanja Tak Terduga	14.107.285.887,00	14.070.365.920,00	99,74
5	4		Belanja Transfer	181.144.519.293,00	183.961.862.752,00	101,56

Kodefikasi			Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	4	1	Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	181.144.519.293,00	183.961.862.752,00	101,56

a. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi tahun 2023 senilai Rp1.028.766.926.910,05 atau ekuivalen 93,88% dari target belanja operasi yang ditetapkan senilai Rp1.095.804.321.611,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp116.766.201.644,65 atau naik 93,88% dari jumlah realisasi belanja operasi tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp912.000.725.265,40. Belanja operasi terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja pegawai	478.334.782.592,00	460.457.793.507,00	96,26
2	Belanja barang dan jasa	534.143.329.214,00	488.169.452.661,05	91,39
3	Belanja hibah	62.962.743.805,00	62.029.323.242,00	98,52
4	Belanja bantuan sosial	20.363.466.000,00	18.110.357.500,00	88,94
Jumlah		1.095.804.321.611,00	1.028.766.926.910,05	93,88

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 senilai Rp460.457.793.507,00 atau ekuivalen 96,26% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp478.334.782.592,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp39.339.414.674,00 atau naik 9,34% dari jumlah realisasi belanja pegawai tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp421.118.378.833,00. Belanja pegawai terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja gaji dan tunjangan ASN	304.103.126.129,00	293.790.576.162,00	96,61
2	Belanja tambahan penghasilan ASN	125.691.349.553,00	118.325.382.534,00	94,14
3	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	32.739.005.940,00	32.158.042.000,00	98,23
4	Belanja gaji dan tunjangan DPRD	12.275.204.500,00	11.591.773.419,00	94,43
5	Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH	185.549.258,00	161.638.323,00	87,11
6	Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	554.114.893,00	92,11
7	Belanja pegawai BOS	2.738.947.212,00	3.876.266.176,00	141,52
Jumlah		478.334.782.592,00	460.457.793.507,00	96,26

a) Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2023 senilai Rp293.790.576.162,00 atau ekuivalen 96,61% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp304.103.126.129,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp24.002.826.221,00 atau naik 8,90% dari jumlah

realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp269.787.749.941,00. Belanja gaji dan tunjangan terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja gaji pokok ASN	204.904.890.310,00	202.687.667.195,00	98,92
2	Belanja tunjangan keluarga ASN	18.229.597.229,00	17.138.434.455,00	94,01
3	Belanja tunjangan jabatan ASN	8.171.752.000,00	7.370.426.500,00	90,19
4	Belanja tunjangan fungsional ASN	11.141.566.845,00	10.913.984.000,00	97,96
5	Belanja tunjangan fungsional umum ASN	4.298.442.625,00	3.661.440.851,00	85,18
6	Belanja tunjangan beras ASN	18.986.863.700,00	18.048.718.796,00	95,06
7	Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN	698.901.588,00	359.800.173,00	51,48
8	Belanja pembulatan gaji ASN	4.111.207,00	3.027.317,00	73,64
9	Belanja iuran jaminan kesehatan ASN	9.127.630.345,00	8.401.444.004,00	92,04
10	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN	622.213.435,00	413.821.149,00	66,51
11	Belanja iuran jaminan kematian ASN	1.566.171.603,00	1.219.435.214,00	77,86
12	Belanja tunjangan khusus	26.350.985.242,00	23.572.376.508,00	89,46
Jumlah		304.103.126.129,00	293.790.576.162,00	96,61

b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2023 senilai Rp118.325.382.534,00 atau ekuivalen 94,14% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp125.691.349.553,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp5.062.098.244,00 atau naik 4,47% dari jumlah realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp113.263.284.290,00. Belanja tambahan penghasilan ASN terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	121.880.929.399,00	114.777.018.399,00	94,17
2	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN	3.810.420.154,00	3.548.364.135,00	93,12
Jumlah		125.691.349.553,00	118.325.382.534,00	94,14

c) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun 2023 senilai Rp32.158.042.000,00 atau ekuivalen 98,23% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp32.739.005.940,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp10.117.379.340,00 atau naik 45,90% dari jumlah realisasi belanja

tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp22.040.662.660,00. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD	23.583.130.940,00	23.577.785.200,00	99,98
2	Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD	5.638.325.000,00	5.411.986.800,00	95,99
3	Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD	1.773.750.000,00	1.524.500.000,00	85,95
4	Belanja honorarium	1.743.800.000,00	1.643.770.000,00	94,26
Jumlah		32.739.005.940,00	32.158.042.000,00	98,23

d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi belanja gaji dan tunjangan DPRD tahun 2023 senilai Rp11.591.773.419,00 atau ekuivalen 94,43% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp12.275.204.500,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp2.368.281,00 atau turun 0,02% dari jumlah belanja gaji dan tunjangan DPRD tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp11.594.141.700,00. Belanja gaji dan tunjangan DPRD terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja uang representasi DPRD	492.572.250,00	453.524.400,00	92,07
2	Belanja tunjangan keluarga DPRD	28.899.465,00	28.606.200,00	98,99
3	Belanja tunjangan beras DPRD	48.843.669,00	40.844.880,00	83,62
4	Belanja uang paket DPRD	46.257.225,00	38.682.000,00	83,62
5	Belanja tunjangan jabatan DPRD	670.729.762,00	654.370.500,00	97,56
6	Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD	65.918.652,00	45.942.210,00	69,70
7	Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD	61.049.766,00	23.659.572,00	38,75
8	Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD	2.583.000.000,00	2.520.000.000,00	97,56
9	Belanja tunjangan reses DPRD	420.000.000,00	419.659.572,00	99,92
10	Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD	491.010.121,00	458.832.888,00	93,45
11	Belanja pembulatan gaji DPRD	16.236.000,00	0,00	0,00
12	Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD	3.701.277.590,00	3.640.736.304,00	98,36
13	Belanja tunjangan transportasi DPRD	3.456.000.000,00	3.264.000.000,00	94,44
14	Belanja uang jasa	193.410.000,00	2.914.893,00	1,51

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	pengabdian DPRD			
Jumlah		12.275.204.500,00	11.591.773.419,00	94,43

e) **Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

Realisasi belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH tahun 2023 senilai Rp161.638.323,00 atau ekuivalen 87,11% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp185.549.258,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp136.013,00 atau naik 0,08% dari jumlah belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp161.502.310,00. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja gaji pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.955.440,00	99,98
2	Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH	19.865.247,00	0,00	0,00
3	Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56
4	Belanja tunjangan beras KDH/WKDH	742.305,00	724.200,00	97,56
5	Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH	1.691.104,00	1.191.803,00	70,47
6	Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH	2.296,00	1.920,00	83,62
7	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH	6.268.080,00	5.241.600,00	83,62
8	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH	134.316,00	102.960,00	76,66
9	Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH	143.910,00	140.400,00	97,56
Jumlah		185.549.258,00	161.638.323,00	87,11

f) **Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

Realisasi belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2023 senilai Rp554.114.893,00 atau ekuivalen 92,11% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp601.600.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp47.420.607,00 atau turun 7,88% dari jumlah belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp601.535.500,00. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja dana operasional pimpinan DPRD	201.600.000,00	154.114.893,00	76,45
2	Belanja dana operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
Jumlah		601.600.000,00	554.114.893,00	92,11

g) **Belanja Pegawai BOS**

Realisasi belanja pegawai BOS tahun 2023 senilai Rp3.876.266.176,00 atau 141,52% dari target yang telah ditetapkan senilai

Rp2.738.947.212,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp206.763.744,00 atau naik 5,63% dari jumlah belanja pegawai BOS tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp3.669.502.432,00. Realisasi ini merupakan belanja pegawai dari Dana BOS untuk satuan Pendidikan negeri (SD Negeri dan SMP Negeri).

2) **Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar Rp488.169.452.661,05 atau ekuivalen 91,39% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp534.143.329.214,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp54.333.578.189,65 atau naik 12,52% dari jumlah belanja barang dan jasa tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp433.835.874.471,40. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja barang	206.260.889.128,00	194.419.228.839,00	94,26
2	Belanja jasa	169.447.108.482,00	150.255.885.345,05	88,67
3	Belanja pemeliharaan	13.089.538.608,00	12.507.099.017,00	95,55
4	Belanja perjalanan dinas	120.898.124.094,00	106.487.111.424,00	88,08
5	Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	10.955.865.603,00	8.575.055.262,00	78,27
6	Belanja barang dan jasa BOS	13.491.803.299,00	10.492.306.778,00	77,77
7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	5.432.839.263,00	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	(73.267,00)	0,00
Jumlah		534.143.329.214,00	488.169.452.661,05	91,39

a) **Belanja Barang**

Realisasi belanja barang tahun 2023 senilai Rp194.419.228.839,00 atau ekuivalen 94,26% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp206.260.889.128,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp52.914.446.373,00 atau naik sebesar 34,51% dari jumlah belanja barang tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp153.346.442.755,00. Realisasi ini merupakan belanja barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.718.199.019,00	1.664.888.495,00	96,90
2	Bahan Kimia	25.000.000,00	24.991.650,00	99,97
3	Bahan Bakar dan Pelumas	21.524.729.492,00	21.355.968.685,00	99,22
4	Bahan/Bibit Tanaman	977.595.940,00	948.147.120,00	96,99
5	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
6	Suku Cadang Alat	408.904.054,00	325.129.835,00	79,51



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pertanian			
7	Alat Tulis Kantor	4.066.420.702,00	3.928.534.505,00	96,61
8	Kertas dan Cover	5.742.947.861,00	5.434.114.674,00	94,62
9	Bahan Cetak	10.386.878.520,00	9.700.653.129,00	93,39
10	Benda Pos	376.345.500,00	343.507.794,00	91,27
11	Bahan Komputer	3.942.388.249,00	3.743.107.995,00	94,95
12	Perabot Kantor	3.563.969.974,00	3.239.755.575,00	90,90
13	Alat Listrik	723.423.088,00	670.313.848,00	92,66
14	Perlengkapan Dinas	423.304.859,00	406.607.650,00	96,06
15	Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.360.705.053,00	1.359.405.153,00	99,90
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.694.889.515,00	17.047.394.444,00	91,19
17	Obatan-Obat	8.940.056.371,00	8.673.561.834,00	97,02
18	Obat-Obatan Lainnya	152.336.366,00	132.090.000,00	86,71
19	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	49.096.177.375,00	45.706.325.651,00	93,10
20	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	22.949.145.705,00	21.669.813.319,00	94,43
21	Natura	7.826.813.120,00	7.532.852.338,00	96,24
22	Pakan	330.000.000,00	329.656.200,00	99,90
23	Makanan dan Minuman Rapat	20.684.923.000,00	18.686.983.366,00	90,34
24	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.545.242.500,00	5.251.760.492,00	94,71
25	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	448.776.000,00	448.776.000,00	100,00
26	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.867.124.850,00	2.685.676.021,00	93,67
27	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.068.464.000,00	1.068.464.000,00	100,00
28	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.298.592.350,00	7.022.099.098,00	96,21
29	Pakaian Dinas KDH dan WKDH	44.400.000,00	33.300.000,00	75,00
30	Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	122.975.000,00	122.975.000,00	100,00
31	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.100.000,00	11.000.000,00	99,10
32	Pakaian Dinas Harian (PDH)	522.654.000,00	518.849.840,00	99,27
33	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	754.050.000,00	753.781.500,00	99,96
34	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	13.492.710,00	13.492.710,00	100,00
35	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	195.000.000,00	191.852.000,00	98,39
36	Pakaian Penyelamatan	46.000.000,00	45.701.676,00	99,35

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
37	Pakaian Pelatihan Kerja	765.500.000,00	724.476.000,00	94,64
38	Pakaian Batik Tradisional	1.082.597.535,00	1.051.793.535,00	97,15
39	Pakaian Olahraga	1.077.791.000,00	1.072.058.750,00	99,47
40	Pakaian Paskibraka	438.985.140,00	436.388.956,00	99,41
41	Pakaian Jas/Safari	17.990.280,00	17.980.000,00	99,94
42	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	0,00	1,00	0,00
Jumlah		206.260.889.128,00	194.419.228.838,00	94,26

b) Belanja Jasa

Realisasi belanja jasa tahun 2023 senilai Rp150.255.885.345,05 atau ekuivalen 88,67% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp169.447.108.482,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp10.766.697.599,05 atau naik 7,72% dari jumlah belanja jasa tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp139.489.187.746,00. Belanja jasa terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja jasa kantor	155.628.651.384,00	137.213.867.099,05	88,17
2	Belanja iuran jaminan/asuransi	729.315.468,00	728.435.468,00	99,88
3	Belanja sewa peralatan dan mesin	3.167.101.630,00	2.980.091.280,00	94,10
4	Belanja sewa gedung dan bangunan	6.840.370.000,00	6.481.013.498,00	94,75
5	Belanja beasiswa pendidikan PNS	404.000.000,00	404.000.000,00	100,00
6	Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	2.677.670.000,00	2.448.478.000,00	91,44
Jumlah		169.447.108.482,00	150.255.885.345,05	88,67

c) Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan tahun 2023 senilai Rp12.507.099.017,00 atau ekuivalen 95,55% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp13.089.538.608,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp2.442.992.295,00 atau turun 16,34% dari jumlah belanja pemeliharaan tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp14.950.091.312,00. Belanja Pemeliharaan terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	13.064.538.608,00	12.492.099.017,00	95,62
2	Belanja pemeliharaan jalan jaringan, dan irigasi	25.000.000,00	15.000.000,00	60,00
Jumlah		13.089.538.608,00	12.507.099.017,00	95,55

d) **Belanja Perjalanan Dinas**

Realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2023 senilai Rp106.487.111.424,00 atau ekuivalen 88,08% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp120.898.124.094,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp4.862.501.719,60 atau naik 4,78% dari jumlah belanja perjalanan dinas tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp101.624.609.704,40. Realisasi ini merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri/perjalanan dinas biasa.

e) **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat tahun 2023 senilai Rp8.575.055.262,00 atau ekuivalen 78,27% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp10.955.865.603,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp10.065.605.627,00 atau turun 54,00% dari jumlah belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp18.640.660.889,00. Realisasi ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	1.132.962.500,00	690.412.500,00	60,94
2	Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	9.822.903.103,00	7.884.642.762,00	80,27
Jumlah		10.955.865.603,00	8.575.055.262,00	78,27

Untuk poin 1 tabel di atas, realisasinya hanya sebesar 60,94% disebabkan karena pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ada kegiatan perlombaan yang tidak terlaksana, sehingga hadiahnya yang berupa uang tidak terealisasi.

f) **Belanja Barang dan Jasa BOS**

Realisasi belanja barang dan jasa BOS tahun 2023 senilai Rp10.492.306.778,00 atau ekuivalen 77,77% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp13.491.803.299,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp4.707.424.713,00 atau naik 81,37% dari jumlah belanja barang dan jasa BOS tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp5.784.882.065,00. Realisasi ini merupakan belanja barang dan jasa dari dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri (SD Negeri, SMP Negeri, SLTA Negeri dan Pendidikan Kesetaraan Negeri).

3) **Belanja Hibah**

Realisasi belanja hibah tahun 2023 adalah senilai Rp62.029.323.242,00 atau

ekuivalen 98,52% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp62.962.743.805,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp21.190.541.421,00 atau naik 51,89% dari jumlah belanja hibah tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp40.838.781.821,00. Realisasi ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	50.657.696.180,00	49.499.864.765,00	97,71
2	Belanja hibah dana BOS	11.898.360.000,00	12.122.770.852,00	101,89
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	406.687.625,00	406.687.625,00	100,00
Jumlah		62.962.743.805,00	62.029.323.242,00	98,52

a) **Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

Realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia tahun 2023 senilai Rp49.499.864.765,00 atau ekuivalen 97,71% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp50.657.696.180,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp18.015.594.766,00 atau naik 57,22% dari jumlah belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp31.484.269.999,00. Realisasi ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan	26.141.270.800,00	25.761.270.800,00	98,55
2	Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan	24.493.925.380,00	23.716.093.965,00	96,82
3	Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
Jumlah		50.657.696.180,00	49.499.864.765,00	97,71

b) **Belanja Hibah Dana BOS**

Realisasi belanja hibah dana BOS tahun 2023 senilai Rp12.122.770.852,00 atau ekuivalen 101,89% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp11.898.360.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp3.174.946.655,00 atau naik 35,48% dari jumlah belanja hibah dana BOS tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp8.947.824.197,00. Realisasi ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh	28.080.000,00	28.092.000,00	100,04

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	satdikdas negeri			
2	Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta	11.087.680.000,00	11.313.360.002,00	102,04
3	Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikmen swasta	782.600.000,00	781.318.850,00	99,84
Jumlah		11.898.360.000,00	12.122.770.852,00	101,89

Penjelasan tabel di atas sebagai berikut:

- 1) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas negeri senilai Rp28.092.000,00 merupakan realisasi dana BOP Paud pada TK Negeri Pembina.
- 2) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta senilai Rp11.313.360.002,00 merupakan belanja hibah dana BOS ke Satuan Pendidikan Menengah Swasta senilai Rp4.714.023.674,00, belanja hibah dana BOS ke Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta senilai Rp4.747.924.728,00 dan belanja hibah dana BOP Paud ke Satuan Pendidikan Swasta senilai Rp1.851.411.600,00
- 3) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikmen swasta senilai Rp781.318.850,00 merupakan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Swasta.

c) **Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

Realisasi belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2023 senilai Rp406.687.625,00 atau ekuivalen 100,00% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp406.687.625,00. Jumlah Realisasi ini masih sama dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai Politik	Nilai (Rp)
1	Partai Gerindra	32.097.475,00
2	Partai Perindo	34.343.025,00
3	Partai Nasdem	50.733.225,00
4	Partai Hanura	26.263.675,00
5	Partai Bulan Bintang	27.849.450,00
6	Partai Keadilan Sejahtera	33.717.975,00
7	Pdi Perjuangan	35.257.450,00
8	Partai Demokrat	20.290.975,00
9	Partai Kebangkitan Bangsa	44.112.325,00
10	Partai Golkar	79.242.450,00
11	Partai Pan	22.779.600,00
Jumlah		406.687.625,00

4) **Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2023 senilai Rp18.110.357.500,00 atau

ekuivalen 88,94% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp20.363.466.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp1.902.667.360,00 atau naik 11,74% dari jumlah belanja bantuan sosial tahun sebelumnya yang hanya Rp16.207.690.140,00. Belanja Bantuan Sosial menurut objek belanja terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja bantuan sosial kepada individu	12.960.546.000,00	12.495.047.000,00	96,41
2	Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)	7.402.920.000,00	5.615.310.500,00	75,85
Jumlah		20.363.466.000,00	18.110.357.500,00	88,94

Pada poin 1 tabel di atas jumlah realisasinya hanya 75,85% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terealisasi.

a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Realisasi belanja bantuan sosial kepada individu tahun 2023 senilai Rp12.495.047.000,00 atau ekuivalen 96,41% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp12.960.546.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp2.424.150.560,00 atau naik 24,07% dari jumlah belanja bantuan sosial kepada individu tahun sebelumnya senilai Rp10.070.896.440,00. Realisasi ini merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu yang dilaksanakan di beberapa SKPD berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	440.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.100.000.000,00
3	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	10.955.047.000,00
Jumlah		12.495.047.000,00

b) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Realisasi belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) tahun 2023 senilai Rp5.615.310.500,00 atau ekuivalen 75,85% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp7.402.920.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp521.483.200,00 atau turun 8,50% dari jumlah belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp6.136.793.700,00. Realisasi ini merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Fakfak berupa bantuan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan pemda dan bantuan iuran PBPU mandiri kelas 3 tahun 2023.

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 senilai Rp279.222.686.938,74 atau ekuivalen 92,51% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp301.837.979.123,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp66.768.320.831,74 atau naik 31,43% dari jumlah belanja modal tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp212.454.366.107,00 Menurut. Belanja modal tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja tanah	3.340.015.500,00	2.220.170.500,00	66,47
2	Belanja peralatan dan mesin	59.509.063.941,00	56.855.527.479,00	95,54
3	Belanja gedung dan bangunan	108.141.219.903,00	95.937.484.162,74	88,72
4	Belanja jalan, jaringan, dan irigasi	129.300.079.279,00	123.090.729.797,00	95,20
5	Belanja aset tetap lainnya	1.447.600.500,00	1.018.800.000,00	70,38
6	Belanja Aset Lainnya	100.000.000,00	99.975.000,00	99,98
Jumlah		301.837.979.123,00	279.222.686.938,74	92,51

1) Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah tahun 2023 senilai Rp2.220.170.500,00 atau ekuivalen 66,47% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp3.340.015.500,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp20.258.183.193,00 atau turun 90,12% dari jumlah belanja modal tanah tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp22.478.353.693,00. Penurunan ini dikarenakan antara tahun 2022 dan 2023 terdapat perbedaan yang cukup besar pada belanja tanah untuk lahan Bandara Siboru. Menurut Objek, Realisasi belanja modal tanah terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal tanah persil	2.758.243.000,00	1.638.408.000,00	59,40
2	Belanja modal tanah non persil	100.050.000,00	100.050.000,00	100,00
3	Belanja modal lapangan	481.722.500,00	481.712.500,00	100,00
Jumlah		3.340.015.500,00	2.220.170.500,00	66,47

a) Belanja Modal Tanah Persil

Realisasi belanja modal tanah persil tahun 2023 senilai Rp1.638.408.000,00 atau ekuivalen 59,40% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp2.758.243.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp7.147.394.720,00 atau turun 81,35% dari jumlah belanja modal tanah persil tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp8.785.802.720,00. Belanja modal tanah persil tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal tanah bangunan perumahan/ gedung tempat tinggal	1.850.000.000,00	825.000.000,00	44,59

2	Belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja	523.660.000,00	459.660.000,00	87,78
3	Belanja modal tanah persil lainnya	384.583.000,00	353.748.000,00	91,98
Jumlah		2.758.243.000,00	1.638.408.000,00	59,40

(1) Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
Realisasi belanja modal tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal tahun 2023 senilai Rp825.000.000,00 atau ekuivalen 44,59% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp1.850.000.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp2.279.820.220,00 atau turun 73,43% dari jumlah belanja modal tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp3.104.820.220,00. Realisasi tahun 2023 ini merupakan belanja modal tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berupa pembebasan lahan Asrama Mahasiswa Sorong asal Kabupaten Fakfak tahun 2023.

(2) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja

Realisasi belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja tahun 2023 senilai Rp459.660.000,00 atau ekuivalen 87,78% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp523.660.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp1.634.242.500,00 atau turun 78,05% dari jumlah belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp2.093.902.500,00. Belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja tahun 2023 dirincikan sebagai berikut:

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Permintaan ganti rugi tanah tahap akhir pada lokasi Kantor Distrik Furwagi di Distrik Furwagi TA. 2023 an. Umar Faisal Bauw	140.000.000,00
		Pembayaran belanja ganti rugi tanah tahap tiga pada lokasi Kantor Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak TA 2023 an. Salbiah Rengen	248.160.000,00
2	Distrik Bomberay	Permintaan pembayaran tagihan belanja modal tanah pada Kantor Distrik Bomberay Tahun Anggaran 2023	35.750.000,00
		Permintaan pembayaran tagihan belanja modal tanah pada Kantor Distrik Bomberay Tahun Anggaran 2023	35.750.000,00
Jumlah			459.660.000,00

(3) Belanja Modal Tanah Persil Lainnya

Realisasi belanja modal tanah persil lainnya tahun 2023 senilai Rp353.748.000,00 atau ekuivalen 91,98% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp384.583.000,00. Realisasi ini mengalami

penurunan senilai Rp3.233.332.000,00 atau turun 90,14% dari jumlah belanja modal tanah persil lainnya tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp3.587.080.000,00. Belanja modal tanah persil lainnya tahun 2023 dirincikan sebagai berikut:

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Pembayaran belanja ganti rugi tanah pada lokasi pembangunan PLTS Kampung Rumbati Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak an. Siti Halimah Bauw	10.920.000,00
		Pembayaran belanja ganti rugi tanaman pada lokasi pembangunan PLTS Kampung Rumbati Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak an. Siti Halimah Bauw	20.000.000,00
		Pembayaran belanja ganti rugi tanaman pemasangan kabel listrik Kampung Kayauni - Rakendak Distrik Kayauni	238.828.000,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja pembayaran ganti rugi tanah lokasi Pasar Sosar Distrik Kokas an. Syamsudin Baraweri	42.000.000,00
		Belanja pembayaran ganti rugi tanah lokasi Pasar Sosar Distrik Kokas an. Salim Barawery	42.000.000,00
Jumlah			353.748.000,00

b) Belanja Modal Tanah Non Persil

Belanja Modal Tanah Non Persil tahun 2023 senilai Rp100.050.000,00 atau ekuivalen 100% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp100.050.000,00. Pada tahun 2022 tidak ada realisasi pada belanja modal tanah non persil. Belanja Modal Tanah Non Persil tahun 2023 merupakan belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja ganti rugi tanah tahap pertama pada lokasi pembangunan TPA di Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak TA 2023 an. Moses Piahar	50.025.000,00
2	Belanja ganti rugi tanah tahap pertama pada lokasi pembangunan TPA di Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak TA 2023 an. Albertus Patiran	50.025.000,00
Jumlah		100.050.000,00

c) Belanja Modal Lapangan

Belanja modal lapangan tahun 2023 senilai Rp481.712.500,00 atau ekuivalen 100,00% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp481.722.500,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp13.210.838.473,00 atau turun 96,48% dari jumlah belanja modal lapangan tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp13.692.550.973,00. Realisasi ini merupakan belanja modal lapangan tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Permintaan pembayaran belanja ganti rugi tanah jalan masuk Bandara Siboru = 300 m x 30 m an. Andarias Hombore	333.000.000,00
2	Belanja PNPB pemeriksaan Bandara Udara Siboru untuk penerbitan buku sertifikat an. Prasetyo Wibowo	83.050.000,00
3	Belanja PNPB pendaftaran Bandara Udara Siboru untuk penerbitan buku sertifikat an. Prasetyo Wibowo	50.000,00
4	Belanja PNPB pengukuran untuk penerbitan sertifikat tanah lokasi Bandara Siboru an. Prasetyo Wibowo	65.662.500,00
Jumlah		481.762.500,00

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 senilai Rp56.855.527.479,00 atau ekuivalen 95,54% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp59.509.063.941,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp7.850.946.348,00 atau naik 16,02% dari jumlah belanja modal peralatan dan mesin tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp49.004.581.131,00. Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Besar	1.610.082.295,00	942.302.024,00	58,53
2	Belanja Modal Alat Angkutan	15.164.237.406,00	12.740.080.178,00	84,01
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	231.822.643,00	56.584.343,00	24,41
4	Belanja Modal Alat Pertanian	2.539.015.536,00	2.503.700.000,00	98,61
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.623.316.173,00	8.088.539.963,00	93,80
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	7.329.542.582,00	7.316.821.692,00	99,83
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.517.466.170,00	8.237.242.614,00	96,71
8	Belanja Modal Komputer	11.359.278.857,00	12.950.562.245,00	114,01
9	Belanja Modal Alat Pengeboran	19.250.000,00	19.200.000,00	99,74
10	Belanja Modal Rambu-Rambu	4.115.052.279,00	4.000.494.420,00	97,22
Jumlah		59.509.063.941,00	56.855.527.479,00	95,54

a) Belanja Modal Alat Besar

Realisasi belanja modal alat besar tahun 2023 senilai Rp942.302.024,00 atau ekuivalen 58,53% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.610.082.295,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp168.212.725,00 atau naik 21,73% dari jumlah belanja modal alat besar tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp774.089.299,00. Belanja modal alat besar tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal excavator	895.400.000,00	890.500.000,00	99,45
2	Belanja modal <i>electric generating set</i>	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00
3	Belanja modal pompa	694.147.295,00	34.597.024,00	4,98
4	Belanja modal alat bantu lainnya	14.985.000,00	11.655.000,00	77,78

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Jumlah		1.610.082.295,00	942.302.024,00	58,53

b) Belanja Modal Alat Angkutan

Realisasi belanja modal alat angkutan tahun 2023 senilai Rp12.740.080.178,00 atau ekuivalen 84,01% dari target yang ditetapkan senilai Rp15.164.237.406,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.074.202.636,00 atau turun 7,78% dari jumlah belanja modal alat angkutan tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp13.814.282.814,00. Realisasi belanja modal alat angkutan tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan	6.440.955.003,00	5.786.593.600,00	89,84
2	Belanja modal kendaraan bermotor penumpang	1.260.000.000,00	0,00	0,00
3	Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang	718.252.000,00	709.900.000,00	98,84
4	Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua	4.699.483.380,00	4.269.700.000,00	90,85
5	Belanja modal alat angkutan apung bermotor untuk penumpang	52.000.000,00	0,00	0,00
6	Belanja modal alat angkutan apung bermotor lainnya	1.993.547.023,00	1.973.886.578,00	99,01
Jumlah		15.164.237.406,00	12.740.080.178,00	84,01

c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Realisasi belanja modal alat bengkel dan alat ukur tahun 2023 senilai Rp56.584.343,00 atau ekuivalen 24,41% dari target yang ditetapkan senilai Rp231.822.643,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp21.391.641,00 atau turun 27,43% dari jumlah belanja modal alat bengkel dan alat ukur tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp77.975.984,00. Realisasi belanja modal alat bengkel dan alat ukur tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal perkakas bengkel kayu	34.622.643,00	34.384.343,00	99,31
2	Belanja modal peralatan tukang kayu	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00
3	Belanja modal alat kalibrasi	175.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		231.822.643,00	56.584.343,00	24,41

d) Belanja Modal Alat Pertanian

Realisasi belanja modal alat pertanian tahun 2023 senilai Rp2.503.700.000,00 atau ekuivalen 98,61% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.539.015.536,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp2.054.931.580,00 atau naik 457,90% dari jumlah belanja tahun

sebelumnya yang hanya senilai Rp448.768.420,00. Realisasi belanja modal alat pertanian tahun 2023 merupakan belanja modal alat pengolahan yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal alat pasca panen	227.594.640,00	199.700.000,00	87,74
2	Belanja modal alat produksi perikanan	2.957.040,00	0,00	0,00
3	Belanja modal alat-alat peternakan	4.463.856,00	0,00	0,00
4	Belanja modal alat pengolahan lainnya	2.304.000.000,00	2.304.000.000,00	100,00
Jumlah		2.539.015.536,00	2.503.700.000,00	98,61

e) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Realisasi belanja modal alat kantor dan rumah tangga tahun 2023 senilai Rp8.088.539.963,00 atau ekuivalen 93,80% dari target yang ditetapkan senilai Rp8.623.316.173,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp861.822.057,00 atau turun9,63% dari jumlah belanja modal alat kantor dan rumah tangga tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp8.950.362.020,00. Realisasi belanja modal alat kantor dan rumah tangga tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal alat reproduksi (penggandaan)	157.850.664,00	35.750.664,00	22,65
2	Belanja modal alat kantor lainnya	715.478.641,00	681.051.858,00	95,19
3	Belanja modal mebel	2.757.856.639,00	2.608.997.940,00	94,60
4	Belanja modal alat pengukur waktu	50.050.000,00	50.000.000,00	99,90
5	Belanja modal alat pembersih	532.020.892,00	521.056.574,00	97,94
6	Belanja Modal Alat Pendingin	1.068.415.223,00	1.034.095.855,00	96,79
7	Belanja modal alat dapur	456.841.655,00	451.376.735,00	98,80
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.682.321.445,00	2.505.130.148,00	93,39
9	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	202.481.014,00	201.080.189,00	99,31
Jumlah		8.623.316.173,00	8.088.539.963,00	93,80

f) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Realisasi belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar tahun 2023 senilai Rp7.316.821.692,00 atau ekuivalen 99,83% dari target yang ditetapkan senilai Rp7.329.542.582,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp2.727.464.807,00 atau naik 59,43% dari jumlah belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp4.589.356.885,00. Realisasi belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal peralatan studio audio	122.045.333,00	121.968.000,00	99,94
2	Belanja modal peralatan studio video dan film	7.151.361.035,00	7.138.751.877,00	99,82
3	Belanja modal peralatan studio gambar	17.019.214,00	17.018.252,00	99,99
4	Belanja modal alat komunikasi telephone	12.545.000,00	12.511.563,00	99,73
5	Belanja modal alat komunikasi radio UHF	15.372.000,00	15.372.000,00	100,00
6	Belanja modal peralatan antena UHF	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00
Jumlah		7.329.542.582,00	7.316.821.692,00	99,83

g) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Realisasi belanja modal alat kedokteran dan kesehatan tahun 2023 senilai Rp8.237.242.614,00 atau ekuivalen 96,71% dari target yang ditetapkan senilai Rp8.517.466.170,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp1.905.436.844,00 atau naik 30,09% dari jumlah belanja modal alat kedokteran dan kesehatan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp6.331.805.770,00. Realisasi belanja modal alat kedokteran dan kesehatan tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal alat kedokteran umum	7.976.700.985,00	7.697.397.614,00	96,50
2	Belanja modal alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan	540.765.185,00	539.845.000,00	99,83
Jumlah		8.517.466.170,00	8.237.242.614,00	96,71

h) Belanja Modal Komputer

Realisasi belanja modal komputer tahun 2023 senilai Rp12.950.562.245,00 atau ekuivalen 114,01% dari target yang ditetapkan senilai Rp11.359.278.857,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp1.835.162.795,00 atau naik 16,51% dari jumlah belanja modal komputer tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp11.115.399.450,00. Realisasi belanja modal komputer tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal <i>personal computer</i>	5.614.068.287,00	5.160.631.050,00	91,92
2	Belanja modal peralatan <i>personal computer</i>	1.901.748.086,00	1.882.030.598,00	98,96
3	Belanja modal peralatan jaringan	1.911.003.495,00	1.910.789.440,00	99,99
4	Belanja modal peralatan komputer lainnya	1.932.458.989,00	3.997.111.157,00	206,84
Jumlah		11.359.278.857,00	12.950.562.245,00	114,01

i) **Belanja Modal Alat Pengeboran**

Realisasi belanja modal alat pengeboran tahun 2023 senilai Rp19.200.000,00 atau ekuivalen 99,74% dari target yang ditetapkan senilai Rp19.250.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp4.389.411,00 atau naik 29,64% dari jumlah belanja modal alat pengeboran tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp14.810.589,00. Realisasi belanja modal alat pengeboran tahun 2023 merupakan belanja modal alat pengeboran mesin berupa belanja modal alat pengeboran mesin lainnya.

j) **Belanja Modal Rambu-Rambu**

Realisasi belanja modal rambu-rambu tahun 2023 senilai Rp4.000.494.420,00 atau ekuivalen 97,22% dari target yang ditetapkan senilai Rp4.115.052.279,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp2.576.021.020,00 atau naik 180,84% dari jumlah belanja modal rambu-rambu tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp1.424.473.400,00. Realisasi belanja modal rambu-rambu tahun 2023 merupakan belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat berupa belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.

3) **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023 senilai Rp95.937.484.162,74 atau ekuivalen 88,72% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp108.141.219.903,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp45.753.287.072,74 atau naik 91,17% dari jumlah belanja modal gedung dan bangunan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp50.184.197.090,00. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023 dirincikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal bangunan gedung	104.188.338.703,00	92.468.334.452,74	88,75
2	Belanja modal tugu titik kontrol/pasti	3.952.881.200,00	3.469.149.710,00	87,76
Jumlah		108.141.219.903,00	95.937.484.162,74	88,72

a) **Belanja Modal Bangunan Gedung**

Realisasi belanja modal bangunan gedung tahun 2023 senilai Rp92.468.334.452,74 atau ekuivalen 88,75% dari target yang ditetapkan senilai Rp104.188.338.703,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp49.469.658.099,74 atau naik 115,05% dari jumlah belanja modal bangunan gedung tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp42.998.676.353,00. Realisasi belanja modal bangunan gedung tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal bangunan gedung tempat kerja	103.345.931.695,00	91.627.861.322,74	88,66
2	Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal	842.407.008,00	840.473.130,00	99,77
Jumlah		104.188.338.703,00	92.468.334.452,74	88,75

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

Realisasi belanja modal bangunan gedung tempat kerja tahun 2023 senilai Rp91.627.861.322,74 atau ekuivalen 88,66% dari target yang ditetapkan senilai Rp103.345.931.695,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp60.677.656.196,74 atau naik 196,05% dari jumlah belanja modal bangunan gedung tempat kerja tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp30.950.205.126,00. Realisasi belanja modal bangunan gedung tempat kerja tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal bangunan gedung kantor	35.656.035.416,00	29.778.984.593,00	83,52
2	Belanja modal bangunan kesehatan	47.443.285.403,00	42.174.531.313,74	88,89
3	Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah	1.858.795.514,00	1.795.690.000,00	96,61
4	Belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan	1.297.222.161,00	1.263.290.000,00	97,38
5	Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan	7.650.001.914,00	7.342.657.585,00	95,98
6	Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga	2.357.993.852,00	2.336.710.500,00	99,10
7	Belanja modal bangunan gedung pertokoan / koperasi / pasar	2.827.416.679,00	2.826.201.085,00	99,96
8	Belanja modal bangunan gedung terminal / pelabuhan / bandara	3.311.580.756,00	3.233.548.000,00	97,64
9	Belanja modal taman	943.600.000,00	876.248.246,00	92,86
Jumlah		103.345.931.695,00	91.627.861.322,74	88,66

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Realisasi belanja modal bangunan gedung tempat tinggal tahun 2023 senilai Rp840.473.130,00 atau ekuivalen 99,77% dari target yang ditetapkan senilai Rp842.407.008,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp11.207.998.097,00 atau turun 93,02% dari jumlah belanja modal bangunan gedung tempat tinggal tahun sebelumnya

yang tercatat senilai Rp12.048.471.227,00. Realisasi belanja modal bangunan gedung tempat tinggal tahun 2023 merupakan belanja modal Rumah Negara Golongan II.

b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Realisasi belanja modal tugu titik kontrol/pasti tahun 2023 senilai Rp3.469.149.710,00 atau ekuivalen 87,76% dari target yang ditetapkan senilai Rp3.952.881.200,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp893.170.293,00 atau turun 20,47% dari jumlah belanja modal tugu titik kontrol/pasti tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp4.362.320.003,00. Realisasi belanja modal tugu titik kontrol/pasti tahun 2023 merupakan belanja modal tugu/tanda batas berupa belanja modal pagar.

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi tahun 2023 senilai Rp123.090.729.797,00 atau ekuivalen 95,20% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp129.300.079.279,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp34.427.301.521,00 atau naik 38,83% dari jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp88.663.428.276,00. Realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi tahun 2023 dirincikan sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal jalan dan jembatan	98.393.902.728,00	96.175.699.680,00	97,75
2	Belanja modal bangunan air	18.505.236.397,00	16.228.827.404,00	87,70
3	Belanja modal jaringan	12.400.940.154,00	10.686.202.713,00	86,17
Jumlah		129.300.079.279,00	123.090.729.797,00	95,20

a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Realisasi belanja modal jalan dan jembatan tahun 2023 senilai Rp96.175.699.680,00 atau ekuivalen 97,75% dari target yang ditetapkan senilai Rp98.393.902.728,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp27.973.125.246,00 atau naik 41,01% dari jumlah belanja modal jalan dan jembatan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp68.202.574.434,00. Realisasi belanja modal jalan dan jembatan tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal jalan	83.382.616.998,00	81.465.442.280,00	97,70
2	Belanja modal jembatan	15.011.285.730,00	14.710.257.400,00	97,99
Jumlah		98.393.902.728,00	96.175.699.680,00	97,75

(1) Belanja Modal Jalan

Realisasi belanja modal jalan tahun 2023 senilai Rp81.465.442.280,00 atau ekuivalen 97,70% dari target yang ditetapkan senilai

Rp83.382.616.998,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp15.615.234.846,00 atau naik 23,71% dari jumlah belanja modal jalan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp65.850.207.434,00. Realisasi belanja modal jalan tahun 2023 dirincikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal jalan nasional	16.750.537,00	16.750.000,00	100,00
2	Belanja modal jalan kabupaten	64.278.442.369,00	63.209.852.672,00	98,34
3	Belanja modal jalan desa	16.789.918.616,00	15.994.667.838,00	95,26
4	Belanja modal jalan khusus	486.850.000,00	486.134.000,00	99,85
5	Belanja modal jalan lainnya	1.810.655.476,00	1.758.037.770,00	97,09
Jumlah		83.382.616.998,00	81.465.442.280,00	97,70

(2) Belanja Modal Jembatan

Realisasi belanja modal jembatan tahun 2023 senilai Rp14.710.257.400,00 atau ekuivalen 97,99% dari target yang ditetapkan senilai Rp15.011.285.730,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp12.357.890.400,00 atau naik 525,34% dari jumlah belanja tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp2.352.367.000,00. Realisasi belanja modal jembatan tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal jembatan pada jalan kabupaten	6.014.309.500,00	5.870.130.000,00	97,60
2	Belanja modal jembatan pada jalan desa	8.996.976.230,00	8.840.127.400,00	98,26
Jumlah		15.011.285.730,00	14.710.257.400,00	97,99

b) Belanja Modal Bangunan Air

Realisasi belanja modal bangunan air tahun 2023 senilai Rp16.228.827.404,00 atau ekuivalen 87,90% dari target yang ditetapkan senilai Rp18.505.236.397,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp2.745.440.495,00 atau naik 20,36% dari jumlah belanja modal bangunan air tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp13.483.386.909,00. Realisasi belanja modal bangunan air tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal bangunan air irigasi	1.525.419.410,00	665.112.346,00	43,60
2	Belanja modal bangunan pengairan pasang surut	6.783.649.936,00	6.529.663.266,00	96,26
3	Belanja modal bangunan pengaman sungai / pantai dan penanggulangan bencana alam	8.340.554.006,00	7.635.999.704,00	91,55
4	Belanja modal bangunan air bersih/air baku	1.855.613.045,00	1.398.052.088,00	75,34
Jumlah		18.505.236.397,00	16.228.827.404,00	87,70

(1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi

Realisasi belanja modal bangunan air irigasi tahun 2023 senilai Rp665.112.346,00 atau ekuivalen 43,60% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.525.419.410,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp9.866.632.813,00 atau turun sebesar 93,68% dari jumlah belanja modal bangunan air irigasi tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp10.531.745.159,00. Rincian realisasi belanja modal bangunan air irigasi tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal bangunan pembawa irigasi	594.102.513,00	577.762.475,00	97,25
2	Belanja modal bangunan pengaman irigasi	931.316.897,00	87.349.871,00	9,38
Jumlah		1.525.419.410,00	665.112.346,00	43,60

(2) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut

Realisasi belanja modal bangunan pengairan pasang surut tahun 2023 senilai Rp6.529.663.266,00 atau ekuivalen 96,26% dari target yang ditetapkan senilai Rp6.783.649.936,00. Pada tahun 2022 belanja modal bangunan pengairan pasang surut tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi pada belanja tersebut. Realisasi belanja modal bangunan pengairan pasang surut tahun 2023 merupakan belanja modal saluran pembuang pasang surut.

(3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Realisasi belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam tahun 2023 senilai Rp7.635.999.704,00 atau ekuivalen 91,55% dari target yang ditetapkan senilai Rp8.340.554.006,00. Pada tahun 2022 belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi pada belanja tersebut. Realisasi belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal bangunan pembuang pengaman sungai	3.919.041.657,00	3.796.758.930,00	96,88
2	Belanja modal bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai	2.589.715.117,00	2.332.738.054,00	90,08
3	Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya	1.831.797.232,00	1.506.502.720,00	82,24
Jumlah		8.340.554.006,00	7.635.999.704,00	91,55

(4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku

Realisasi belanja modal bangunan air bersih/air baku tahun 2023 senilai Rp1.398.052.088,00 atau ekuivalen 75,34% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.855.613.045,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp1.378.055.438,00 atau naik 6.891,43% dari jumlah belanja modal bangunan air bersih/air baku tahun sebelumnya yang hanya sebesarRp 19.996.650,00. Realisasi belanja modal bangunan air bersih/air baku tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal bangunan waduk air bersih/air baku	1.464.813.136,00	1.048.096.188,00	71,55
2	Belanja modal bangunan pengambilan air bersih/air baku	390.799.909,00	349.955.900,00	89,55
Jumlah		1.855.613.045,00	1.398.052.088,00	75,34

c) Belanja Modal Jaringan

Realisasi belanja modal jaringan tahun 2023 senilai Rp10.686.202.713,00 atau ekuivalen 86,17% dari target yang ditetapkan senilai Rp12.400.940.154,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp4.215.035.780,00 atau naik 65,14% dari jumlah belanja tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp6.471.166.933,00. Realisasi belanja modal jaringan tahun 2023 merupakan belanja modal jaringan air minum dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal jaringan pembawa	2.263.397.835,00	1.839.010.100,00	81,25
2	Belanja modal jaringan induk distribusi	8.545.117.653,00	7.309.541.613,00	85,54
3	Belanja modal jaringan sambungan ke rumah	8.700.412,00	3.950.000,00	45,40
4	Belanja modal jaringan air minum lainnya	1.583.724.254,00	1.533.701.000,00	96,84
Jumlah		12.400.940.154,00	10.686.202.713,00	86,17

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2023 senilai Rp1.018.800.000,00 atau ekuivalen 70,38% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp1.447.600.500,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.105.005.917,00 atau turun 52,03% dari jumlah belanja modal aset tetap lainnya tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp2.123.805.917,00. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja modal bahan perpustakaan	417.600.500,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.030.000.000,00	1.018.800.000,00	98,91

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Jumlah	1.447.600.500,00	1.018.800.000,00	70,38

a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Realisasi belanja modal bahan perpustakaan tahun 2023 senilai Rp0,00 atau ekuivalen 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar 417.600.500,00 yang direncanakan untuk belanja bahan perpustakaan tercetak; sedangkan pada tahun 2022 Realisasi belanja modal bahan perpustakaan senilai Rp722.715.316,00.

b) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Realisasi belanja modal aset tidak berwujud tahun 2023 senilai Rp1.018.800.000,00 atau ekuivalen 98,91% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.030.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp332.230.601,00 atau turun 24,59% dari jumlah belanja modal aset tidak berwujud tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp1.351.030.601,00. Realisasi belanja modal aset tidak berwujud tahun 2023 merupakan belanja *software*.

6) Belanja Aset Lainnya

Realisasi belanja aset lainnya tahun 2023 senilai Rp99.975.000,00 atau ekuivalen 99,98% dari target yang ditetapkan senilai Rp100.000.000,00. Pada tahun 2022 belanja aset lainnya tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi pada belanja tersebut. Belanja aset lainnya tahun 2023 merupakan belanja *software*.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Total realisasi belanja tidak terduga sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp14.070.365.920,00 atau ekuivalen 99,74% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp14.107.285.887,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp2.361.334.350,00 atau naik 20,17% dari jumlah belanja tidak terduga tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp11.709.031.570,00. Realisasi belanja tidak terduga tahun 2023 merupakan belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak yang seluruhnya direalisasikan untuk bantuan sosial yang belum direncanakan.

5.1.3. Belanja Transfer

Realisasi belanja transfer sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp183.961.862.752,00 atau ekuivalen 101,56% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp181.144.519.293,00. Realisasi transfer tahun 2023 merupakan transfer bantuan

keuangan ke desa melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Alokasi Dana Kampung	117.909.373.000,00	121.319.045.000,00	102,89
2	Dana Perimbangan 10% Setelah dikurangi DAK untuk ADK	62.073.817.900,00	62.066.213.644	99,99
3	Pajak 10% Untuk ADK	817.598.637,00	443.124.549	54,20
4	Retribusi 10% Untuk ADK	343.729.756,00	133.479.559	38,83
Jumlah		181.144.519.293,00	183.961.862.752,00	101,56

2. Belanja Menurut Klasifikasi Organisasi

Belanja berdasarkan klasifikasi organisasi untuk periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Unit Organisasi/SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)				%
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	318.350.945.088,00	283.474.120.841,00	22.069.875.705,00	0	0	95,98
2	Dinas Kesehatan	161.822.646.949,00	88.230.522.662,00	55.386.505.964,74	0	0	88,75
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	82.759.907.196,00	71.885.014.819,00	5.663.217.775,00	0	0	93,70
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	232.379.414.385,00	62.074.853.102,00	158.484.298.521,00	0	0	94,91
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.472.802.979,00	10.853.557.563,00	240.910.770,00	0	0	96,70
6	Dinas Sosial	16.764.266.215,00	14.417.675.308,00	67.237.900,00	0	0	86,40
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.409.916.698,00	6.497.619.024,00	343.087.550,00	0	0	92,32
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.648.526.005,00	16.722.389.091,00	2.211.937.890,00	0	0	96,37
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	11.805.119.873,00	8.337.441.829,00	2.122.016.430,00	0	0	88,60
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.124.330.818,00	7.249.461.442,00	217.973.328,00	0	0	91,91
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	10.040.058.056,00	8.600.828.595,00	550.160.653,00	0	0	91,14
12	Dinas Perhubungan	14.098.941.569,00	10.527.362.419,00	2.841.171.130,00	0	0	94,82
13	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	14.145.116.451,00	7.664.340.111,00	6.137.311.766,00	0	0	97,57
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.896.176.926,00	7.937.947.693,00	452.258.127,00	0	0	94,31
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.286.741.485,00	6.662.804.318,00	99.695.400,00	0	0	92,81
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.388.120.179,00	5.583.155.094,00	294.054.584,00	0	0	92,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.686.149.544,00	20.013.239.063,05	233.242.627,00	0	0	93,36
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	20.063.029.724,00	18.246.107.375,00	777.250.761,00	0	0	94,82
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	33.897.458.224,00	30.490.544.029,00	885.824.340,00	0	0	92,56
20	Dinas Perkebunan	12.033.643.963,00	9.804.185.957,00	1.719.246.000,00	0	0	95,76
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	14.236.245.941,00	9.999.262.421,00	3.477.640.055,00	0	0	94,67
22	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8.160.242.699,00	7.664.508.808,00	96.460.770,00	0	0	95,11
23	Sekretariat Daerah	102.324.525.651,00	93.082.740.010,00	3.599.006.195,00	0	0	94,49
24	Sekretariat DPRD	48.862.736.279,00	41.282.421.085,00	648.497.400,00	0	0	85,81

No	Unit Organisasi/SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)				%
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	19.416.757.700,00	15.607.553.859,00	1.426.265.821,00	0	0	87,73
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	222.304.361.520,00	24.665.102.476,00	1.369.759.753,00	14.070.365.920,00	183.961.862.752,00	100,79
27	Badan Pendapatan Daerah	10.732.895.558,00	9.654.267.004,00	837.691.000,00	0	0	97,76
28	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.570.136.831,00	19.601.818.139,00	1.762.899.698,00	0	0	90,64
29	Inspektorat	13.740.415.675,00	11.864.576.238,00	56.400.000,00	0	0	86,76
30	Distrik Arguni	2.663.360.658,00	2.218.457.639,00	203.564.343,00	0	0	90,94
31	Distrik Pariwari	11.201.922.288,00	9.446.400.625,00	1.140.313.880,00	0	0	94,51
32	Distrik Fakfak	8.050.751.699,00	6.270.965.195,00	1.073.022.247,00	0	0	91,22
33	Distrik Wartutin	2.899.199.550,00	2.536.007.187,00	160.067.404,00	0	0	92,99
34	Distrik Mbahamdandara	2.706.662.501,00	2.377.296.033,00	124.499.441,00	0	0	92,43
35	Distrik Karas	4.155.770.925,00	3.897.263.014,00	61.579.930,00	0	0	95,26
36	Distrik Fakfak Barat	4.217.009.164,00	3.942.895.444,00	133.964.820,00	0	0	96,68
37	Distrik Kokas	5.566.793.894,00	4.887.319.721,00	519.520.000,00	0	0	97,13
38	Distrik Tomage	2.866.181.519,00	2.572.629.943,00	101.280.844,00	0	0	93,29
39	Distrik Fakfak Timur Tengah	3.207.483.197,00	2.986.601.838,00	107.400.000,00	0	0	96,46
40	Distrik Furwagi	2.980.346.008,00	2.697.172.541,00	132.177.983,00	0	0	94,93
41	Distrik Bomberay	3.057.254.395,00	2.794.988.009,00	106.297.113,00	0	0	94,90
42	Distrik Fakfak Timur	3.123.604.084,00	2.717.052.027,00	249.989.713,00	0	0	94,99
43	Distrik Kramongmongga	3.811.022.052,00	3.283.184.884,00	98.995.305,00	0	0	88,75
44	Distrik Kayauni	3.415.148.953,00	3.181.716.199,00	105.489.895,00	0	0	96,25
45	Distrik Fakfak Tengah	8.197.194.777,00	7.666.157.974,00	385.872.334,00	0	0	98,23
46	Distrik Teluk Patipi	4.355.104.378,00	3.998.683.024,00	158.225.090,00	0	0	95,45
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33.997.665.691,00	32.596.715.238,00	288.528.683,00	0	0	96,73
Jumlah		1.592.894.105.914,00	1.028.766.926.910,05	279.222.686.938,74	14.070.365.920,00	183.961.862.752,00	94,55

5.1.4. Surplus/(Defisit)

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Fakfak mengalami defisit senilai Rp75.802.292.139,20. Angka defisit ini mengalami kenaikan senilai Rp54.653.086.402,16 atau naik sebesar 258,42% dari angka defisit tahun sebelumnya yang hanya Rp21.149.205.737,04. Defisit Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 dirincikan sebagai berikut:

A	Realisasi Pendapatan	1.430.219.550.381,59	
B	Realisasi Belanja	1.506.021.842.520,79	
C	Surplus / (Defisit)	(75.802.292.139,20)	C = A - B

5.1.5 Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	118.605.565.491,00	118.740.799.114,93	100,11
6.1.1	SiLPA Tahun Sebelumnya	118.605.565.491,00	118.740.799.114,93	100,11
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6.2.2	Penyertaan modal pada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETO		117.605.565.491,00	117.740.799.114,93	100,11

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 senilai Rp118.740.799.114,93 atau ekuivalen 100,11% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp118.605.565.491,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp22.013.972.114,04 atau turun 15,64% dari jumlah realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp140.754.771.228,97. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Sumber Dana	SiLPA dari Tahun 2022 (Rp)
1	Dana OTSUS 1%	5.574.671.698,00
2	Dana OTSUS 1,25%	11.033.945.295,00
3	Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)	4.655.249.358,00
4	DBH Dalam Rangka Otsus	30.072.742.320,00
5	DAK Fisik	883.182.811,00
6	DAK Non Fisik	993.205.434,00
7	Dana Transfer Umum (DTU)	65.392.568.575,93
8	Dana Desa	135.233.623,00
Jumlah		118.740.799.114,93

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp1.000.000.000,00 atau ekuivalen 100% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp1.000.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal pada Bank Papua.

3. Pembiayaan Netto

Jika dibandingkan antara Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 senilai Rp118.740.799.114,93 dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2023 senilai Rp1.000.000.000,00, maka terdapat saldo Pembiayaan Netto tahun 2023 senilai Rp117.740.799.114,93.

5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berkenaan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 senilai Rp41.938.506.975,73. Jumlah tersebut merupakan selisih antara realisasi pendapatan dengan belanja, dengan memperhitungkan pembiayaan netto selama satu tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

A	Realisasi Pendapatan	1.430.219.550.381,59	
B	Realisasi Belanja	1.506.021.842.520,79	
C	SURPLUS / (DEFISIT)	(75.802.292.139,20)	C = A - B
D	Penerimaan Pembiayaan	118.740.799.114,93	
E	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	

F	Pembiayaan Neto	117.740.799.114,93	F = D - E
G	SILPA	41.938.506.975,73	G = C + F

Di antara SiLPA tersebut, terdapat SiLPA dari:

1. SiLPA Dana Otsus 1% (bersifat umum) senilai Rp5.539.084.306,00
2. SiLPA Dana Otsus 1,25% (ditentukan) senilai Rp4.357.978.589,00
3. SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) senilai Rp1.477.967.275,00

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	118.605.565.491,93	140.749.638.834,97
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	118.740.799.114,93	140.754.771.228,97
3	Sub Total	(135.233.623,00)	(5.132.394,00)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	41.938.506.975,73	118.605.565.491,93
5	Sub Total	41.803.273.352,73	118.600.433.097,93
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	135.233.623,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	5.132.394,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	41.938.506.975,73	118.605.565.491,93

Penjelasan:

1. Saldo anggaran lebih awal tahun 2023 senilai Rp118.605.565.491,93.
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan senilai Rp118.740.799.114,93 merupakan penggunaan SILPA tahun anggaran 2022 yang digunakan seluruhnya untuk membiayai anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Fakfak di tahun anggaran 2023.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2023 senilai Rp41.938.506.975,73 yang berasal dari Surplus/Defisit ditambah Pembiayaan Neto tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi (Rp)	Ket
1	Surplus/Defisit	(75.802.292.139,20)	
2	Pembiayaan Neto	117.740.799.114,93	
3	SILPA	41.938.506.975,73	3 = 1 + 2

5.3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Fakfak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 secara umum sebagai berikut.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset	Rp2.637.633.990.307,55	Rp2.625.163.429.597,81
Kewajiban	Rp191.282.066,00	Rp5.407.076.200,00
Ekuitas	Rp2.637.442.708.241,55	Rp2.619.756.353.397,81

5.3.1. Aset	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp2.637.633.990.307,55	Rp2.625.163.429.597,81

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset di Neraca terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

Aset Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp2.637.633.990.307,55 mengalami kenaikan senilai Rp12.470.560.709,75 atau naik sebesar 0,48% dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2022 yang hanya senilai Rp2.625.163.429.597,81.

Rincian aset Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah /(Berkurang) (Rp)
1	Aset Lancar	87.799.370.535,70	179.884.464.675,64	(92.085.094.139,94)
2	Investasi Jangka Panjang	73.893.880.918,35	87.237.124.517,68	(13.343.243.599,33)
3	Aset Tetap	2.372.512.567.153,18	2.306.594.675.789,50	65.917.891.363,68
4	Aset Lainnya	103.428.171.700,32	51.447.164.614,99	51.981.007.085,33
Jumlah		2.637.633.990.307,55	2.625.163.429.597,80	12.470.560.709,75

1. Aset Lancar	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp87.799.370.535,70	Rp179.884.464.675,64

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai

Rp87.799.370.535,70, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah /(Berkurang) (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	36.566.435.583,61	115.269.620.644,45	(78.703.185.060,84)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	171.012.981,12	1.326.677.721,48	(1.155.664.740,36)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.312.929.470,00	820.944.598,00	2.491.984.872,00
4	Kas di Bendahara BOS	182.452.570,00	261.156.290,00	(78.703.720,00)
5	Kas di Bendahara FKTP	1.643.879.160,00	934.461.961,00	709.417.199,00
6	Kas Lainnya	585.321.310,71	1.927.695.775,71	(1.342.374.465,00)
7	Piutang Pajak Daerah	10.909.115.418,10	9.959.148.131,24	949.967.286,86
8	Piutang Retribusi Daerah	593.802.000,00	593.802.000,00	0,00
9	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	2.035.739,40	(2.035.739,40)
10	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	6.273.247.751,00	3.697.825.637,00	2.575.422.114,00
11	Penyisihan Piutang	(9.754.230.578,01)	(9.285.739.373,30)	(468.491.204,71)
12	Piutang Lainnya	878.241.378,75	1.125.039.737,86	(246.798.359,11)
13	Persediaan	36.437.163.490,42	53.251.795.812,80	(16.814.632.322,38)
Jumlah		87.799.370.535,70	179.884.464.675,64	(92.085.094.139,94)

a. Kas di Kas Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp36.566.435.583,61	Rp115.269.620.644,45

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kas di Kas Daerah senilai Rp36.566.435.583,61 merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang tersimpan di beberapa rekening Kas Daerah pada Bank Papua yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak, sebagai berikut:

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)		
			Rekening Koran	Pencatatan di FMIS	Selisih
1	RKUD KABUPATEN FAK FAK	6000106000078	122.767.275,01	125.369.680,01	(2.602.405,00)
2	KASDA DANA OTSUS 1% KABUPATEN FAKFAK	6000106000136	13.744.722.776,00	13.744.722.776,00	0,00
3	KASDA DANA OTSUS 1,25% KABUPATEN FAKFAK	6000106000140	8.787.046.319,60	8.787.046.319,60	0,00
4	KASDA DTI KABUPATEN FAKFAK	6000106000151	4.693.443.951,00	4.693.443.951,00	0,00
5	KASDA TAMBAHAN DBH DALAM RANGKA OTSUS KABUPATEN FAKFAK	6000106000162	9.215.852.857,00	9.215.852.857,00	0,00

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)		
			Rekening Koran	Pencatatan di FMIS	Selisih
Jumlah			36.563.833.178,61	36.566.435.583,61	(2.602.405,00)

Terdapat selisih senilai Rp2.602.405,00 pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Fak Fak dikarenakan:

- Adanya kurang debit senilai Rp3.000,00 atas SP2D Nomor: 05545/SP2D-LS/BULOG/PPKD/APBD/2023 (belanja selisih penyetoran beras Pemerintah Kabupaten Fakfak tahun 2022) dimana seharusnya yang didebit senilai Rp9.639.900,00 tapi yang terdebit senilai Rp9.636.900,00 sehingga menyebabkan selisih pada RKUD Kabupaten Fak Fak tanggal 22 Desember 2023 senilai Rp3.000,00.
- Terdapat SP2D yang pajaknya telah didebit senilai Rp2.605.405,00 atas SP2D Nomor: 07417/SP2D-LS/SILPA/PPKD/APBD/2023 (Pembayaran tagihan 100% penyelesaian pembangunan Masjid Tanjung Wagom Distrik Pariwari) tetapi pokoknya senilai Rp144.600.000,00 tidak terdebit sampai dengan 31 Desember 2023. SP2D tersebut telah dihapus dari Aplikasi Keuangan (FMIS) tahun 2023 dan menjadi hutang belanja Pemerintah Daerah.

Rinciannya selisih Kas Daerah Kabupaten Fakfak bisa dilihat pada tabel berikut.

No	Nomor SP2D	Uraian	Nilai SP2D	Terdebit	Saldo Debit di RK	Keterangan	Status
1	05545/SP2D-LS/BULOG/PPKD/APBD/2023	Belanja selisih penyetoran beras Pemerintah Kabupaten Fakfak tahun 2022	9.639.900,00	9.636.900,00	-3.000,00	Kurang Debit	Sudah didebit dari RKUD tanggal 25 Juli 2024
2	07417/SP2D-LS/SILPA/PPKD/APBD/2023	Pembayaran tagihan 100% penyelesaian pembangunan Masjid Tanjung Wagom Distrik Pariwari	144.600.000,00	2.605.405,00	2.605.405,00	Hanya Potongan SP2D yang terdebit	Sampai dengan Laporan ini dibuat, tagihan tersebut belum dibayarkan kembali
Jumlah					2.602.405,00		

b. Kas Di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp171.012.981,12	Rp1.326.677.721,48

Kas di Bendahara Penerimaan sampai 31 Desember 2023 adalah senilai Rp171.012.981,12 merupakan Klaim JKN Jampersal Dinas Kesehatan dan Klaim JKN RSUD Kabupaten Fakfak dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	9.811.563,62
2	RSUD	161.201.417,50
Jumlah		171.012.981,12



c. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp3.312.929.470,00	Rp820.944.598,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran SKPD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp3.312.929.470,00. Jumlah tersebut adalah saldo Kas di bendahara pengeluaran yang telah disetor ke Kas Daerah di tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo (Rp)	Tanggal Setor	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.386.805.971,00	23-01-2024	230.000,00
			02-02-2024	1.386.575.971,00
2	Upt. Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D	4.643.863,00	22-02-2024	4.514.374,00
			22-02-2024	129.489,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	100.039.860,00	11-01-2024	139.860,00
			26-02-2024	99.900.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	343.222.381,00	23-08-2024	343.222.381,00
5	Dinas Sosial	495.000,00	26-02-2024	495.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	246.392.610,00	11-01-2024	460.400,00
			11-01-2024	330.000,00
			11-01-2024	5.165.000,00
			11-01-2024	9.048.000,00
			11-01-2024	7.728.000,00
			23-01-2024	223.661.210,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	205.703.154,00	12-01-2024	243.900,00
			13-02-2024	205.459.254,00
8	Sekretariat Daerah	260.980.418,00	16-02-2024	260.980.418,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	674.324.000,00	29-02-2024	674.324.000,00
10	Distrik Kramongmongga	45.611.424,00	23-08-2024	45.611.424,00
11	Distrik Kayauni	260.000,00	22-04-2024	260.000,00
12	Distrik Mbahamdandara	104.000,00	24-01-2024	104.000,00
13	Distrik Tomage	31.121.000,00	16-01-2024	31.121.000,00
14	Kelurahan Fakfak Selatan (PFK bendahara – disetorkan ke kas negara)	13.225.789,00	24/01/2024	13.225.789,00
Jumlah		3.312.929.470,00		3.312.929.470,00

Rincian perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 1.**

d. Kas di Bendahara Dana BOS	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp182.452.570,00	Rp261.156.290,00

Kas di Bendahara Dana BOS merupakan kas yang berada di Bendahara Dana BOS pada satuan pendidikan negeri SD, SMP, dan SMA per 31 Desember 2023, senilai Rp182.452.570,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	SD Negeri	98.379.707,00
2	SMP Negeri	44.482.615,00
3	SMA Negeri	39.569.954,00
4	Pendidikan Kesenjangan Negeri	20.294,00
Jumlah		182.452.570,00

Rincian saldo Kas Dana BOS SD, SMP, dan SMA Negeri dapat dilihat pada
Lampiran 2.

e. Kas di Bendahara FKTP	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp1.643.879.160,00	Rp934.461.961,00

Kas di bendahara FKTP terdiri dari :

No	FKTP	Saldo (Rp)
1	Kas Di Bendahara FKTP	1.000.082.123,00
2	Kas Dana BOK Puskesmas	643.797.037,00
Jumlah		1.643.879.160,00

- 1) Kas di Bendahara JKN suntuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menggunakan sistem kapitasi atau transfer langsung dana JKN dari Pemerintah Pusat ke 10 Rekening Puskesmas di Pemerintah Kabupaten Fakfak. Saldo kas di bendahara FKTP sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.000.082.123,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	FKTP	No. Rekening	Saldo (Rp)
1	Puskesmas Fakfak Kota	6000202266991	389.764.807,00
2	Puskesmas Fakfak Tengah	6000202167178	4.463.675,00
3	Puskesmas Sekban	6000201004523	278.605.960,00
4	Puskesmas Weri	6000202166927	221.666,00
5	Puskesmas Karas	6000202166915	16.784.265,00
6	Puskesmas Werba	6000202167026	107.466.964,00
7	Puskesmas Kramongmongga	6000202166939	33.398.680,00
8	Puskesmas Degen	6000202166941	5.532.574,00
9	Puskesmas Kokas	6000202166952	177.812,00
10	Puskesmas Bomberay	6000202167014	163.665.720,00
Jumlah			1.000.082.123,00

- 2) Kas Dana BOK Puskesmas merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan bagi Puskesmas yang ditransfer langsung ke

10 Rekening Puskesmas di Pemerintah Kabupaten Fakfak. Saldo kas Dana BOK Puskesmas sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp643.797.037,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	PUSKESMAS	No. Rekening	Saldo (Rp)
1	Puskesmas Fakfak Kota	1590055061	17.700,00
2	Puskesmas Fakfak Tengah	1590055049	15.592.000,00
3	Puskesmas Sekban	1590055072	28.364.000,00
4	Puskesmas Weri	1590054986	76.188.007,00
5	Puskesmas Karas	1590055038	135.906.988,00
6	Puskesmas Werba	1590054997	63.950.202,00
7	Puskesmas Kramongmongga	1590055016	80.882.867,00
8	Puskesmas Degen	1590055005	219.517.699,00
9	Puskesmas Kokas	1590055027	16.822.000,00
10	Puskesmas Bomberay	1590055050	6.555.574,00
Jumlah			643.797.037,00

f. Kas Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp585.321.310,71	Rp1.927.695.775,71

Saldo Kas Lainnya Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp585.321.310,71 yang tercatat pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Keterangan	Saldo (Rp)
1	Satuan Polisi Pamong Praja	sisa pembayaran gaji pegawai tidak tetap di lingkungan Satpol PP	23.573.297,00
2	Dinas Sosial	Saldo Rekening Bank BNI No. 2013166661* a.n. Dinas Sosial Kabupaten Fakfak yang dibuka sejak tanggal 16 Desember 2013 dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum ditutup.	33.769,00
3	Sekretariat Daerah	Sisa dana bansos yang tidak berhasil disalurkan kepada 21 orang	63.000.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dana bansos yang tidak direncanakan yang tidak berhasil disalurkan	423.688.031,71
5	Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Jasa giro yang masih ada di rekening yang belum di setor per 31 Desember 2023.	5.613,00
6	Distrik Bomberay	Sisa pembayaran gaji pegawai tidak tetap di lingkungan Distrik Bomberay	600,00
7	Kelurahan Danaweria	Kas di Rekening Prospek Otsus yang masih ada sejak tahun 2021 dan belum diakui pada laporan keuangan	20.000,00
8	Kelurahan Fakfak Utara	Kas di Rekening Prospek Otsus yang masih ada sejak tahun 2021 dan belum diakui pada laporan keuangan	37.500.000,00
9	Kelurahan Kokas	Kas di Rekening Prospek Otsus yang masih ada sejak tahun 2021 dan belum diakui pada laporan	37.500.000,00

No	SKPD	Keterangan	Saldo (Rp)
		keuangan	
Jumlah			585.321.310,71

g. Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp10.909.115.418,10	Rp9.959.148.131,24

Piutang Pajak Daerah adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 diakui senilai Rp10.909.115.418,10 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Piutang Pajak Reklame	2.450.000,00
2	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	811.929.620,10
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.094.735.798,00
Jumlah		10.909.115.418,10

Rincian piutang pajak daerah tahun 2019 s.d 2023 bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Objek	Pitung Pajak Tahun (n) di Tahun Berjalan					Jumlah
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Piutang Pajak Reklame	0,00	50.000,00	1.250.000,00	50.000,00	1.100.000,00	2.450.000,00
2	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	811.929.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	811.929.620,10
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.947.270.181,48	732.279.514,12	809.543.140,16	798.454.150,50	807.188.811,74	10.094.735.798,00
Jumlah		7.759.199.801,58	732.329.514,12	810.793.140,16	798.504.150,50	808.299.811,74	10.909.115.418,10

h. Piutang Retribusi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp593.802.000,00	Rp593.802.000,00

Piutang Retribusi Daerah merupakan hak tagih atau klaim retribusi Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang timbul dari Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dibayar oleh pihak ketiga sampai dengan masa SKRD berakhir, diharapkan dapat dijadikan kas dalam masa satu periode akuntansi. Piutang Retribusi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp593.802.000,00 yang merupakan piutang retribusi jasa umum, yaitu piutang retribusi pasar dari tahun 2019 ke bawah.

i. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp0,00	Rp2.035.739,40
Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Fakfak per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.		

j. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp6.273.247.751,00	Rp 3.697.825.637,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya senilai Rp6.273.247.751,00 merupakan piutang atas bagi hasil dari Provinsi Papua Barat yang belum disalurkan sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 900.1.14.3/198/9/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pembagian DBH Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 92 Tahun 2024 tanggal 23 April 2024 tentang Pembagian DBH Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :		

No	Uraian	Nilai (Rp)
I	Triwulan II	
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	331.444.854,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	243.564.806,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.242.758.847,00
II	Triwulan IV	
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	616.197.337,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	307.850.610,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.531.431.297,00
Jumlah		6.273.247.751,00

k. Penyisihan Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp(9.754.230.578,01)	Rp(9.285.739.373,30)
Sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, terhadap Piutang dilakukan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp(9.754.230.578,01), yang terdiri dari:		

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(8.884.137.786,76)

No	Uraian	Nilai (Rp)
2	Penyisihan Piutang Lainnya	(870.092.791,25)
Jumlah		(9.754.230.578,01)

1) Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 senilai Rp(8.884.137.786,76) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(160.500,00)
2	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(811.929.620,10)
3	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(7.478.245.666,66)
4	Penyisihan Piutang Retribusi	(593.802.000,00)
Jumlah		(8.884.137.786,76)

Rincian perhitungan penyisihan piutang pendapatan dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 4.

2) Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp(870.092.791,25) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(643.825.289,50)
2	Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka	(226.267.501,75)
Jumlah		(870.092.791,25)

Rincian perhitungan penyisihan piutang lainnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

I. Piutang Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp878.241.378,75	Rp1.125.039.737,86

Saldo Piutang Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Fakfak sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp955.609.705,86 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	651.973.877,00
2	Uang Muka	226.267.501,75
Jumlah		878.241.378,75

1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 senilai Rp651.973.877,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	433.087.835,00
2	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	218.886.042,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
Jumlah		651.973.877,00

2) Uang Muka

Uang Muka per 31 Desember 2023 senilai Rp226.267.501,75 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	20.190.000,00
2	Kelebihan Pembayaran SP2D	5.025.452,00
3	Piutang Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan	201.052.049,75
Jumlah		226.267.501,75

a) Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa

Piutang uang muka merupakan permintaan uang muka kegiatan belanja barang/jasa dan ataupun belanja modal yang dicatat sebagai piutang dan akan disetor kembali melalui pemotongan nilai pada tagihan termin pertama dan seterusnya.

Piutang uang muka per 31 Desember 2021 senilai Rp20.190.000,00 berupa Tagihan uang muka pekerjaan pembangunan papan nama promosi dan informasi sumber daya kelautan di Distrik Fakfak dan Distrik Pariwari pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak dengan Nomor SP2D 3295/SP2D-LS/OTSUS/PPKD/APBD/2018 tanggal 30 Oktober 2018, namun belum sempat disetor kembali karena tagihan termin pertama atas pekerjaan tersebut belum ditagih sampai dengan 31 Desember 2018

b) Kelebihan Pembayaran SP2D

Kelebihan Pembayaran SP2D Non Anggaran untuk Penyetoran PFK senilai Rp5.025.452,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyesuaian nilai saldo PFK IWP Taspen yang kelebihan setor	2.820.800,00
2	Penyesuaian nilai saldo PFK Taperum yang kelebihan setor	60.000,00
3	Penyesuaian saldo PFK PPh Pasal 21 yang kelebihan setor	2.144.652,00
Total		5.025.452,00

c) Piutang Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan

Piutang Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan senilai Rp201.052.049,75 merupakan piutang kepada pihak ketiga atas temuan BPK terhadap kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan pekerjaan di tahun 2017, yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo Awal Piutang (Rp)	Setoran s.d 31 Desember 2022 (Rp)	Setoran Tahun 2023 (Rp)	Sisa Piutang 31 Des 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	305.256.422,94	185.000.000,00	0,00	120.256.422,94

2	Dinas Kesehatan	31.612.721,82	16.501.161,00	0,00	15.111.560,82
3	Rumah Sakit Umum Daerah	33.646.828,71	5.000.000,00	0,00	28.646.828,71
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	139.405.564,39	102.368.326,62	0,00	37.037.237,77
Total		509.921.537,86	308.869.487,62	0,00	201.052.049,75

Rincian piutang lainnya tahun 2019 s.d 2023 bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Objek	Pitang Pajak Tahun (n) di Tahun Berjalan					Jumlah
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas	416.791.110,00	16.296.725,00	0,00	0,00	0,00	433.087.835,00
2	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas	218.886.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.886.042,00
3	Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa	20.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.190.000,00
4	Kelebihan Pembayaran SP2D	5.025.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025.452,00
5	Piutang Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan	201.052.049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	201.052.049,75
Jumlah		861.944.653,75	16.296.725,00	0,00	0,00	0,00	878.241.378,75

Piutang Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan tahun 2019 sesungguhnya terakumulasi dengan data piutang dari tahun 2017.

m. Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp36.437.163.490,42	Rp53.251.795.812,80

Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp36.437.163.490,42 yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo (Rp)
1	Bahan	23.469.741.025,42
2	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.149.713.823,00
3	Obat-obatan	7.006.708.175,00
4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	3.811.000.467,00
Jumlah		36.437.163.490,42

Rincian Persediaan Kabupaten Fakfak sampai dengan 31 Desember 2023 per SKPD yaitu sebagai berikut:

No	SKPD	Bahan (Rp)	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor (Rp)	Obat-obatan (Rp)	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	5.422.491.525,00	185.742.634,00	3.488.233.568,00	0,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	17.771.762.097,42	636.969.673,00	1.333.985.367,00	0,00
3	Puskesmas Weri	18.498.200,00	46.059.975,00	74.449.638,00	0,00



No	SKPD	Bahan (Rp)	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor (Rp)	Obat-obatan (Rp)	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan (Rp)
4	Puskesmas Bomberay	9.997.100,00	70.787.006,00	81.229.422,00	0,00
5	Puskesmas Fakfak Kota	387.589,00	212.999.359,00	525.178.448,00	0,00
6	Puskesmas Fakfak Tengah	3.000,00	291.382.037,00	114.001.994,00	0,00
7	Puskesmas Werba	47.381.864,00	111.535.324,00	495.358.783,00	0,00
8	Puskesmas Sekban	0,00	130.179.838,00	60.896.075,00	0,00
9	Puskesmas Karas	0,00	64.774.568,00	110.235.999,00	0,00
10	Puskesmas Kokas	10.080.900,00	185.742.634,00	514.313.418,00	0,00
11	Puskesmas Kramongmongga	0,00	21.187.599,00	81.801.314,00	0,00
12	Puskesmas Degen	0,00	32.140.111,00	104.248.369,00	0,00
13	Dinas Perkebunan	189.138.750,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	151.446.400,00	0,00	0,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	0,00	8.627.605,00	0,00	0,00
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	139.060,00	0,00	2.883.241.467,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	22.775.780,00	0,00
19	DP3AP2KB	0,00	0,00	0,00	927.759.000,00
Jumlah		23.469.741.025,42	2.149.713.823,00	7.006.708.175,00	3.811.000.467,00

Rincian perhitungan Persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

1) **Bahan**

Saldo bahan per 31 Desember 2023 senilai Rp23.469.741.025,42 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bahan Kimia	23.280.602.275,42
2	Bahan/Bibit Tanaman	189.138.750,00
Jumlah		23.469.741.025,42

2) **Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor**

Saldo alat/bahan untuk kegiatan kantor per 31 Desember 2023 senilai Rp2.149.713.823,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	8.627.605,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
2	Bahan Cetak	151.585.460,00
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.989.500.758,00
Jumlah		2.149.713.823,00

3) Obat-obatan

Saldo obat-obatan per 31 Desember 2023 senilai Rp7.007.008.377,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	3.488.233.568,00
2	RSUD	1.333.985.367,00
3	Puskesmas Weri	74.449.638,00
4	Puskesmas Bomberay	81.229.422,00
5	Puskesmas Fakfak Kota	525.178.448,00
6	Puskesmas Fakfak Tengah	114.001.994,00
7	Puskesmas Werba	495.358.783,00
8	Puskesmas Sekban	60.896.075,00
9	Puskesmas Karas	110.235.999,00
10	Puskesmas Kokas	514.313.418,00
11	Puskesmas Kramongmongga	81.801.314,00
12	Puskesmas Degen	104.248.369,00
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	22.775.780,00
Jumlah		7.006.708.175,00

4) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Saldo persediaan untuk dijual/diserahkan per 31 Desember 2023 senilai Rp3.811.000.467,00 yaitu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp2.883.241.467,00 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana senilai Rp927.759.000,00.

2. Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp73.893.880.918,35	Rp87.237.124.517,68

Nilai investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Fakfak per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp73.893.880.918,35. Jumlah tersebut merupakan nilai investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal pada BUMD dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Pengurangan) (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	PT Bank Papua	57.425.000.000,00	1.000.000.000,00	58.425.000.000,00
2	PD Mbiah Pahi	14.343.243.599,33	(14.343.243.599,33)	0,00
3	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala	15.468.880.918,35	0,00	15.468.880.918,35
Jumlah		87.237.124.517,68	(13.343.243.599,33)	73.893.880.918,35

Saldo investasi jangka panjang mengalami pengurangan di tahun 2023 senilai Rp13.343.243.599,33 jika dibandingkan dengan saldo investasi jangka panjang di tahun 2022, yang terdiri dari:

- a. Penambahan senilai Rp1.000.000.000,00 dimaksudkan untuk tambahan penyertaan modal pada Bank Papua sesuai SP2D Nomor: 03015/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023 tanggal 15 September 2023. Diharapkan penambahan tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pendapatan deviden dari Bank Papua. Jumlah penambahan modal pada Bank Papua naik dari yang sebelumnya senilai Rp57.425.000.000,00 menjadi senilai Rp58.425.000.000,00.
- b. Untuk Perusahaan Umum Daerah Air Mimin Tirta Pala, tidak terdapat perubahan nilai investasi pada tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Fakfak menyajikan saldo senilai Rp15.468.880.918,35 yang merupakan saldo awal unaudited Perusahaan Umum Daerah Air Mimin Tirta Pala TA 2023. Saldo awal unaudited tersebut sama dengan saldo akhir LK Audited PDAM TA 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Yaniswar dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Sampai dengan laporan ini dibuat, perusahaan tersebut belum menyampaikan Laporan Keuangan TA 2023 kepada pemerintah daerah
- c. Untuk PD. Mbiah Pahi, Pemerintah Kabupaten Fakfak sudah tidak lagi menyertakan modal sejak tahun 2018 dikarenakan perusahaan tidak aktif lagi. Kemudian sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Fakfak Nomor: 900.1.13.2/488/BUP/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 yang menyatakan saat ini PD. Mbiah Pahi sedang dalam proses penyelesaian penetapan status keberlangsungan Perusahaan, sehingga atas Investasi Jangka Panjang PD. Mbiah Pahi direklasifikasi ke Aset Lain – Lain senilai Rp14.343.243.599,33.

3. Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp2.372.512.567.153,18	Rp2.306.594.675.789,50

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp2.372.512.567.153,18 atau mengalami peningkatan senilai Rp65.917.891.363,68 atau naik sebesar 2,86% jika dibandingkan dengan nilai aset tetap per 31 Desember 2022 yang tercatat senilai Rp2.306.594.675.789,50 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan/ (Pengurangan) (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	694.315.889.801,00	4.974.233.837,00	699.290.123.638,00

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan/ (Pengurangan) (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2	Peralatan dan Mesin	506.454.288.556,32	58.214.082.380,00	564.668.370.936,32
3	Gedung dan Bangunan	1.000.686.814.812,17	81.634.779.876,74	1.082.321.594.688,91
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.108.241.972.380,68	124.953.687.190,00	2.233.195.659.570,68
5	Aset Tetap Lainnya	17.240.024.766,06	1.484.756.976,00	18.724.781.742,06
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	93.925.093.079,33	2.658.296.716,00	96.583.389.795,33
7	Akumulasi Penyusutan	(2.114.269.407.606,07)	(208.001.945.612,05)	(2.322.271.353.218,12)
Jumlah		2.306.594.675.789,49	65.917.891.363,69	2.372.512.567.153,18

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
a. Tanah	Rp699.290.123.638,00	Rp694.315.889.801,00

Nilai Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp699.290.123.638,00, terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tanah Persil	357.206.086.204,00
2	Tanah Non Persil	41.591.462.960,00
3	Lapangan	300.492.574.474,00
Jumlah		699.290.123.638,00

Ringkasan mutasi aset tanah selama tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo Aset Tanah per 31 Desember 2022		694.315.889.801,00
Belanja modal aset tanah tahun 2023	2.220.170.500,00	
Penambahan Aset Tanah dari Reklasifikasi	2.689.335.837,00	
Penambahan Aset Tanah dari Hibah	213.440.000,00	
Pengurangan Aset Tanah karena Bukan Aset Tetap/ Persediaan		148.712.500,00
Saldo akhir aset tanah per 31 Desember 2023		699.290.123.638,00

Penjelasan atas mutasi aset tanah tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Penambahan aset tanah yang berasal dari belanja modal senilai Rp2.220.170.500,00 merupakan belanja modal tanah dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Distrik Bomberay	71.500.000,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	825.000.000,00
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	84.000.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian	1.239.670.500,00
Jumlah		2.220.170.500,00

- a) Distrik Bomberay
Belanja modal tanah pada Distrik Bomberay senilai Rp71.500.000,00

dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	01228/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Belanja Modal Tanah	35.750.000,00
2	01229/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Belanja Modal Tanah pada	35.750.000,00
Jumlah			71.500.000,00

b) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Belanja modal tanah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp825.000.000,00 yang merupakan ganti rugi tanah Asrama Masiswa Fakfak di Sorong dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	07233/SP2D-LS/OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2023	Pembayaran pembebasan lahan Asrama Mahasiswa Sorong asal Kabupaten Fakfak	825.000.000,00
Jumlah			825.000.000,00

c) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Belanja modal tanah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp84.000.000,00 yang merupakan ganti rugi lahan Pasar Sosar di Distrik Kokas dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	01911/SP2D-LS/SILPA-OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2023	Ganti rugi tanah lokasi Pasar Sosar Distrik Kokas An. Syamsudin Baraweri (Silpa Otsus 1,25%)	42.000.000,00
2	02225/SP2D-LS/SILPA-OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2023	Ganti rugi tanah lokasi Pasar Sosar Distrik Kokas An. Salim Barawery	42.000.000,00
Jumlah			84.000.000,00

d) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Belanja modal tanah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan senilai Rp1.239.670.500,00 yang merupakan ganti rugi lahan dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	04892/SP2D-LS/OTSUS-1%/PPKD/APBD/2023	Ganti rugi tanah tahap akhir pada lokasi Kantor Distrik Furwagi An. Umar Faisal Bauw	140.000.000,00
2	05359/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Ganti rugi tanah tahap tiga pada lokasi Kantor Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak An. Salbiah Rengen	248.160.000,00
3	05885/SP2D-LS/OTSUS-1%/PPKD/APBD/2023	Ganti rugi tanah pada lokasi pembangunan PLTS Kampung Rumbati Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak An. Siti Halimah Bauw	10.920.000,00
4	05899/SP2D-LS/OTSUS-1%/PPKD/APBD/2023	Ganti rugi tanaman pada lokasi pembangunan PLTS Kampung Rumbati Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak An. Siti Halimah Bauw	20.000.000,00

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
5	07508/SP2D-TU/NIHIL/PPKD/APBD/2023	Ganti rugi tanaman pemasangan kabel listrik Kampung Kayauni - Rakendak Distrik Kayauni an. Onimus Iba dkk	238.828.000,00
6	07508/SP2D-TU/NIHIL/PPKD/APBD/2023	Belanja PNPB pemeriksaan Bandara Udara Siboru untuk penerbitan buku sertifikat an. Prasetyo Wibowo	83.050.000,00
7	05640/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Ganti rugi tanah tahap pertama pada lokasi pembangunan TPA di Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak T.A 2023 An.Moses Piahar	50.025.000,00
8	05641/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Ganti rugi tanah tahap pertama pada lokasi pembangunan TPA di Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak T.A 2023 An. Albertus Patiran	50.025.000,00
9	02337/SP2D-LS/OTSUS-1%/PPKD/APBD/2023	Ganti rugi tanah jalan masuk Bandara Siboru = 300m X 30m AN. Andarias Hombore	333.000.000,00
10	07513/SP2D-GU/NIHIL/PPKD/APBD/2023	Belanja PNPB pengukuran untuk penerbitan sertifikat tanah lokasi Bandara Siboru an. Prasetyo Wibowo	65.662.500,00
Jumlah			1.239.670.500,00

2) Penambahan Aset Tanah dari reklasifikasi senilai Rp2.689.335.837,00 merupakan penambahan aset tanah yang direklasifikasi di Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	01943/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Uang Muka 30% Pekerjaan Pematangan Lahan Pembangunan Puskesmas Furwagi	226.500.000,00
2	03587/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% Pematangan Lahan Pembangunan Puskesmas Furwagi	528.500.000,00
3	07223/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pengawasan Pematangan Lahan Puskesmas Furwagi	22.594.937,00
4	02325/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% Jasa konsultasi Perencanaan Pematangan Lahan Puskesmas Furwagi,kayauni dan Puskesmas Fakfak timur Tengah	79.955.000,00
5	01944/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Uang Muka 30% Pekerjaan Pematangan Lahan Pembangunan Puskesmas Fakfak Timur	298.155.000,00
6	02553/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Termin 50% Pekerjaan Pematangan Lahan Pembangunan Puskesmas Fakfak Timur	347.847.500,00
7	04476/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Tagihan 100% Pematangan Lahan Pembangunan Puskesmas Fakfak Timur Tengah	347.847.500,00
8	07166/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pengawasan Pematangan Lahan Puskesmas Fakfak Timur Tengah	29.492.700,00
9	02116/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Uang Muka 30% Pematangan Lahan Pembangunan Puskesmas Kayauni	235.500.000,00
10	04398/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Tagihan 100% Pematangan Lahan Pembangunan Puskesmas Kayuni	549.500.000,00

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
11	07192/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pengawasan Pematangan Lahan Puskesmas Kayauni	23.443.200,00
Jumlah			2.689.335.837,00

3) Penambahan Nilai Aset tanah yang bersal dari hibah senilai Rp213.440.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berupa pembangunan Tower Jaringan pada 35 kampung dengan rincian sebagai berikut.

No	Kampung	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kampung Fior	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	6.800.000,00
2	Kampung Furir	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	6.800.000,00
3	Kampung Andamata	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	6.800.000,00
4	Kampung Weri	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	4.800.000,00
5	Kampung Saharey	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	4.800.000,00
6	Kampung Tunas Gain	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	4.800.000,00
7	Kampung Tawar	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	6.800.000,00
8	Kampung Sengkiti	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	6.800.000,00
9	Kampung Tanehamur	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	3.360.000,00
10	Kampung Kayuni	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	6.800.000,00
11	Kampung Kaburbur	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	6.800.000,00
12	Kampung Ubadari	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	6.800.000,00
13	Kampung Homorkokma	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	6.800.000,00
14	Kampung Ugar	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	4.800.000,00
15	Kampung Patimburak	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	6.800.000,00
16	Kampung Kriawaswas	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	4.800.000,00
17	Kampung Kimina Kra	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	6.800.000,00
18	Kampung Batufiafas	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	6.800.000,00
19	Kampung Kinam	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	4.800.000,00
20	Kampung Mambunibuni	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	4.800.000,00
21	Kampung Mamur	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	6.800.000,00
22	Kampung Kramongmongga	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	6.800.000,00
23	Kampung Nembukteb	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru	4.800.000,00

No	Kampung	Uraian	Nilai (Rp)
		(Kontruksi Menara)	
24	Kampung Mbahamdandara	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	4.800.000,00
25	Kampung Darembang	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	6.800.000,00
26	Kampung Goras	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	22.000.000,00
27	Kampung Waremu	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	3.360.000,00
28	Kampung Mitimber	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	4.800.000,00
29	Kampung Adora	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	4.800.000,00
30	Kampung Mawar	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	3.360.000,00
31	Kampung Bisa	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	3.360.000,00
32	Kampung Puar	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	6.800.000,00
33	Kampung Patipi Pulau	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	4.800.000,00
34	Kampung Sum	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	6.800.000,00
35	Kampung Sipatnanam	Mendirikan Bangunan Prasarana Baru (Kontruksi Menara)	4.800.000,00
Jumlah			213.440.000,00

4) Pengurangan Nilai Aset tanah karena bukan merupakan aset tetap senilai Rp148.712.500,00 yang direklasifikasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	07508/SP2D-TU/NIHIL/PPKD/APBD/2023	Belanja PNPB pemeriksaan Bandara Udara Siboru Untuk Penerbitan Buku Sertifikat An. Prasetyo Wibowo	83.050.000,00
2	07513/SP2D-GU/NIHIL/PPKD/APBD/2023	Pembayaran belanja PNPB pengukuran untuk penerbitan sertifikat tanah lokasi Bandara Siboru An. Prasetyo Wibowo	65.662.500,00
Jumlah			

b. Peralatan Dan Mesin	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp564.668.370.936,32	Rp506.454.288.556,32

Nilai Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Fakfak per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp564.668.370.936,32 mengalami kenaikan senilai Rp58.214.082.380,00 atau naik sebesar 11,49% dibandingkan dengan nilai aset peralatan dan mesin tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp506.454.288.556,32 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Alat Besar Darat	14.571.610.185,00
2	Alat Bantu	11.422.550.285,00



No	Uraian	Nilai (Rp)
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	140.318.095.445,96
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	38.225.000,00
5	Alat Angkutan Apung Bermotor	21.876.378.928,32
6	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	1.313.899.000,00
7	Alat Angkutan Bermotor Udara	303.668.580,00
8	Alat Bengkel Bermesin	3.272.470.986,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	419.306.354,00
10	Alat Ukur	1.946.324.340,00
11	Alat Pengolahan	12.024.015.525,35
12	Alat Kantor	25.353.314.298,03
13	Alat Rumah Tangga	79.218.571.703,76
14	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.999.480.688,65
15	Alat Studio	14.865.164.854,65
16	Alat Komunikasi	2.452.179.426,00
17	Peralatan Pemancar	16.168.325.886,00
18	Peratatan Komunikasi Navigasi	3.029.700,00
19	Alat Kedokteran	71.417.769.889,90
20	Alat Kesehatan Umum	19.860.788.726,00
21	Unit Alat Laboratorium	24.734.653.093,98
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	323.266.615,00
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	3.975.849.237,70
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.458.320.086,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1.335.210.000,00
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	485.425.643,00
27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	43.483.000,00
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	196.150.000,00
29	Senjata Api	9.092.750,00
30	Persenjataan Non Senjata Api	7.722.000,00
31	Alat Khusus Kepolisian	337.405.637,00
32	Komputer Unit	44.508.840.442,13
33	Peralatan Komputer	21.881.321.836,89
34	Alat Eksplorasi Geofisika	13.719.600,00
35	Alat Pengeboran Mesin	19.200.000,00
36	Sumur	1.792.495.399,00
37	Alat Pelindung	42.211.780,00
38	Alat Sar	455.780.232,00
39	Alat Kerja Penerbangan	484.528.721,00
40	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	431.834.400,00
41	Unit Peralatan Proses/Produksi	1.566.347.000,00
42	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	19.955.672.715,00
43	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	712.900.000,00
44	Peralatan Olahraga	1.051.770.945,00
Jumlah		564.668.370.936,32

Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022		506.454.288.556,32
Belanja modal aset peralatan dan mesin tahun 2023	52.401.468.114,00	
Penambahan aset peralatan dan mesin dari Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa	4.402.988.889,00	
Penambahan aset peralatan dan mesin dari Reklasifikasi Aset Tetap yang Lain	1.728.063.710,00	
Penambahan aset peralatan dan mesin dari JKN/BOSP	2.152.336.497,00	
Pengurangan aset peralatan dan mesin dari reklasifikasi ke aset tetap lainnya		28.873.000,00
Pengurangan aset peralatan dan mesin pada buku ekstra komptable karena nilai di bawah kapitalisasi		1.360.754.287,00
Pengurangan Aset peralatan dan mesin karena bukan Aset Tetap/ Persediaan		1.081.147.543,00
Saldo akhir aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2023		564.668.370.936,32

Penjelasan atas mutasi aset peralatan dan mesin tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Penambahan aset pelatan dan mesin yang berasal dari belanja modal tahun 2023 senilai Rp52.401.468.114,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	485.746.950,00
2	Sekretariat Daerah	3.249.810.301,00
3	Distrik Fakfak	579.201.247,00
4	Distrik Fakfak Barat	133.964.820,00
5	Distrik Fakfak Tengah	385.872.334,00
6	Distrik Fakfak Timur	249.989.713,00
7	Distrik Kokas	519.520.000,00
8	Distrik Kramongmongga	98.995.305,00
9	Distrik Bomberay	34.797.113,00
10	Distrik Karas	61.579.930,00
11	Distrik Teluk Patipi	158.225.090,00
12	Distrik Kayauni	105.489.895,00
13	Distrik Pariwari	1.140.313.880,00
14	Distrik Wartutin	160.067.404,00
15	Distrik Fakfak Timur Tengah	107.400.000,00
16	Distrik Arguni	203.564.343,00
17	Distrik Mbahamdandara	124.499.441,00
18	Distrik Furwagi	132.177.983,00
19	Distrik Tomage	101.280.844,00
20	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	6.478.594.600,00
21	Dinas Perhubungan	1.042.717.420,00
22	RSUD Type D	4.355.922.338,00
23	Dinas Kesehatan	12.106.065.443,00
24	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	5.240.100.833,00
25	Dinas Sosial	67.237.900,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	343.087.550,00
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	217.973.328,00
28	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	77.016.406,00
29	DP3AP2KB	927.595.344,00
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	550.160.653,00
31	Dinas Pertanian dan Peternakan	885.824.340,00
32	Dinas Perkebunan	111.329.000,00
33	Dinas Perikanan dan Kelautan	233.242.627,00
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	462.038.970,00
35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	452.258.127,00
36	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	998.719.753,00
37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.695.400,00
38	Inspektorat	56.400.000,00
39	BP4D	555.290.821,00
40	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	105.695.930,00
41	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	777.250.761,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	231.219.795,00
43	Satuan Polisi Pamong Praja	240.910.770,00
44	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.132.566.062,00
45	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	294.054.584,00
46	Dinas Komunikasi dan Informasika, Statistika dan Persanidan	6.137.311.766,00
47	Badan Pendapatan Daerah	188.691.000,00
Jumlah		52.401.468.114,00

2) Penambahan set tetap peralatan dan mesin dari Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa karena kesalahan penganggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.760.688.889,00
2	RSUD	2.642.300.000,00
Jumlah		4.402.988.889,00

a) Dinas Kesehatan

- (1) Pengakuan aset tetap atas kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal Peralatan Mesin berupa Alkes senilai Rp819.898.636,00 dengan Kontrak Nomor: 510/010/Pusrch/DAK/PPK-DINKES/2023 yaitu Tagihan 100% Belanja Alat Kesehatan Penguatan Layanan Primer (DAK Fisik)
- (2) Pengakuan aset tetap atas kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal Peralatan Mesin berupa Alkes sebesar Rp940.790.253,00 dengan BAP No. 440/081/DAK/DINKES/2023 yaitu Tagihan Belanja Alkes Pembangunan PKM 1.

b) RSUD Type D

- (1) Pengakuan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp528.000.000,00 yaitu pengadaan alkes hematology analyzer laboratorium (E-Catalog).
- (2) Pengakuan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp406.000.000,00 yaitu pengadaan alkes kedokteran bedah orthopedi e-catalog (Otsus).
- (3) Pengakuan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp1.129.300.000,00 pengadaan UPS 120 Kva Radiologi (E-Catalog).
- (4) Pengakuan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp579.000.000,00 yaitu Pengadaan UPS 80 Kva Sentral Oksigen (E-Catalog) PT. Trimitra Usaha Sumber Daya.

3) Penambahan aset peralatan dan mesin dari reklasifikasi aset tetap yang lain senilai Rp1.728.063.710,00 yang terdiri dari:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perhubungan	1.603.363.710,00
2	Dinas Kesehatan	124.700.000,00
Jumlah		1.728.063.710,00

a) Dinas Perhubungan senilai Rp1.603.363.710,00 berupa kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	02059/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan belanja modal kegiatan pagar pengaman jalan Distrik Wartutin, Distrik Pariwari, Distrik Kayuni, Distrik Fakfak Timur Tengah (Kampung Kotam), Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak Barat	84.990.000,00
2	02828/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Distrik Fakfak Tengah	65.040.000,00
3	05855/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Distrik Fakfak Tengah	151.760.000,00
4	02829/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Distrik Fakfak Timur Tengah (Kampung Kotam)	65.040.000,00
5	06287/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Distrik Fakfak Timur Tengah (Kampung Kotam)	151.760.000,00
6	02831/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Distrik Pariwari	65.014.000,00

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
	23		
7	06244/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Distrik Pariwari	151.700.000,00
8	02962/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar Pengaman Jalan Distrik Kayuni	65.040.000,00
9	06690/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Distrik Kayuni	151.760.000,00
10	03310/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Distrik Fakfak Barat	182.115.000,00
11	06693/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Distrik Fakfak Barat	424.935.000,00
12	06285/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan belanja modal kegiatan pagar pengaman jalan (Distrik Fakfak Timur Tengah)	6.500.000,00
13	06286/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan belanja modal kegiatan pagar pengaman jalan (Distrik Fakfak Tengah)	6.500.000,00
14	06308/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan belanja modal kegiatan pagar pengaman jalan (Distrik Pariwari)	6.500.000,00
15	06310/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan belanja modal kegiatan pagar pengaman jalan (Distrik Kayuni)	6.501.270,00
16	06311/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan belanja modal kegiatan pagar pengaman jalan (Distrik Fakfak Barat)	18.208.440,00
Jumlah			1.603.363.710,00

b) Dinas Kesehatan senilai Rp124.700.000,00 berupa 3 buah longboat.

4) Penambahan aset pelatan dan mesin yang berasal dari JKN/BOSP tahun 2023 senilai Rp2.152.336.497,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BOS)	1.695.525.288,00
2	Dinas Kesehatan (JKN)	456.811.209,00
Jumlah		2.152.336.497,00

a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penambahan aset peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bersumber dari Dana BOS senilai Rp1.695.525.288,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Pendidikan	Nilai (Rp)
1	Sekolah Dasar (SD) Negeri	878.484.151,00
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri	361.396.637,00
3	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	455.644.500,00

No	Satuan Pendidikan	Nilai (Rp)
Jumlah		1.695.525.288,00

b) Dinas Kesehatan

Penambahan aset peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan yang bersumber dari belanja modal dana JKN senilai Rp456.811.209,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	FKTP	Nilai (Rp)
1	Puskesmas Weri	30.402.900,00
2	Puskesmas Bomberay	11.689.965,00
3	Puskesmas Fakfak Kota	38.026.380,00
4	Puskesmas Fakfak Tengah	70.211.800,00
5	Puskesmas Werba	200.689.896,00
6	Puskesmas Sekban	84.652.268,00
7	Puskesmas Kokas	3.438.000,00
8	Puskesmas Degen	17.700.000,00
Jumlah		456.811.209,00

- 6) Pengurangan aset peralatan dan mesin karena direklasifikasi ke aset tetap lain tahun 2023 senilai Rp28.873.000,00 yaitu pada Sekretariat Daerah berupa Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Rumah Tangga Bupati) Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Ukiran Kaligrafi) dengan SP2D Nomor: 06044/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023
- 7) Pengurangan aset pelatan dan mesin yang berasal dari Buku Ekstra Kompetable karena nilai di bawah kapitalisasi tahun 2023 senilai Rp1.360.754.287,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Dewan	2.352.000,00
2	Sekretariat Daerah	80.340.380,00
3	Distrik Fakfak	29.750.000,00
4	Distrik Fakfak Tengah	25.000.000,00
5	Distrik Fakfak Timur	49.950.000,00
6	Distrik Kramongmongga	5.550.000,00
7	Distrik Teluk Patipi	31.080.000,00
8	Distrik Pariwari	38.850.000,00
9	Distrik Wartutin	23.310.000,00
10	Distrik Furwagi	1.110.000,00
11	Dinas Kesehatan	213.970.872,00
12	RSUD Type D	178.556.856,00
13	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	492.253.479,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.440.000,00
15	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.550.000,00
16	Dinas Pertanian	1.110.000,00
17	Dinas Perkebunan	27.742.500,00
18	Dinas Perikanan dan Kelautan	5.550.000,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.860.000,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.110.000,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.500.000,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja	109.890.000,00
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.928.200,00
Jumlah		1.360.754.287,00

8) Pengurangan aset pelatan dan mesin karena bukan merupakan aset tetap tahun 2023 senilai Rp1.081.147.543,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Distrik Fakfak	40.174.785,00
2	Dinas Kesehatan	46.759.130,00
3	RSUD Type D	673.231.745,00
4	Dinas Pertanian	199.700.000,00
5	Dinas Perikanan dan Kelautan	14.263.722,00
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.370.060,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.770.000,00
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	97.878.101,00
Jumlah		1.081.147.543,00

a) Distrik Fakfak

Pengurangan aset Peralatan dan Mesin karena bukan merupakan aset tetap tahun 2023 pada Distrik Fakfak senilai Rp40.174.785,00 berupa belanja penyediaan mebel kader Posyandu, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak TA 2023 dengan No SP2D 03233/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023.

b) Dinas Kesehatan

Pengurangan aset Peralatan dan Mesin karena bukan merupakan aset tetap tahun 2023 pada Dinas Kesehatan senilai Rp46.759.130,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	SP2D	Nilai (Rp)
1	Bantal Guling 2 buah	06141/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	1.232.000,00
2	Belanja Alat Kesehatan (OTSUS) SERENITY RESUSITATOR	07130/SP2D-LS/OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2023	7.137.500,00
3	Belanja Alat Kesehatan (OTSUS) SERENITY 4812199077-FKS-005943837		37.406.000,00
4	Belanja Alat Kesehatan (OTSUS) by MEDIKA TERMOMETER FLEXIBLE TIP		983.630,00
Jumlah			46.759.130,00

c) RSUD Type D

Pengurangan aset peralatan dan mesin pada RSUD Type D karena bukan merupakan aset tetap tahun 2023 senilai Rp673.231.745,00 dengan

rincian sebagai berikut:

No	No. SP2D/No. Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	005/KOREKSI/RSUD/FF/2023	Koreksi belanja RSUD 2023 pada sub kegiatan 2.2.01.14 dari rek 5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya ke rek 5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	328.468.000,00
2	05086/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Pengadaan spreng tempat tidur	49.000.000,00
3	01935/SP2D-LS/OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2023	Permintaan pembayaran tagihan pengadaan service oksigen sentral atas RSUD Fakfak pada PT. Dwi Sarana Sentosa tahun 2023	290.776.645,00
4	02924/SP2D-LS/OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2023	Permintaan pembayaran tagihan pengadaan alat kedokteran umum (e-catalog) atas rsud fakfak pada PT. sani tiara prima tahun 2023	4.987.100,00
Jumlah			673.231.745,00

d) Dinas Pertanian

Pengurangan aset peralatan dan mesin pada Dinas Pertanian karena bukan merupakan aset tetap tahun 2023 senilai Rp199.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Sp2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	04431/SP2D-LS/OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2023	Permintaan pembayaran tagihan uang muka 50% atas pekerjaan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin pengolahan pangan lokal oleh CV. Kemer Retreda	99.850.000,00
2	05774/SP2D-LS/OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2023	Permintaan pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin pengolahan pangan lokal oleh CV. Kemer Retreda	99.850.000,00
Jumlah			199.700.000,00

d) Dinas Perikanan dan Kelautan

Pengurangan aset peralatan dan mesin pada Dinas Perikanan dan Kelautan karena bukan merupakan aset tetap tahun 2023 senilai Rp14.263.722,00 berupa barang yang diserahkan kepada Masyarakat yaitu belanja penyediaan sarana penunjang pembudidayaan air tawar dengan SP2D Nomor: 05973/SP2D-LS/OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2023.

e) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengurangan aset peralatan dan mesin pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah karena bukan merupakan aset tetap tahun 2023 senilai Rp1.370.060,00 berupa belanja modal alat pembersih dengan SP2D Nomor: 01179/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023.

f) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pengurangan aset peralatan dan mesin pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan karena bukan merupakan aset tetap tahun 2023 senilai Rp7.770.000,00 berupa belanja modal belanja manequine (pria dan wanita), tenda, toa, bingkai akrilik dan life jacket standar dengan SP2D Nomor:

05208/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023.

- g) Dinas Kerasipan dan Perpustakaan
- Pengurangan aset peralatan dan mesin pada Dinas Kerasipan dan Perpustakaan karena bukan merupakan aset tetap tahun 2023 senilai Rp97.878.101,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	05020/SP2D-LS/OTSUS-1%/PPKD/APBD/2023	Belanja modal mebel (alat dan bahan untuk perpustakaan kampung) kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	33.300.000,00
2	05286/SP2D-LS/OTSUS-1%PPKD/APBD/2023	Belanja modal mebel kegiatan penciptaan arsip dinamis	5.294.867,00
3	05238/SP2D-LS/OTSUS-1%/PPKD/APBD/2023	Belanja modal personal komputer dan belanja modal peralatan komputer kegiatan penciptaan arsip dinamis	41.133.692,00
4	05238/SP2D-LS/OTSUS-1%/PPKD/APBD/2023	Belanja modal personal komputer dan belanja modal peralatan komputer kegiatan penciptaan arsip dinamis	13.615.371,00
5	05238/SP2D-LS/OTSUS-1%/PPKD/APBD/2023	Belanja modal personal komputer dan belanja modal peralatan komputer kegiatan penciptaan arsip dinamis	4.534.171,00
Jumlah			97.878.101,00

- c. Gedung dan Bangunan
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
| | Rp1.082.321.594.688,91 | Rp1.000.686.814.812,17 |

Nilai aset gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Fakfak per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp1.082.321.594.688,91 mengalami penambahan senilai Rp81.634.779.876,74 atau naik 8,16% dibandingkan dengan nilai aset Gedung dan Bangunan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp1.000.686.814.812,17 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	900.528.856.129,33
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	158.668.959.544,58
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	8.288.874.302,00
4	Bangunan Menara Perambuan	149.424.500,00
5	Tugu/Tanda Batas	14.685.480.213,00
Jumlah		1.082.321.594.688,91

Ringkasan mutasi aset Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022		1.000.686.814.812,17
Belanja modal aset Gedung dan bangunan tahun 2023	95.937.484.162,74	
Penambahan aset Gedung dan bangunan dari Beban Barang dan Jasa	2.106.102.200,00	

Penambahan aset Gedung dan bangunan dari Reklasifikasi Aset Tetap yang Lain	85.500.000,00	
Pengurangan aset Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Tetap yang Lain		11.205.572.808,00
Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi dari yang dihibahkan		4.445.018.784,00
Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi dari Bukan Aset Tetap/ Persediaan		349.195.894,00
Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena kekurangan volume pekerjaan		494.519.000,00
Saldo akhir aset Gedung dan bangunan per 31 Desember 2023		1.082.321.594.688,91

Penjelasan atas mutasi aset gedung dan bangunan tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Penambahan aset gedung dan bangunan yang berasal dari belanja modal tahun 2023 senilai Rp95.937.484.162,74 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Dewan	162.750.450,00
2	Sekretariat Daerah	349.195.894,00
3	Distrik Fakfak	344.871.000,00
4	Dinas PUPR2KP	29.635.558.124,00
5	Dinas Perhubungan	1.798.453.710,00
6	Dinas Kesehatan	42.751.992.313,74
7	Rsud Type D	1.017.295.437,00
8	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	11.521.529.715,00
9	BP4D	691.200.000,00
10	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	19.444.364,00
11	DP3AP2KB	1.284.342.546,00
12	Dinas Perkebunan	1.593.917.000,00
13	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	2.931.601.085,00
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	57.308.888,00
15	BPKAD	371.040.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	776.650.000,00
17	Badan Kepewagawaian Daerah Dan Pengembangan SDM	630.333.636,00
Jumlah		95.937.484.162,74

- 2) Penambahan gedung dan bangunan dari Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa karena kesalahan penganggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga senilai Rp2.106.102.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pengakuan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan atas kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal Gedung dan Bangunan senilai Rp322.700.000,00 yaitu Pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Kriawaswas Distrik Kokas (Otsus Spesific Grant) Kab. Fakfak Tahun 2023.

- b) Pengakuan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan atas kesalahan

penganggaran realisasi belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal Gedung dan Bangunan senilai Rp454.902.000,00 yaitu Pekerjaan Pembangunan Rumah Guru Sd Inpres Patimburak Type II Tahun 2023

- c) Pengakuan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan atas kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal Gedung dan Bangunan senilai Rp337.050.000,00 yaitu Pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SMP Negeri Werabuan Distrik Wartutin (Otsus Specific Grant) Kab. Fakfak Tahun 2023
- d) Pengakuan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan atas kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal Gedung dan Bangunan senilai Rp26.950.000,00 yaitu Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Guru SMP Negeri Werabuan Distrik Wartutin Kab. Fakfak Tahun 2023
- e) Pengakuan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan atas kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal Gedung dan Bangunan senilai Rp19.408.000,00 yaitu Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Guru Sd Inpres Kriawaswas Distrik Kokas Tipe Ii Kab. Fakfak Tahun 2023
- f) Pengakuan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan atas kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal Gedung dan Bangunan senilai Rp19.400.000,00 yaitu Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Guru Sd Inpres Patimburak Type II Kab. Fakfak Tahun 2023.
- g) Pengakuan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan atas kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal Gedung dan Bangunan senilai Rp20.080.000,00 yaitu Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Guru SMP Negeri Werabuan Distrik Wartutin Kab. Fakfak Tahun 2023.
- h) Pengakuan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan atas kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal Gedung dan Bangunan senilai Rp25.907.000,00 yaitu Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Patimburak Distrik Kokas Tipe Ii Kab. Fakfak Tahun 2023.
- i) Pengakuan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan atas kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal Gedung dan Bangunan senilai Rp194.958.000,00 yaitu Pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Patimburak Type II Tahun 2023.
- k) Pengakuan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan atas kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja

- modal Gedung dan Bangunan senilai Rp322.700.000,00 yaitu Pekerjaan Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Kriawaswas Distrik Kokas (Otsus Spesific Grant) Kab. Fakfak Tahun 2023.
- l) Pengakuan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan atas kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa yang seharusnya belanja modal Gedung dan Bangunan senilai Rp337.050.000,00 yaitu Pekerjaan Pembangunan Rumah Guru Smp Negeri Werabuan Distrik Wartutin (Otsus Spesific Grant) Kab. Fakfak Tahun 2023.
- 3) Penambahan aset gedung dan bangunan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap yang lain tahun 2023 senilai Rp85.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perkebunan	14.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	71.500.000,00
Jumlah		85.500.000,00

- a) Dinas Perkebunan
- Mutasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap yang lain tahun 2023 berupa Pemeliharaan Gedung (Pengecetan) dan Pembuatan Jalan Setapak Rumah Produksi senilai Rp14.000.000.
- b) Dinas Kesehatan
- Mutasi Penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap yang lain tahun 2023 yaitu kegiatan Perencanaan Penataan LendsCape dan Pembuatan Talud Belakang PKM Tomage senilai Rp71.500.000
- 3) Pengurangan aset gedung dan bangunan yang berasal dari Reklasifikasi Aset tetap Lain tahun 2023 senilai Rp11.205.572.808,00 adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas PUPR2KP	6.334.402.780,00
2	Dinas Perhubungan	1.798.453.710,00
3	Dinas Kesehatan	2.689.335.837,00
4	Rsud Type D	383.380.481,00
Jumlah		11.205.572.808,00

- a) DPU(PR)2KP
- Mutasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap yang lain tahun 2023 senilai Rp6.334.402.780,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	04077/SP2D-LS/DTU-DBH/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Uang Muka 50%% Penataan Jalan Wisata Kota Tua Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten	462.950.000,00



No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
		Fakfak Pada CV. SHINI JAYA	
2	07484/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Progres 70% Penataan Jalan Wisata Kawasan Kota Tua Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. SHINI JAYA	185.180.000,00
3	04043/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Perencanaan Penataan Wisata Kawasan Kota Tua Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada PT. DIGDAYA KARYA	36.680.000,00
4	06324/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan 100% Revitalisasi Embung Di Kampung Mbima Jaya untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV ERMASU BUANA PASIFICA	312.714.722,00
5	03806/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Uang Muka 30% Revitalisasi Embung Di Kampung Mbima Jaya untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV ERMASU BUANA PASIFICA	134.020.595,00
6	03530/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Perencanaan Revitalisasi Embung Di Kampung Mbima Jaya untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV DARMA CITRA UTAMA	17.750.010,00
7	04174/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Uang Muka 50% Pembangunan Pelataran Pantai Ruas Jalan Salasa Namudat Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. GHINA JAYA SULBARINDO	455.955.818,00
8	06893/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan 100% Pembangunan Pelataran Pantai Ruas Jalan Salasa Namudat Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. GHINA JAYA SULBARINDO	455.955.818,00
9	04078/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Perencanaan Pembangunan Pelataran Pantai Ruas Jalan Salasa Namudat Untuk DPU(PR)2KPKabupaten Fakfak Pada CV. DHUHA ENGINEERING	36.480.150,00
10	07419/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan 100% Rehabilitasi Timbunan Talud JL. DR. Salasa Namudat Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. MATADOORS ELEBES	911.960.000,00
11	04066/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Uang Muka 50% Pembangunan Sport Center dan Kuliner Tahap II Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. GHINA JAYA SULBARINDO	1.128.372.539,00
12	07003/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan 100% Pembangunan Sport Center dan Kuliner Tahap II Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. GHINA JAYA SULBARINDO	1.128.372.538,00
13	04369/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan 100% Perencanaan Pembangunan Sport Center dan Kuliner Tahap II Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada PT INOVASI KONSULINDO RAYA	91.540.590,00
14	07432/SP2D-LS/DBH-SDA-OTSUS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan 100% (Progres 50%+Garansi Bank 50%) Penataan Jalan Baru Fakfak Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV AGGAEN MUTIARA GUNUNG	912.770.000,00
15	06844/SP2D-LS/DBH-DA-OTSUS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan 100% Perencanaan Penataan Jalan Baru	36.400.000,00



No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
		Fakfak Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. MITRA PATRIA KONSULTAN	
16	07474/SP2D-LS/DBH-SDA-OTSUS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan 100% Pengawasan Penataan Jalan Baru Fakfak Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. DARMA CITRA UTAMA	27.300.000,00
Jumlah			6.334.402.780,00

b) Dinas Perhubungan

Mutasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap yang lain tahun 2023 senilai Rp1.798.453.710,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	02059/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan belanja modal kegiatan pagar pengaman jalan Distrik Wartutin, Distrik Pariwari, Distrik Kayuni, Distrik Fakfak Timur Tengah (Kampung Kotam), Distrik Fakfak Tengah Dan Distrik Fakfak Barat	84.990.000,00
2	02828/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Distrik Fakfak Tengah	65.040.000,00
3	05855/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Distrik Fakfak Tengah	151.760.000,00
4	02829/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Distrik Fakfak Timur Tengah (Kampung Kotam)	65.040.000,00
5	06287./SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pwngaman jalan Distrik Fakfak Timur Tengah (Kampung Kotam)	151.760.000,00
6	02831/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Distrik Pariwari	65.014.000,00
7	06244/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Distrik Pariwari	151.700.000,00
8	06690/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Distrik Kayuni	151.760.000,00
9	03310/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Distrik Fakfak Barat	182.115.000,00
10	06693/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan 100 % atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan Distrik Fakfak Barat	424.935.000,00
11	06285./SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan belanja modal kegiatan pagar pengaman jalan (Distrik Fakfak Timur Tengah)	6.500.000,00
12	06286./SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengawasan Belanja modal kegiatan pagar pengaman jalan (Distrik Fakfak Tengah)	6.500.000,00
13	06308/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan belanja modal kegiatan pagar pengaman jalan (Distrik Pariwari)	6.500.000,00
14	06310/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan belanja modal kegiatan pagar pengaman jalan (Distrik Kayuni)	6.501.270,00
15	06311/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan belanja modal kegiatan pagar pengaman jalan (Distrik Fakfak Barat)	18.208.440,00



No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
16	03133/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (Distrik Wartutin)	195.090.000,00
Jumlah			1.798.453.710,00

c) Dinas Kesehatan

Mutasi Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap yang lain tahun 2023 senilai Rp2.689.335.837,00 adalah reklasifikasi dari Pematangan Lahan Pembangunan Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	01943/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Uang Muka 30% Pekerjaan Pematangan Lahan Pembangunan Puskesmas Furwagi (Dak Fisik) Spk 08/Sp-Kons./Dak/Ppk-Dk/Vi/2023 Bap N0 440/09/Bap-Dak/Dinkes/Ff/Vi/2023 Sesuai Bukti	226.500.000,00
2	03587/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% Pematangan Lahan Pembangunan Puskesmas Furwagi (Dak Fisik) Spk 08/Sp-Kons./Dak/Ppk-Dk/Vi/2023 Tgl 20 Juni 2023 Bap N0 440/05/Bastp-Dinkes/Ff/Vii/2023 Tgl 11 September 2023 Sesuai Bukti	528.500.000,00
3	07223/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pengawasan Pematangan Lahan Puskesmas Furwagi (Dakfisik) Dengan No. Kontrak: 08/Spk/Dak/Ppk-Dk/Vi/2023, Tgl. 21-06-2023, No. Bastr :440/010/Bast-Dinkes/Ff//2023, Tgl. 22-07-2023 Bukti Terlampir	22.594.937,00
4	02325/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pembayaran 100% Jasa Konsultasi Perencanaan Pematangan Lahan Puskesmas Furwagi, Kayauni Dan Puskesmas Fakfak Timur Tengah (DAK FISIK) SPK 04/SPK-Renc/DAK/PPK-DK/IV/2023 Bast N0 440/07/BAST-DAK/DINKES/FF/V/2023 Tgl 17-05- 2023 Sesuai Bukti	79.955.000,00
5	01944/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Uang Muka 30% Pekerjaan Pematangan Lahan Pembangunan Puskesmas Fakfak Timur Tengah (Dak Fisik) Spk 10/Sp-Kons/Dak/Ppk-Dk/Vi/2023 Bap N0 440/08/Bap-Dak/Dinkes/Ff/Vi/2023 Sesuai Bukti	298.155.000,00
6	02553/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Termin 50% Pekerjaan Pematangan Lahan Pembangunan Puskesmas Fakfak Timur Tengah (Dak Fisik) Spk 10/Sp-Kons./Dak/Ppk-Dk/Vi/2023 Bap N0 440/03/Bap-Dak/Dinkes/Ff/Viii/2023 Tgl 15-08-2023 Sesuai Bukti	347.847.500,00
7	04476/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Tagihan 100% Pematangan Lahan Pembangunan Puskesmas Fakfak Timur Tengah	347.847.500,00
8	07166/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pengawasan Pematangan Lahan Puskesmas Fakfak Timur Tengah (Dakfisik) Dengan No. Kontrak: 010/Spk/Dak/Ppk-Dk/Ff/Vi/2023, Tgl. 21-06-2023, No. Bastr/Pho: 440/011/Bastr-Dinkes/Ff/2023, Tgl. 22-07-2023 Bukti Terlampir	29.492.700,00
9	02116/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Uang Muka 30% Pematangan Lahan Pembangunan Puskesmas Kayauni (Dak Fisik) Spk 09/Sp-Kons/Dak/Ppk-Dk/Vi/2023 Tgl 20 Juni 2023 Bap N0 440/030/Bap-Dak/Dinkes/Ff/Vii/2023 Tgl 25 Juli 2023 Sesuai Bukti	235.500.000,00
10	04398/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Tagihan 100% Pematangan Lahan Pembangunan Puskesmas Kayuni, Spk 09/Sp-Kons/Dak/Ppk-Dk/Vi/2023 Tgl 20 Juni 2023 Basp N0 440/08/Basp-Dinkes/Ff/X/2023 Tgl 22-08- 2023 Sesuai Bukti	549.500.000,00

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
11	07192/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2023	Pengawasan Pematangan Lahan Puskesmas Kayuni (Dakfisik) Dengan No. Kontrak: 09/Spk/Dak/Ppk-Dk/Ff/Vi/2023, Tgl. 21-06-2023, No. Bast: 440/09/Bast/Dinkes/Ff/2023, Tgl. 22-07-2023 Bukti Terlampir	23.443.200,00
Jumlah			2.689.335.837,00

d) RSUD Type D

Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap yang lain tahun 2023 senilai Rp383.380.481,00 adalah reklasifikasi dari kegiatan Pemeliharaan Gedung Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	04601/SP2D-LS/OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2023	Pengadaan Pemeliharaan Gedung Rawat Inap Uang Muka 50%	191.850.775,00
2	04719/SP2D-LS/OTSUS-1,25%/PPKD/APBD/2023	Permintaan Pembayaran Uang Muka 50% Pengadaan Pemeliharaan Gedung Utama Dan Penunjang Lainnya Kpd CV. Tanama Jaya	191.529.706,00
Jumlah			383.380.481,00

5) Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi dari Hibah tahun 2023 yang berasal dari Dinas PUPR2KP senilai Rp4.445.018.784 dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	07396/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan 100% (Progress 55% Garansi Bank 45%) Gedung Auditorium Kantor Organisasi Islami (Koi) Untuk Dpu(Pr)2kp Kabupaten Fakfak Pada Cv. Taruwara Martana	2.668.975.331,00
2	00788/SP2D-LS/SILPA/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan 100 % Atas Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak (SPK No. 16.02/PPK-FSK/REHAB.GED.KANTOR KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK/DAU-DPUPR2KP-FF/2022) Untuk DPU(PR)2KP Kab. Fakfak Pada CV. UGAR ABADI	695.730.000,00
3	04062/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Uang Muka 50% Pekerjaan Gedung Sekretariat Kantor Organisasi Islam (Koi) Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada Cv. Tetar Sejahtera	465.555.846,78
4	07413/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan 100% Pekerjaan Gedung Sekretariat Kantor Organisasi Islam (Koi) Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada Cv. Tetar Sejahtera	465.555.846,22
5	03644/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Perencanaan Gedung Auditorium Kantor Organisasi Islami (Koi) Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada Cv Multipola	112.000.110,00
6	03645/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Perencanaan Gedung Sekretariat Kantor Organisasi Islami (Koi) Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada Cv Multipola	37.201.650,00
Jumlah			4.445.018.784,00

6) Pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi dari Bukan Aset tetap/ Persediaan tahun 2023 senilai Rp349.195.894,00 yang berasal dari Sekretariat Daerah berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	07170/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sesuai Spk: 182/028.2/Ppk/Setda/Spk/2023 Tanggal 18 Desember 2023	149.717.324,00
2	07289/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Ruangan Bagian Umum Sesuai Spk: 181/028.2/Ppk/Setda/Spk/2023 Tanggal 18 Desember 2023	99.880.324,00
3	07299/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Belanja Modal Taman Sesuai Spk: 180/028.2/Ppk/Setda/Spk/2023 Tanggal 18 Desember 2023	99.598.246,00
Jumlah			349.195.894,00

7) Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena kekurangan volume pekerjaan senilai Rp494.519.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas PUPR2KP	16.567.000,00
2	Dinas Kesehatan	477.952.000,00
Jumlah		494.519.000,00

- a) DPU(PR)2KP
 - (1) Kekurangan Volume Pekerjaan Tribun Utama (Kurang Bayar SDA Otsus) Senilai Rp2.947.000,00
 - (2) Kekurangan Volume Pekerjaan Ruang Terbuka Hijau Jalan Salasa Namudat Senilai Rp13.620.000,00
- b) Dinas Kesehatan
 - (1) Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rumah Kopel Paramedis Puskesmas Kayauni Paket 1 Senilai Rp4.485.000,00.
 - (2) Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rumah Kopel Paramedis Puskesmas Kayauni Paket 2 Senilai Rp6.397.000,00.
 - (3) Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Kayauni Paket 1 Senilai Rp2.890.000,00.
 - (4) Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Kayauni Paket 2 Senilai Rp2.890.000,00.
 - (5) Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Kayauni Senilai Rp30.425.000,00.
 - (6) Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Fakfak Timur Tengah Paket 1 Senilai Rp502.000,00.
 - (7) Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Fakfak Timur Tengah Paket 2 Senilai Rp184.000,00.
 - (8) Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Fakfak Timur Tengah Senilai Rp430.179.000,00.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp2.233.195.659.570,68	Rp2.108.241.972.380,68

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31

Desember 2023 senilai Rp2.233.195.659.570,68 terjadi penambahan senilai Rp124.953.687.190,00 atau naik 5,93% dari nilai aset jalan, irigasi dan jaringan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp2.108.241.972.380,68 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jalan	1.736.392.148.087,65
2	Jembatan	116.103.589.364,60
3	Bangunan Air Irigasi	57.455.067.792,82
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	13.815.022.596,96
5	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	155.233.393.011,23
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	7.770.516.330,00
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	37.436.547.260,75
9	Bangunan Air Kotor	2.579.790.000,00
10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	22.211.223.918,67
11	Instalasi Air Kotor	3.055.244.000,00
12	Instalasi Pembangkit Listrik	1.459.903.450,00
13	Instalasi Gardu Listrik	490.375.000,00
14	Instalasi Gas	1.634.894.700,00
15	Instalasi Pengaman	32.452.000,00
16	Jaringan Air Minum	45.359.930.925,00
17	Jaringan Listrik	23.804.350.652,00
18	Jaringan Telepon	6.793.965.500,00
19	Jaringan Gas	1.567.244.981,00
Jumlah		2.233.195.659.570,68

Ringkasan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022		2.108.241.972.380,68
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023	123.090.729.797,00	
Penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi dari Reklasifikasi Aset Tetap yang Lain	7.314.022.113,00	
penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari dana BOSP	2.100.000,00	
pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi dari reklasifikasi		3.723.416.049,00
pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi ke Hibah		379.282.671,00
pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi ke Bukan Aset Tetap/Persediaan		986.600.000,00
pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi karena kekurangan volume pekerjaan		363.866.000
Saldo akhir aset jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2023		2.233.195.659.570,68

Penjelasan atas mutasi aset jalan, jaringan dan irigasi tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Mutasi penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang berasal dari Belanja

modal tahun 2023 senilai Rp123.090.729.797,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Distrik Fakfak	148.950.000,00
2	Dinas PUPR2KP	122.370.145.797,00
3	Dinas Kesehatan	71.500.000,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	486.134.000,00
5	Dinas Perkebunan	14.000.000,00
Jumlah		123.090.729.797,00

2) Penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi dari aset tetap yang lain tahun 2023 senilai Rp7.314.022.113,00 pada DPUPR2KP dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	04077/SP2D-LS/DTU-DBH/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Uang Muka 50%% Penataan Jalan Wisata Kota Tua Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. SHINI JAYA	462.950.000,00
2	07484/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Progres 70% Penataan Jalan Wisata Kawasan Kota Tua Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. SHINI JAYA	185.180.000,00
3	04043/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Perencanaan Penataan Wisata Kawasan Kota Tua Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada PT. DIGDAYA KARYA	36.680.000,00
4	06324/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan 100% Revitalisasi Embung Di Kampung Mbima Jaya untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV ERMASU BUANA PASIFICA	312.714.722,00
5	03806/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Uang Muka 30% Revitalisasi Embung Di Kampung Mbima Jaya untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV ERMASU BUANA PASIFICA	134.020.595,00
6	03530/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Perencanaan Revitalisasi Embung Di Kampung Mbima Jaya untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV DARMA CITRA UTAMA	17.750.010,00
7	04174/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Uang Muka 50% Pembangunan Pelataran Pantai Ruas Jalan Salasa Namudat Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. GHINA JAYA SULBARINDO	455.955.818,00
8	06893/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Uang Muka 50% Pembangunan Pelataran Pantai Ruas Jalan Salasa Namudat Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. GHINA JAYA SULBARINDO	455.955.818,00
9	06893/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan Perencanaan Pembangunan Pelataran Pantai Ruas Jalan Salasa Namudat Untuk	36.480.150,00

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
		DPU(PR)2KPKabupaten Fakfak Pada CV. DHUHA ENGINEERING	
10	07419/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Pembayaran Tagihan 100% Rehabilitasi Timbunan Talud JL. DR. Salasa Namudat Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. MATADOORS ELEBES	911.960.000,00
11	04001/SP2D-LS/DBH-SDA-OTSUS/PPKD/APBD/2023	Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Irigasi Warisa Mulya	3.327.905.000,00
12	(KOR.BPK PAJE 22.1) Reklas Penataan Jalan Baru dari KIB C ke KIB D	Reklas Penataan Jalan Baru dari KIB C ke KIB D	976.470.000,00
Jumlah			7.314.022.113,00

- 3) Penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari dana BOSP tahun 2023 senilai Rp2.100.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- 4) Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi ke aset lain tahun 2023 senilai Rp3.723.416.049,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas PUPR2KP	3.637.916.049,00
2	Dinas Kesehatan	71.500.000,00
3	Dinas Perkebunan	14.000.000,00
Jumlah		3.723.416.049,00

a) Dinas PUPR2KP

Pengurangan aset jalan jaringan dan irigasi tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp3.637.916.049,00 yang direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.

b) Dinas Kesehatan

Pengurangan aset jalan, jaringan dan irigasi tahun 2023 pada Dinas Kesehatan senilai Rp71.500.000,00 yang direklasifikasi ke aset gedung dan dan bangunan yaitu belanja perencanaan penataan *landscape* dan pemptuutan talud belakang Puskesmas Tomage.

c) Dinas Perkebunan

Pengurangan aset jalan, jaringan dan irigasi tahun 2023 pada Dinas Perkebunan senilai Rp14.000.000,00 yang direklasifikasi ke aset gedung dan bangunan yaitu belanja pemeliharaan gedung (pengecetan) dan pembuatan jalan setapak rumah produksi.

- 5) Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi ke Hibah tahun 2023 senilai Rp379.282.671,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas PUPR2KP	371.294.671,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7.988.000,00
Jumlah		379.282.671,00

a) Dinas PUPR2KP

Mutasi pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi ke Hibah Tahun 2023 pada Dinas PUPR2KP senilai Rp371.294.671,00 berupa kegiatan sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	02302/SP2D-LS/SILPA/PPKD/APBD/2023	Pembayaran tagihan pengawasan renovasi tangga TPA Kampung Buton untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Darma Citra Utama	1.989.901,00
2	04281/SP2D-LS/OTSUS-1%/PPKD/APBD/2023	Pembayaran tagihan uang muka 50% pembangunan tangga wisata Pulau Ugar untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. Yawit	177.600.000,00
3	07381/SP2D-LS/OTSUS-1%/PPKD/APBD/2023	Pembayaran tagihan 100% pembangunan tangga wisata Pulau Ugar untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. Yawit	177.600.000,00
4	05823/SP2D-LS/OTSUS-1%/PPKD/APBD/2023	Pembayaran tagihan perencanaan pembangunan tangga wisata Pulau Ugar untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada PT. Nadjamurti Perkasa	14.104.770,00
Jumlah			371.294.671,00

b) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi ke Hibah Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp7.988.000,00 berupa kegiatan Pengawasan Pembangunan Pagar Sekolah SD YPK Tuberwasak Kab. Fakfak dengan Nomor SP2D: 07315/SP2D-LS/DBH-SDA-OTSUS/PPKD/APBD/2023.

6) Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi yang direklasifikasi karena bukan merupakan Aset Tetap Tahun 2023 senilai Rp986.600.000,00 pada Dinas PUPR2KP dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	07123/SP2D-LS/SILPA-OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran tagihan 100% perencanaan DAK peningkatan konektivitas (non tematik) tahun 2024 untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Uraha Consulindo	196.690.000,00
2	07449/SP2D-LS/SILPA-OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran tagihan perencanaan DAK tematik penguatan destinasi pariwisata tahun 2023 pada PT. Digdaya Karya Konsutan	198.270.000,00
3	07344/SP2D-LS/SILPA-OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran tagihan 100% perencanaan DAK tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewan) untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. Uraha Consulindo	197.940.000,00
4	06993/SP2D-LS/SILPA-OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran tagihan 100% perencanaan transportasi perdesaan - tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi untuk pembangunan inklusif daerah afirmasi untuk	197.760.000,00

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
		DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. Fighter Engineering Konsultan	
5	07450/SP2D-LS/SILPA-OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023	Pembayaran tagihan perencanaan DAK tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi tahun 2024 pada CV. Fighter	195.940.000,00
Jumlah			986.600.000,00

- 6) Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi karena kekurangan volume pekerjaan pada DPU(PR)KP senilai Rp363.866.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Strategis Mumre - Siboru Senilai Rp73.218.000,00.
 - b) Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan Longsegment Pemeliharaann Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi Lusiferi Jalan Kokas (No. Ruas 493) Senilai Rp2.750.000,00.
 - c) Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan di Fakfak Senilai Rp73.731.000,00.
 - d) Kekurangan Volume Pekerjaan Rehabilitasi Timbunan Talud JL. DR. Salasa Namudat Senilai Rp16.409.000,00.
 - e) Kekurangan Volume Pekerjaan Penataan Jalan Baru Fakfak Senilai Rp70.319.000,00.
 - f) Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, Peningkatan/ Rekonstruksi) Siboru - Sipatnanam - Teluk Patipi Senilai Rp24.004.000,00.
 - g) Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan Longsegment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Pala - Wagom -Torea (No. Ruas 426 DAK) Senilai Rp103.435.000,00.

e. Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp18.724.781.742,06	Rp17.240.024.766,06

Nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp18.724.781.742,06. Mengalami penambahan senilai Rp1.484.756.976,00 atau naik 8,61% dari saldo Aset Tetap Lainnya Tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp17.240.024.766,06 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	12.168.074.163,06
2	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	45.609.300,00
3	Barang Bercorak Kesenian	977.078.431,00
4	Alat Bercorak Kebudayaan	330.833.151,00
5	Tanda Penghargaan	419.799.497,00
6	Ternak	949.831.000,00
7	Tanaman	376.532.200,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
8	Aset Tetap Dalam Renovasi	3.457.024.000,00
Jumlah		18.724.781.742,06

Ringkasan mutasi aset tetap lainnya selama tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022		17.240.024.766,06
Penambahan aset tetap lainnya dari Reklasifikasi tahun 2023	28.873.000,00	
Penambahan aset tetap lainnya dari Belanja Modal Aset Peralatan dan Mesin dari dana BOSP	1.459.252.976,00	
Pengurangan Aset Tetap lainnya dari Buku Ekstra Kompatable		3.369.000,00
Saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2023		18.724.781.742,06

Penjelasan atas mutasi aset tetap lainnya tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Mutasi penambahan aset tetap lainnya dari reklasifikasi tahun 2023 senilai Rp28.873.000,00 pada Sekretariat Daerah yang direklasifikasi dari aset peralatan dan mesin berupa belanja modal pengadaan mebelair (ukiran kaligrafi) dengan SP2D Nomor: 06044/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023.
- 2) Mutasi penambahan aset tetap lainnya dari belanja modal yang bersumber dari Belanja Modal Peralalatan dan Mesin dari dana BOSP tahun 2023 senilai Rp1.459.252.976,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupa Belanja Buku Tematik SD Negeri dan SMP Negeri.
- 3) Mutasi Pengurangan aset tetap lainnya yang direklasifikasi ke Buku Ekstra Kompatable senilai Rp3.369.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupa Buku sebanyak 75 buah.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp96.583.389.795,33	Rp93.925.093.079,33

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum selesai dikerjakan. Nilai konstruksi dalam pengerjaan Kabupaten Fakfak pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp96.583.389.795,33. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan	93.925.093.079,33
2	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan Tahun 2023	2.348.285.667,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan Tahun 2023	310.011.049,00
Jumlah		96.583.389.795,33

Rekapan Konstruksi Dalam Pekerjaan sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Fakfak per SKPD sebagai berikut:

1) Tanah Dalam Pengerjaan

Pencatatan tanah dalam pengerjaan dimulai dari tahun 2020 yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp22.988.239.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
Tahun	Register	Nilai	Ket
2020	1	22.988.239.000,00	
2021	0	0,00	
2022	0	0,00	
2023	0	0,00	
Jumlah	1	22.988.239.000,00	

2) Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan

Pencatatan Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan dimulai dari tahun 2014 total senilai Rp38.077.566.005,37 dengan rincian sebagai berikut:

a) Dinas Kesehatan			
Tahun	Register	Nilai	Ket
2014	1	914.755.000,00	
2015	0	0,00	
2016	2	1.008.924.000,00	
2017	0	0,00	
2018	0	0,00	
2019	0	0,00	
2020	0	0,00	
2021	0	0,00	
2022	0	0,00	
2023	0	0,00	
Jumlah	3	1.923.679.000,00	

b) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
Tahun	Register	Nilai	Ket
2014	1	73.656.000,00	
2015	0	0,00	
2016	2	512.044.000,00	
2017	0	0,00	
2018	0	0,00	
2019	0	0,00	
2020	0	0,00	
2021	0	0,00	
2022	0	0,00	
2023	0	0,00	
Jumlah	3	585.700.000,00	

c) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
Tahun	Register	Nilai (Rp)	Ket
2014	0	0,00	
2015	2	132.270.000,00	
2016	0	0,00	
2017	5	1.281.182.119,52	



2018	8	5.917.484.000,00	
2019	7	8.173.840.000,00	
2020	12	7.499.508.000,00	
2021	1	198.950.000,00	
2022	2	5.189.074.000,57	
2023	1	2.348.285.667,00	
Jumlah	38	30.740.593.787,09	

d) Sekretariat Daerah			
Tahun	Register	Nilai (Rp)	Ket
2014	0	0,00	
2015	0	0,00	
2016	0	0,00	
2017	2	115.940.000,00	
2018	0	0,00	
2019	0	0,00	
2020	0	0,00	
2021	0	0,00	
2022	0	0,00	
2023	0	0,00	
Jumlah	2	115.940.000,00	

e) RSUD			
Tahun	Register	Nilai (Rp)	Ket
2014	0	0,00	
2015	0	0,00	
2016	0	0,00	
2017	0	0,00	
2018	0	0,00	
2019	0	0,00	
2020	1	1.016.200.000,00	
2021	1	1.013.072.000,82	
2022	0	0,00	
2023	0	0,00	
Jumlah	2	2.029.272.000,82	

f) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Tahun	Register	Nilai (Rp)	Ket
2014	2	320.721.000,80	
2015	0	0,00	
2016	0	0,00	
2017	0	0,00	
2018	0	0,00	
2019	0	0,00	
2020	0	0,00	
2021	0	0,00	
2022	0	0,00	
2023	0	0,00	
Jumlah	2	320.721.000,80	

g) Dinas Perhubungan			
Tahun	Register	Nilai (Rp)	Ket
2014	0	0,00	
2015	0	0,00	
2016	0	0,00	
2017	0	0,00	
2018	0	0,00	
2019	0	0,00	
2020	1	1.978.291.000,70	
2021	0	0,00	
2022	0	0,00	
2023	0	0,00	
Jumlah	1	1.978.291.000,70	
Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan : a + b + ... + g = Rp38.077.566.005,37			

3) Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan

Pencatatan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan dimulai dari tahun 2012 total senilai Rp310.011.049,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
Tahun	Register	Nilai	Ket
2012	1	1.432.951.000,68	
2013	2	2.398.236.000,70	
2014	3	4.859.790.000,00	
2015	0	0,00	
2016	3	3.084.650.000,00	
2017	1	29.940.000,00	
2018	2	345.520.000,00	
2019	0	0,00	
2020	4	1.053.964.001,30	
2021	4	17.093.620.001,31	
2022	1	739.918.000,10	
2023	8	3.637.915.001,05	
Jumlah	29	34.676.504.005,14	

b) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
Tahun	Register	Nilai	Ket
2012	0	0,00	
2013	0	0,00	
2014	0	0,00	
2015	0	0,00	
2016	0	0,00	
2017	0	0,00	
2018	0	0,00	
2019	0	0,00	
2020	0	0,00	
2021	1	22.495.000,00	
2022	0	0,00	

b) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
2023	0	0,00	
Jumlah	1	22.495.000,00	

c) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Tahun	Register	Nilai	Ket
2012	0	0,00	
2013	1	441.655.000,78	
2014	0	0,00	
2015	0	0,00	
2016	1	749.700.000,00	
2017	0	0,00	
2018	1	10.600.000,00	
2019	0	0,00	
2020	0	0,00	
2021	0	0,00	
2022	0	0,00	
2023	0	0,00	
Jumlah	3	1.201.955.000,78	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan : a + b + c = Rp310.011.049,00			

Ringkasan mutasi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022		93.925.093.079,33
Penambahan aset konstruksi dalam pengerjaan yang direklasifikasi dari aset tetap	6.181.291.716,00	
Pengurangan aset konstruksi dalam pengerjaan yang direklasifikasi ke aset tetap		3.139.614.519,00
Saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2023		96.966.770.276,33

1) Penambahan konstruksi dalam pengerjaan tahun 2023 yang direklasifikasi dari aset tetap senilai Rp6.564.672.197,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas PUPR2KP	5.986.201.716,00
2	Dinas Perhubungan	195.090.000,00
Jumlah		6.181.291.716,00

a) Dinas PUPR2KP

Mutasi penambahan konstruksi dalam pengerjaan tahun 2023 yang direklasifikasi dari aset tetap pada Dinas PUPR2KP senilai Rp5.986.201.716,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pembangunan Sport center dan Kuliner Tahap II	2.348.285.667,00
2	Pembangunan Jalan, jaringan dan irigasi	3.637.916.049,00
Jumlah		5.986.201.716,00

(1) Pembangunan Sport center dan Kuliner Tahap II

Pembangunan Sport center dan Kuliner Tahap II pada Dinas

PUPR2KP yang masuk dalam Kontstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 senilai Rp2.348.285.667,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	No SP2D	Uraian	Nilai (Rp)	Nilai Kontrak
1	04066/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Tagihan uang muka 50% pembangunan sport center dan kuliner tahap II untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Ghina Jaya Sulbarindo	1.128.372.539,00	2.256.745.077,21
2	07003/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Tagihan 100% pembangunan sport center dan kuliner tahap II untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Ghina Jaya Sulbarindo	1.128.372.538,00	
3	04369/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Tagihan 100% perencanaan pembangunan sport center dan kuliner tahap II untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada PT. Inovasi Konsulindo Raya	91.540.590,00	91.540.590,00
Jumlah			2.348.285.667,00	2.348.285.667,21

(2) Pembangunan Jalan, jaringan dan irigasi

Pembangunan Jalan, jaringan dan irigasi pada Dinas PUPR2KP yang masuk dalam Kontstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 senilai Rp3.637.916.049,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	No SP2D	Uraian	Nilai (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)
1	04077/SP2D-LS/DTU-DBH/PPKD/APBD/2023	Tagihan uang muka 50%% penataan jalan wisata kota tua untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Shini Jaya	462.950.000	925.900.000,00
2	07484/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Tagihan progres 70% penataan jalan wisata kawasan kota tua untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Shini Jaya	185.180.000,00	
3	04043/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/APBD/2023	Tagihan perencanaan penataan wisata kawasan kota tua untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada PT. Digdaya Karya	36.680.000	36.680.000,00
4	04345/SP2D-LS/DBH-SDA OTSUS/PPKD/APBD/2023	Tagihan uang muka 50% pembangunan jalan lingkungan Kampung Rumbati untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Linkom	314.000.000	628.000.000,00
5	03126/SP2D-LS/DBH-SDA-	Tagihan perencanaan pembangunan jalan	24.900.000	24.900.000,00



No	No SP2D	Uraian	Nilai (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)
	OTSUS/PPKD/APBD/2023	lingkungan Kampung Rumbati untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Kepada PT. Nadjamurti Perkasa		
6	03740/SP2D-LS/PPKD/APB D/2023	Tagihan uang muka 50% pembangunan jaringan drainase Kabupaten Fakfak (Saluran di Kayu Besi) untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Ndamber Indah	116.017.737	232.035.474,00
7	07466/SP2D-LS/PPKD/APB D/2023	Tagihan progres 80% pembangunan jaringan drainase Kabupaten Fakfak (saluran di Kayu Besi) untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Ndamber Indah	69.610.642	
8	04046/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/AP BD/2023	Tagihan uang muka 50%% pembangunan saluran di RSUD Fakfak untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Palamas Sejahtera	93.742.000	187.484.000,00
9	07462/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/AP BD/2023	Tagihan progres 70% pembangunan saluran di RSUD Fakfak untuk DPUPR2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Palamas Sejahtera	37.496.800	
10	03556/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/AP BD/2023	Tagihan perencanaan pembangunan saluran di RSUD Fakfak untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV Darma Citra Utama	7.500.270	7.500.270,00
11	03339/SP2D-LS/PPKD/APB D/2023	Tagihan uang muka 50% normalisasi sungai di Distrik Bomberay untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Syapma Indah	454.805.000	909.610.000,00
12	04544/SP2D-LS/PPKD/APB D/2023	Tagihan progress 70% normalisasi sungai di Distrik Bomberay untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Syapma Indah	181.922.000	
13	04042/SP2D-LS/PPKD/APB D/2023	Tagihan perencanaan normalisasi sungai di Distrik Bomberay untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada PT. Inovasi Konsulindo Raya	36.400.000	36.400.000,00
14	04193/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/AP BD/2023	Tagihan uang muka 50% pembangunan bak reservoir Tanama Atas Kampung Tanama Distrik Pariwari untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV Sorpeha Abadi Sirken	438.940.000	877.880.000,00
15	07452/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/AP	Tagihan progres 60% pembangunan bak reservoir Tanama Atas	87.788.000	

No	No SP2D	Uraian	Nilai (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)
	BD/2023	Kampung Tanama Distrik Pariwari untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Sorpeha Abadi Sirken		
16	04372/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/AP BD/2023	Tagihan 100% perencanaan pembangunan bak reservoir Tanama Atas Kampung Tanama Distrik Pariwari untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Darma Anugrah Konsultan	35.808.600	35.808.600,00
17	04280/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/AP BD/2023	Tagihan uang muka 50% pengadaan dan pemasangan pipa GIP 3" Distrik Fakfak Tengah untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Kemer Pikpok	499.745.000	999.490.000,00
18	07135/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/AP BD/2023	Tagihan perencanaan pengadaan dan pemasangan pipa GIP 3" Distrik Fakfak Tengah untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada PT. Inovasi Konsulindo Raya	42.390.000	42.390.000,00
19	03895/SP2D-LS/DBH-SDA-OTSUS/PPKD/APBD/2023	Tagihan uang muka 50% pembangunan jaringan pipanisasi Torea untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Sosar Jaya Utama	335.340.000	670.680.000,00
20	05469/SP2D-LS/DTU-DAU/PPKD/AP BD/2023	Tagihan uang muka 50% lanjutan pembangunan jaringan pipanisasi Torea untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. Sosar Jaya Utama	149.900.000	299.800.000,00
21	03283/SP2D-LS/DBH-SDA-OTSUS/PPKD/APBD/2023	Perencanaan pembangunan jaringan pipanisasi Torea untuk DPU(PR)2KP Kab. Fakfak pada CV. Mitra Patria Konsultan	26.800.000	26.800.000,00
Jumlah			3.637.916.049,00	5.941.358.344,00

b) Dinas Perhubungan

Mutasi penambahan konstruksi dalam pengerjaan tahun 2023 yang direklasifikasi dari aset tetap pada Dinas Perhubungan senilai Rp195.090.000,00 berupa kegiatan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (Distrik Wartutin) Nomor SP2D: 03133/SP2D-LS/OTSUS-DTI/PPKD/APBD/2023 dengan nilai kontraknya Rp650.300.000,00

- 2) Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan tahun 2023 yang direklasifikasi ke aset tetap senilai Rp3.327.905.000,00 pada Dinas PUPR2KP yaitu

pembangunan jaringan irigasi D.I Kampung Warisa Mulya, dengan rincian sebagai berikut:

No	No SP2D	Uraian	Nilai (Rp)	Nilai Kontrak
1	1323/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2021	Pembayaran Tagihan Uang Muka Sebesar 30% Atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Irigasi Warisa Mulya untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Fakfak pada CV. Balatana Papua Berkarya	1.996.743.000,00	6.655.810.000,00
2	4891/SP2D-LS/DAK/PPKD/APBD/2021	Pembayaran Tagihan Progress Sebesar 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Irigasi Warisa Mulya untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kab. Fakfak pada CV. Balatana Papua Berkarya	1.331.162.000,00	
Jumlah			3.327.905.000,00	6.655.810.000,00

g. Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp(2.322.271.353.218,12)	Rp(2.114.269.407.606,06)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset milik Pemerintah Kabupaten Fakfak dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember tahun 2023 senilai Rp(2.322.271.353.218,12). Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Fakfak menggunakan metode garis lurus.

Uraian	Akumulasi Penyusutan (Rp)			
	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah
Saldo 31-12-2022 (Audited)	(359.816.336.013,06)	(142.716.140.048,00)	(1.611.736.931.545,00)	(2.114.269.407.606,06)
Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan	138.183.868,00	(2.945.436,00)	(339.209.942,00)	(203.971.510,00)
Saldo 01-01-2023	(359.678.152.145,06)	(142.719.085.484,00)	(1.612.076.141.487,00)	(2.114.473.379.116,06)
Penambahan :				
- Penyusutan tahun 2023	(43.165.822.057,06)	(21.076.520.595,00)	(92.975.117.516,00)	(157.217.460.168,06)
Saldo per 31-12-2023	(404.955.494.845,12)	(164.920.267.522,00)	(1.752.395.590.851,00)	(2.322.271.353.218,12)

4. Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp103.428.171.700,32	Rp51.447.164.614,99

Nilai aset lainnya Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp103.428.171.700,32 mengalami kenaikan senilai Rp51.981.007.085,33 atau naik 101,04% jika dibandingkan dengan saldo aset lainnya tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp51.447.164.614,99. Aset lainnya Kabupaten Fakfak bisa dilihat pada rincian berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan / (Pengurangan) (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran	530.293.723,00	(530.293.723,00)	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.710.764.242,99	0,00	7.710.764.242,99
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.133.520.000,00	0,00	1.133.520.000,00
4	Aset Tidak Berwujud Lainnya	11.640.539.265,00	3.397.788.225,00	15.038.327.490,00
5	Aset Lain-Lain	38.980.199.393,00	22.418.236.291,33	61.398.435.684,33
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(17.008.409.717,00)	0,00	(17.008.409.717,00)
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	8.393.749.042,00	26.761.784.958,00	35.155.534.000,00
Jumlah		51.447.164.614,99	51.981.007.085,33	103.428.171.700,32

a. Tagihan Penjualan Angsuran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp0,00	Rp530.293.723,00

Tagihan Penjualan Angsuran sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp0,00, tidak ada penambahan terhadap tagihan penjualan angsuran selama tahun 2023. Adapun koreksi senilai Rp530.293.723,00 merupakan koreksi atas tagihan penjualan angsuran yang telah dibayarkan dan telah direklasifikasi ke bagian lancar tagihan penjualan angsuran, namun angka tersebut masih disajikan pada tahun - tahun sebelumnya.

b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp7.710.764.242,99	Rp7.710.764.242,99

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara senilai Rp7.710.764.242,99 adalah merupakan saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah ditindaklanjuti dengan pembuatan SKTJM di tahun 2015 dan tahun 2019. Rincian Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)	Setoran s/d Tahun 2023 (Rp)	Koreksi Tahun 2023 (Rp)	Sisa SKTJM (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	307.803.416,00	0,00	0,00	307.803.416,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.250.000,00	(3.000.000,00)	0,00	44.250.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	183.544.869,00	0,00	0,00	183.544.869,00
4	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	742.824.250,00	0,00	0,00	742.824.250,00
5	BPPKAD (Badan Promosi dan Investasi)	75.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	65.000.000,00
6	BPPKAD (PPKD)	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
7	Sekretariat Daerah	790.297.326,99	(203.000.000,00)	0,00	587.297.326,99
8	Sekretariat DPRD	3.475.594.772,00	(131.045.000,00)	0,00	3.344.549.772,00
9	Badan Kepegawaian Daerah	137.150.025,00	(37.500.000,00)	0,00	99.650.025,00
10	Distrik Kokas	304.661.878,00	(2.000.000,00)	0,00	302.661.878,00
11	Kelurahan Wagon	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Badan Pemberdayaan Masyarakat	28.839.705,00	(28.839.705,00)	0,00	0,00
13	Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	5.512.500,00	(5.512.500,00)	0,00	0,00
14	Paskalis Rahangmetan	6.682.700,00	0,00	0,00	6.682.700,00
15	Edi Gunawan	26.500.006,00	0,00	0,00	26.500.006,00
Jumlah		8.131.661.447,99	(420.897.205,00)	0,00	7.710.764.242,99

c. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp1.133.520.000,00	Rp1.133.520.000,00

Pemerintah Kabupaten Fakfak telah melakukan kerja sama pemanfaatan dengan PT. Rimbun Menara Papua atas pengelolaan Hotel Grand Papua berupa Bangun Guna Serah (BGS) berdasarkan perjanjian kerja sama Pembangunan Hotel Grand Papua antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan PT. Rimbun Menara Papua nomor 556.2/558-b/BUP/2003 dan nomor 008/RMP-BD/VI/03 tanggal 26 Juni 2003 yang di-addendum dengan perjanjian nomor 640/743/BUP/2003 dan nomor 56/RMP-BD/X/05 tanggal 31 Desember 2005 tentang perubahan perjanjian nomor 556.2/558-b/Bup/2003 dan nomor 008/RMP-BD/VI/03 serta perjanjian penyertaan terbatas dengan pola bagi hasil dalam pengelolaan hotel bintang tiga di Fakfak yang ditandatangani Bupati Fakfak selaku PIHAK PERTAMA dan Direktur Utama PT. Rimbun Menara Papua selaku PIHAK KEDUA. Dalam perjanjian kerja sama tersebut telah diatur beberapa hal yang intinya antara lain:

- 1) Pihak pertama memberi hak guna bangunan atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Fakfak seluas 4.723 m² senilai Rp1.133.520.000,00 kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan hotel Grand Papua dengan jangka waktu 30 tahun terhitung sejak didaftarkan;

- 2) Apabila hak guna bangunan telah berakhir, maka segala bangunan yang berada di atasnya dan segala sesuatu yang melekat padanya menjadi milik PIHAK PERTAMA;
- 3) PIHAK PERTAMA akan menerima bagi hasil sebesar 5,4% dari laba bersih pengelolaan hotel setelah dikurangi pajak, dan akan diserahkan untuk pertama kalinya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terhitung sejak dicapai *Break Event Point* (BEP);
- 4) Pada Tahun 2023 PT. Rimbun Menara Papua telah menyetor hasil pengelolaan hotel Grand Papua senilai Rp77.336.445,00.

d. Aset Tak Berwujud	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp15.038.327.490,00	Rp11.640.539.265,00

Sampai dengan 31 Desember 2023 saldo aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Fakfak senilai Rp15.038.327.490,00 terjadi kenaikan senilai Rp3.397.788.225,00 dari saldo tahun 2022 yang hanya senilai Rp11.640.539.265,00. Rincian saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan / (Pengurangan)	Saldo 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
2	RSUD	0,00	290.000.000,00	290.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.093.655.180,00	2.279.013.225,00	7.372.668.405,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	69.267.000,00	0,00	69.267.000,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	356.000.000,00	0,00	356.000.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	499.205.700,00	0,00	499.205.700,00
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	244.511.331,00	0,00	244.511.331,00
9	Dinas Perkebunan	57.825.000,00	0,00	57.825.000,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.141.220.328,00	179.775.000,00	1.320.995.328,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.150.115.426,00	0,00	3.150.115.426,00
12	Badan Pendapatan Daerah	0,00	649.000.000,00	649.000.000,00
13	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber	581.839.300,00	0,00	581.839.300,00

No	SKPD	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan / (Pengurangan)	Saldo 2023 (Rp)
	Daya Manusia			
14	Inspektorat	379.000.000,00	0,00	379.000.000,00
Jumlah		11.640.539.265,00	3.397.788.225,00	15.038.327.490,00

Ringkasan mutasi aset tak berwujud selama tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2022		11.640.539.265,00
Belanja modal aset tak berwujud tahun 2023	1.118.775.000,00	
Penambahan aset tak berwujud yang berasal dari reklasifikasi barang dan jasa tahun 2023	2.279.013.225,00	
Pengurangan aset tak berwujud yang berasal dari reklasifikasi barang dan jasa tahun 2023		0,00
Saldo akhir aset tak berwujud per 31 Desember 2023		15.038.327.490,00

- 1) Penambahan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal tahun 2023 senilai Rp1.118.775.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	179.775.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	290.000.000,00
3	Badan Pendapatan Daerah	649.000.000,00
Jumlah		1.118.775.000,00

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Mutasi penambahan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp179.775.000,00 berupa Belanja Modal *Software* dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	06925/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Tagihan 100% atas pengembangan Aplikasi Simonefa tahun 2023	99.975.000,00
2	06934/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Tagihan 100% atas pembuatan aplikasi sistem potensi ekonomi daerah tahun anggaran 2023	79.800.000,00
Jumlah			179.775.000,00

- b) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Penambahan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp290.000.000,00 berupa belanja modal *software* dengan SP2D Nomor: 03014/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023.

- c) Badan Pendapatan Daerah

Mutasi penambahan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal pada Badan Pendapatan Daerah senilai Rp649.000.000,00 berupa belanja modal *software* dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Uraian	Nilai (Rp)
1	02506/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Tagihan pekerjaan pengadaan aplikasi dashboard pajak pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023	99.800.000,00
2	02507/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Tagihan pekerjaan pengadaan aplikasi SIMPATDA pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023	199.750.000,00
3	02508/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Tagihan pekerjaan pengadaan aplikasi BPHTP pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023	149.650.000,00
4	02509/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Tagihan pekerjaan pengadaan aplikasi e-SPTPD pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023	99.850.000,00
5	02510/SP2D-LS/PPKD/APBD/2023	Tagihan pekerjaan pengadaan aplikasi e-SPPT pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023	99.950.000,00
Jumlah			649.000.000,00

2) Penambahan aset tak berwujud yang berasal dari reklasifikasi barang dan jasa tahun 2023 senilai Rp2.279.013.225,00 yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

e. Aset Lain-Lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp61.398.435.684,33	Rp39.046.708.059,00

Aset Lain-Lain merupakan reklasifikasi suatu aset yang belum ada bukti kepemilikan, aset yang akan dihibahkan kepada masyarakat/organisasi, atau aset yang akan dilakukan penghapusan.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 senilai Rp61.398.435.684,33. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Investasi non permanen sapi gaduhan	1.788.925.000,00
2	Ganti rugi buka pemalangan aset instansi lain	50.000.000,00
3	Reklasifikasi dari aset peralatan mesin	2.176.387.628,00
4	Aset yang tercatat pada aset jalan namun bukan merupakan aset jalan	1.178.965.000,00
5	Aset tetap lainnya berupa hewan ternak	639.144.000,00
6	Aset tak berwujud yang sudah tidak dipergunakan lagi	10.015.650.400,00
7	Aset dalam kondisi rusak berat/hilang/lainnya	5.941.100.020,00
8	Aset yang sudah di bongkar namun belum dihapuskan	305.991.667,00
9	Aset Pasar Thumburuni yang akan dihapuskan	18.138.800.000,00
10	Aset Tetap yang akan dihibahkan	6.208.319.360,00
11	Temuan Kelebihan Pembayaran pada LHP BPK TA 2023	1.800.164.666,00
12	Investasi Jangka Panjang Permanen PD. Mbiah Pahi	14.343.243.599,33
13	Akumulasi penyusutan aset lain-lain	(1.188.255.656,00)
Jumlah		61.398.435.684,33

Penjelasan saldo Aset Lain-Lain sebagai berikut:

- 1)** Investasi non permanen Sapi Gaduhan senilai Rp1.788.925.000,00 merupakan investasi non permanen pada Dinas Pertanian dan Peternakan yang hingga saat ini sudah tidak lagi berada dalam penguasaan pengguna barang atau masyarakat sehingga akan dihapuskan dari inventaris kekayaan daerah yang telah ditetapkan penghapusannya dengan Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor: 520-167 Tahun 2015 Tanggal 5 Juni 2015 tentang Penghapusan Sapi Gaduh/Sapi Gulir pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Fakfak. Penghapusan sapi gaduhan belum dapat dilakukan karena pada Surat Keputusan Bupati tersebut di atas belum dicantumkan nilai sapi gaduhannya. Pencatatan di neraca akan dilakukan setelah terbit SK perubahan tentang penghapusan sapi gaduhan.
- 2)** Ganti rugi buka pemalangan aset instansi lain yang dicatat pada aset tanah senilai Rp50.000.000,00 merupakan pembayaran ganti rugi atas pemalangan tanah milik instansi lain yakni tanah milik Bulog senilai Rp30.000.000,00 dan tanah milik Kantor Pos senilai Rp20.000.000,00.
- 3)** Reklasifikasi dari aset peralatan mesin senilai Rp2.176.387.628,00 yang direklasifikasi ke aset lain-lain terdiri dari:
 - a)** Aset peralatan dan mesin sepeda motor Rp1.069.335.028,00 merupakan sisa hasil temuan BPK sesuai dengan LHP BPK RI Nomor 23.B/LHP/XIX.MAN/11/2012, tanggal 02 November 2012 yang sebagian sudah ditindaklanjuti;
 - b)** Aset peralatan dan mesin sepeda motor senilai Rp60.000.000,00 merupakan aset milik pemerintah pusat yang belum dihibahkan ke pemerintah daerah namun sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah yang kini dikuasai oleh Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - c)** Aset peralatan dan mesin yang sudah rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi senilai Rp126.360.000,00;
 - d)** Aset peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor yang dipinjamkaikan kepada instansi lain namun masih tercatat dalam neraca senilai Rp920.692.600,00.
- 4)** Aset yang tercatat sebagai aset jalan namun sesungguhnya bukan merupakan aset jalan adalah pembersihan lahan dan pengecatatan talud senilai Rp1.178.965.000,00.
- 5)** Aset tetap lainnya berupa hewan ternak Kambing Etawa yang akan dihapuskan karena asetnya sudah tidak ada lagi (mati) senilai Rp639.144.000,00 pada Dinas Pertanian dan Peternakan.

- 6) Aset tak berwujud yang sudah tidak dipergunakan lagi dan akan dihapuskan senilai Rp10.015.650.400,00.
- 7) Aset dalam kondisi rusak berat/hilang/lainnya dan akan dihapus senilai Rp5.941.100.020,00.
- 8) Aset Gedung dan Bangunan yang sudah dibongkar dan akan dihapuskan senilai Rp305.991.667,00 merupakan Gedung Ruang Perawatan Anak pada RSUD Fakfak yang telah dibongkar dan dibangun kembali.
- 9) Aset Pasar Thumburuni yang akan dihapuskan senilai Rp18.138.800.000,00, dengan rincian SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	17.336.576.000,00
2	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	314.824.000,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	487.400.000,00
Jumlah		18.138.800.000,00

- 10) Aset tetap yang akan dihibahkan merupakan aset yang berasal dari belanja hibah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dihibahkan kepada penerima dengan rician sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga	2.403.633.162,00
2	DPU(PR)2KP	3.749.288.784,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.263.722,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	41.133.692,00
Jumlah		6.208.319.360,00

- a) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang dikerjakan pada tahun anggaran 2023, dan telah dimanfaatkan namun belum terdapat BAST penyerahannya senilai Rp2.403.633.162,00 terdiri dari:
- (1) Pekerjaan Pembangunan satu ruang laboratorium SMP PGRI Fakfak senilai Rp923.304.121,00.
 - (2) Pekerjaan Pembangunan Gedung sekolah PAUD Khalifah senilai Rp500.417.000,00.
 - (3) Pekerjaan Pembangunan dua rumah guru SD YPK SUM senilai Rp497.971.041,00.
 - (4) Pekerjaan Pembangunan Pagar SD YPK Werba senilai Rp481.941.000,00.
- b) DPU(PR)2KP senilai Rp3.749.288.784,00 terdiri dari:
- (1) Gedung Auditorium KOI senilai Rp2.668.975.331,00.
 - (2) Gedung Sekretariat Kantor KOI Rp931.111.693,00.
 - (3) Perencanaan Gedung Auditorium KOI senilai Rp112.000.110,00.
 - (4) Perencanaan Gedung Sekretariat KOI senilai Rp37.201.650,00.

- c) Dinas Kelautan dan Perikanan berupa Penyediaan Sarana Penunjang Pembudidayaan Ikan Air Tawar (Otsus Spesific Grant 1,25%) senilai Rp14.263.722,00.
 - d) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp41.133.692,00.
- 11) Temuan kelebihan pembayaran pada LHP BPK TA 2023 senilai Rp1.800.164.666,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada 31 Desember 2023, dengan rincian:

No	Jenis Temuan	Nilai (Rp)
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan Fisik TA 2023	1.074.295.000,00
2	Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas TA 2023	633.369.666,00
3	Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial TA 2023	92.500.000,00
Jumlah		1.800.164.666,00

Tabel tersebut dirinci sebagai berikut:

- a) Kelebihan pembayaran pekerjaan Fisik TA 2023 yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetor senilai Rp1.074.295.000,00 dengan rincian:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	38.404.000,00
2	Dinas Kesehatan	477.952.000,00
3	DPU(PR)2KP	385.257.000,00
5	Dinas Perhubungan	172.682.000,00
Jumlah		1.074.295.000,00

No.	Nama Pekerjaan	Kurang Volume (Rp)
Dinas Pendidikan		
1	Pembangunan 1 Ruang Laboratorium SMP PGRI Fakfak	6.701.000,00
2	Pembangunan Gedung Sekolah PAUD Khalifah	10.683.000,00
3	Pembangunan 2 Unit Rumah Guru SD YPK SUM	3.261.000,00
4	Pembangunan Pagar SD YPK Werba	17.759.000,00
Jumlah Kelebihan Pembayaran Fisik Dinas Pendidikan		38.404.000,00
Dinas Kesehatan		
1	Pembangunan Rumah Kopel Paramedis Puskesmas Kayauni Paket 1	4.485.000,00
2	Pembangunan Rumah Kopel Paramedis Puskesmas Kayauni Paket 2	6.397.000,00
3	Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Kayauni Paket 1	2.890.000,00
4	Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Kayauni Paket 2	2.890.000,00
5	Pembangunan Puskesmas Kayauni	30.425.000,00
6	Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Fakfak Timur Tengah Paket 1	502.000,00
7	Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Fakfak Timur Tengah Paket 2	184.000,00
8	Pembangunan Puskesmas Fakfak Timur Tengah	430.179.000,00

No.	Nama Pekerjaan	Kurang Volume (Rp)
Jumlah Kelebihan Pembayaran Fisik Dinas Kesehatan		477.952.000,00
Dinas Pekerjaan Umum		
1	Pembangunan Jalan Desa Strategis Mumre - Siboru	73.218.000,00
2	Penanganan Longsegment Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi Lusiferi Jalan Kokas (No. Ruas 493)	2.750.000,00
3	Pemeliharaan Periodik Jalan Di Fakfak	73.731.000,00
4	Pembangunan Gedung Auditorium Kantor Organisasi Islam	4.824.000,00
5	Pekerjaan Tribun Utama (Kurang Bayar SDA Otsus)	2.947.000,00
6	Pekerjaan Ruang Terbuka Hijau Jalan Salasa Namudat	13.620.000,00
7	Pekerjaan Rehabilitasi Timbunan Talud Jl. DR Salasa Namudat	16.409.000,00
8	Pekerjaan Penataan Jalan Baru Fakfak (Kurang Bayar SDA Otsus)	70.319.000,00
9	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Siboru - S. Nanam - Teluk Patipi.	24.004.000,00
10	Penanganan Longsegment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Pala - Wagom -Torea (No. Ruas 426 DAK)	103.435.000,00
Jumlah Kelebihan Pembayaran Fisik Dinas Pekerjaan Umum		385.257.000,00
Dinas Perhubungan		
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Distrik Wartutin)	172.682.000,00
Jumlah Kelebihan Pembayaran Fisik Dinas Perhubungan		172.682.000,00

b) Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah pada TA 2023 namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetor senilai Rp633.369.666,00 terdiri dari:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	DPUPR2KP	471.980.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	34.632.000,00
3	Sekretariat DPRD	126.757.666,00
Jumlah		633.369.666,00

- (1) DPUPR2KP senilai Rp471.980.000,00 berupa Kelebihan Pembayaran uang transportasi pada belanja perjalanan dinas.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp34.632.000,00 berupa Kelebihan Pembayaran uang transportasi pada belanja perjalanan dinas dan kelebihan pembayaran uang harian.
- (3) Sekretariat DPRD senilai Rp126.757.666,00 berupa Kelebihan Pembayaran uang transportasi pada belanja perjalanan dinas dan kelebihan pembayaran uang representasi.
- c) Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah pada TA 2023 namun sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp92.500.000,00, merupakan temuan penyetoran bansos ke

mahasiswa yang tidak aktif kuliah pada TA 2023 dan harus dikembalikan ke kas daerah.

12) Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Mbiah Pahi yang direklas ke aset lain-lain sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Fakfak Nomor: 900.1.13.2/488/BUP/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 senilai Rp14.343.243.599,33.

13) Akumulasi penyusutan aset lain-lain senilai Rp(1.188.255.656,00) yaitu merupakan akumulasi penyusutan aset pasar thumburuni yang direklas ke aset lain-lain karena akan dihapuskan dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(1.136.854.486,00)
2	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(28.687.362,00)
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(22.713.808,00)
Jumlah		(1.188.255.656,00)

f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp(17.008.409.717,00)	Rp(17.008.409.717,00)

Sampai dengan 31 Desember 2023 saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Fakfak senilai Rp(17.008.409.717,00), saldonya masih sama dengan tahun sebelumnya yang merupakan akumulasi penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-sewa, pada SKPD berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	(3.900.000,00)
2	Dinas Kesehatan	(163.335.386,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(2.596.651.002,00)
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(94.397.325,00)
5	Dinas Perhubungan	(1.254.447.364,00)
6	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	(78.933.333,00)
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(319.162.091,00)
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(3.577.500,00)
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(1.049.171.258,00)
10	Dinas Perkebunan	(19.666.875,00)
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(1.837.500,00)
12	Sekretariat Daerah	(643.861.145,00)
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(10.434.447.894,00)
14	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	(39.863.642,00)
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(305.157.402,00)
Jumlah		(17.008.409.717,00)

g. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp35.155.534.000,00	Rp8.393.749.042,00

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) adalah Fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2023 saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Pemerintah Kabupaten Fakfak senilai Rp35.155.534.000,00.

5.3.2. Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp191.282.066,00	Rp5.407.076.200,00

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Fakfak yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 senilai Rp191.282.066,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	13.222.789,00	7.295.723,00
Utang Belanja	43.300.000,00	2.347.353.764,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	134.759.277,00	3.052.426.713,00
Jumlah	191.282.066,00	5.407.076.200,00

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp13.222.789,00	Rp7.295.723,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp13.222.789,00. Jumlah tersebut merupakan pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Utang PFK terdiri dari:

No	Uraian	Saldo (Rp)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	(3.000,00)
2	Utang PPh Pusat	1.587.095,00
3	Utang PPN Pusat	11.638.694,00
Jumlah		13.222.789,00

2. Utang Belanja	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp43.300.000,00	Rp2.347.353.764,00

Jumlah utang belanja Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp43.300.000,00 yang merupakan :

- a. Utang Belanja Barang dan Jasa pada DPU(PR)2KP senilai Rp19.900.000,00 yaitu Pekerjaan Pengadaan Pipa di Danaweria pada CV. UGAR SEJAHTERA dengan Nomor Kontrak 02/PPK/Dnwr-fisik/DPUPR2KP-FF/XII/2022 yang pekerjaannya telah selesai 100% di tahun 2022 namun sampai dengan 31 Desember 2023

belum dibayarkan.

- b. Sisa pembayaran gaji pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp23.400.000,00.

3. Utang Jangka Pendek	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Lainnya	Rp134.759.277,00	Rp3.052.426.713,00

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp134.759.277,00 merupakan Utang Pengadaan Aset Tetap yang belum sempat terbayarkan sedangkan progres pekerjaan sudah 100% pada beberapa SKPD dengan mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo (Rp)
Saldo Awal	3.052.426.713,00
Penambahan :	
-	0,00
Jumlah Penambahan	0,00
Pengurangan :	
Pembayaran utang DPU(PR)2KP	2.917.667.436,00
Jumlah Pengurangan	2.917.667.436,00
Jumlah	134.759.277,00

Utang Pengadaan Aset Tetap teradapat pada beberapa SKPD sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	44.800.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	89.959.277,00
Jumlah		134.759.277,00

a. Utang Pengadaan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan

Utang Pengadaan Aset Tetap senilai Rp44.800.000,00 adalah sisa utang tahun 2018 merupakan belanja modal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sisa utang tersebut oleh pihak ketiga **tidak akan** ditagih lagi ke Pemerintah Kabupaten Fakfak, namun belum adanya pernyataan tertulis dari pihak ketiga sehingga masih dicatat ke dalam neraca. Utang tersebut akan dihapuskan apabila sudah ada pernyataan secara tertulis dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa utang tersebut tidak akan ditagih lagi ke Pemerintah Kabupaten Fakfak.

b. Utang Pengadaan Aset Tetap pada Dinas PUPR2KP

Utang Pengadaan Aset Tetap pada Dinas PUPR2KP TA 2022 yang belum dibayarkan 100% padahal pekerjaan fisik sudah 100% senilai Rp134.759.277,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Pembayaran 2023 (Rp)	Sisa Utang 2023 (Rp)
1	Kekurangan pembayaran pekerjaan Perencanaan Pematangan Kuburan Umum pada DPUPR2KP yang belum dibayarkan 100% padahal pekerjaan fisik 100% pada	39.800.000,00	0,00	39.800.000,00



No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Pembayaran 2023 (Rp)	Sisa Utang 2023 (Rp)
	tahun 2020.			
2	sisa utang Pekerjaan pematangan lahan bandara siboru TA 2019 pada DPUPR2KP yang sudah selesai 100% di 31 Desember 2020 yang dibayarkan pada TA 2020. Namun ada kesalahan perhitungan pemotongan uang muka pada saat pembayaran progress 100% sehingga terjadi kekurangan pembayaran senilai Rp932.299.181,00. Pada tahun 2021 telah dibayarkan dengan SP2D Nomor : 3847/SP2D-LS/PPKD/APBD/2021 tanggal 21 Desember 2021 senilai Rp932.299.000,00, sehingga masih terdapat sisa utang senilai Rp181,00	181,00	0,00	181,00
3	Tagihan 100% Atas Pekerjaan Optimalisasi SPAM IKK Teluk Patipi Kabupaten Fakfak Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. CAHAYA MBOYAN	1.120.169.032,00	1.120.169.032,00	0,00
4	Pembayaran Tagihan 100% atas Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kab. Fakfak Pada CV. UGAR ABADI	695.730.000,00	695.730.000,00	0,00
5	Pembayaran Belanja Pengadaan Alat Angkutan Apung Bermotor Perahu Kasko Fiber Glass Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. CITTA FAJAR UTAMA	29.960.000,00	29.960.000,00	0,00
6	Pembayaran Belanja Pengadaan Alat Angkutan Apung Bermotor Mesin Jhonson Tempel Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. CITTA FAJAR UTAMA	58.818.000,00	58.818.000,00	0,00
7	Pembayaran Tagihan Pengawasan Pembangunan Pipanisasi Di Kampung Tarak Untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak Pada CV. FAKTOR REKAYASA KONSULTAN	11.990.000,00	0,00	11.990.000,00
8	Pembayaran Tagihan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Sarana Penangkap Air (Catchment Area) Di Air Besar Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. MBAHAM TEKNIK KONSULTAN	40.000.000,00	39.999.588,00	412,00
9	Pembayaran Tagihan 100% Atas Pengawasan Renovasi Tangga TPA Kampung Buton Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. DARMA CITRA UTAMA	1.990.000,00	1.989.901,00	99,00
10	Pembayaran Tagihan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Di Distrik Karas Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada PT. INOVASI KONSULINDO RAYA	17.890.000,00	17.889.000,00	1.000,00
11	Pembayaran Tagihan Pengawasan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Di Distrik Furwagi (LPB, LPA dan LAPEN) Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. MITRA PATRIA KONSULTAN	156.700.000,00	156.700.000,00	0,00
12	Pembayaran Tagihan Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Tanama (DBH-SDA-OTSUS) Untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak Pada CV. DARMA CITRA UTAMA	5.890.000,00	5.889.710,00	290,00



No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Pembayaran 2023 (Rp)	Sisa Utang 2023 (Rp)
13	Pembayaran Tagihan Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan STIKIP Fakfak pada CV. DARMA CITRA UTAMA	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00
14	Pembayaran Tagihan 100% Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Kinam (DBH-SDA-OTSUS) Untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak pada CV. KOMBIMUR	699.786.500,00	699.786.500,00	0,00
15	Pembayaran Tagihan Pengawasan Pembangunan Saluran Koramil-Magefa pada CV. DARMA CITRA UTAMA	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
16	Pembayaran Tagihan Pengawasan Pembangunan Talud Rumah Negara Tahap II Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. DARMA CITRA UTAMA	4.000.000,00	3.999.871,00	129,00
17	Pembayaran Tagihan 100 % Atas Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Kantor Distrik Kramomongga Kokas (DBH-SDA-OTSUS) untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. DARMA CITRA UTAMA	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
18	Pembayaran Pengawasan Pembangunan Talud GKI Klasis Kokas pada CV. DARMA CITRA UTAMA	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00
19	Pembayaran Tagihan 100% Atas Pengawasan Pengecoran Jalan KOREM FAKFAK (DBH-SDA-OTSUS) Untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak Pada CV. DARMA CITRA UTAMA	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00
20	Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih Tanama Atas pada CV. Siara Konsultan	13.417.000,00	0,00	13.417.000,00
21	Pengawasan Saluran Kuburan Lusiperi pada CV. FAYA KUNTURA SENTOSA	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
22	Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Di Kampung Mambunibuni CV. FAYA KUNTURA SENTOSA	19.750.000,00	19.749.834,00	166,00
23	Pengawasan Pembangunan Talud Rumah Negara	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
24	Pengawasan Pembangunan Talud di Mambruk Dalam pada CV. DARMA CITRA UTAMA	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00
25	Pembayaran Pengawasan Pembangunan Saluran Pengadiln Wagom (DBH-SDA-OTSUS) untuk DPU(PR)2KP Kabupaten Fakfak pada CV. DARMA CITRA UTAMA	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
26	Pengawasan Pembuatan Jaringan sampah pada CV. DARMA CITRA UTAMA	3.996.000,00	3.996.000,00	0,00
Jumlah		3.007.626.713,00	2.917.667.436,00	89.959.277,00

5.3.3. Ekuitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp2.637.442.708.241,55	Rp2.619.756.353.397,81

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Fakfak, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp2.637.442.708.241,55 mengalami kenaikan senilai Rp17.686.354.843,74 atau naik sebesar 0,68% jika dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 yang tercatat senilai Rp2.619.756.353.397,81.

5.3.4. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp2.637.633.990.307,55	Rp2.625.163.429.597,81

Jumlah kewajiban Kabupaten Fakfak tahun 2023 senilai Rp191.282.066,00 yang keseluruhannya merupakan kewajiban jangka pendek; sedangkan jumlah ekuitas Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp2.637.442.708.241,55, sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp2.637.633.990.307,55. Mengalami kenaikan senilai Rp12.470.560.709,74 atau naik sebesar 0,48% jika dibandingkan dengan jumlah kewajiban dan ekuitas tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp2.625.163.429.597,81.

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Transfer, dan Pos Luar Biasa.

Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Kode	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN - LO	1.339.229.636.871,05	1.195.601.641.375,59	143.627.995.495,46	12,01
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	47.635.366.024,45	45.025.960.730,59	2.609.405.293,86	5,80
7.1.1	Pajak Daerah - LO	9.973.841.753,86	8.165.075.689,10	1.808.766.064,76	22,15
7.1.2	Retribusi Daerah - LO	3.446.922.122,51	9.535.591.852,38	(6.088.669.729,87)	-63,85
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	4.169.644.947,00	4.826.937.576,19	(657.292.629,19)	-13,62
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	30.044.957.201,08	22.498.355.612,92	7.546.601.588,16	33,54
7.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	1.291.380.830.846,60	1.150.575.680.645,00	140.805.150.201,60	12,24
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	1.274.081.364.998,60	1.133.630.770.366,00	140.450.594.632,60	12,39
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO	17.299.465.848,00	16.944.910.279,00	354.555.569,00	2,09
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	213.440.000,00	0,00	213.440.000,00	0
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	213.440.000,00	0,00	213.440.000,00	0

Kode	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8	BEBAN DAERAH	1.259.637.798.531,81	1.151.015.559.798,69	108.622.238.733,12	9,44
8.1	BEBAN OPERASI	1.039.777.520.611,75	912.642.776.771,00	127.134.743.840,75	13,93
8.1.1	Beban Pegawai	460.447.979.710,00	421.118.378.833,00	39.329.600.877,00	9,34
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	498.072.030.053,43	423.821.157.266,44	74.250.872.786,99	17,52
8.1.5	Beban Hibah	62.656.125.284,00	46.971.286.121,00	15.684.839.163,00	33,39
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	18.029.857.500,00	16.207.690.140,00	1.822.167.360,00	11,24
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	571.528.064,32	4.524.264.410,56	(3.952.736.346,24)	(87,37)
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	157.217.460.168,06	166.082.761.414,69	(8.865.301.246,63)	(5,34)
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	43.165.822.057,06	38.373.224.320,69	4.792.597.736,37	12,49
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.076.520.595,00	19.874.416.025,00	1.202.104.570,00	6,05
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	92.975.117.516,00	107.835.121.069,00	(14.860.003.553,00)	(13,78)
8.3	BEBAN TRANSFER	62.642.817.752,00	72.290.021.613,00	(9.647.203.861,00)	(13,35)
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	62.642.817.752,00	72.290.021.613,00	(9.647.203.861,00)	(3,35)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		79.591.838.339,24	44.586.081.576,90	35.005.756.762,34	78,51
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	79.646.060.540,24	44.586.081.576,90	35.059.978.963,34	78,63
POS LUAR BIASA		13.669.273.920,00	11.709.031.570,00	1.960.242.350,00	16,74
8.4.1	Beban Tak Terduga	13.669.273.920,00	11.709.031.570,00	1.960.242.350,00	16,74
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(13.669.273.920,00)	(11.709.031.570,00)	(1.960.242.350,00)	16,74
SURPLUS/DEFISIT-LO		65.922.564.419,24	32.877.050.006,90	33.045.514.412,34	100,51

5.4.1. KEGIATAN OPERASIONAL

1. Pendapatan Daerah– LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2023 senilai Rp1.339.229.636.871,05 mengalami kenaikan senilai Rp143.627.995.495,46 atau meningkat sebesar 12,01% dari Realisasi pendapatan – LO pada tahun 2022 yang hanya senilai Rp1.195.601.641.375,59 yang terdiri dari:

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	47.635.366.024,45	45.025.960.730,59	2.609.405.293,86	5,80
2	Pendapatan Transfer-LO	1.291.380.830.846,60	1.150.575.680.645,00	140.805.150.201,60	12,24
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	213.440.000,00	0,00	213.440.000,00	0,00
Jumlah		1.339.229.636.871,05	1.195.601.641.375,59	143.627.995.495,46	12,01

a. Pendapatan Asli Daerah – LO

Realisasi pendapatan asli daerah – LO tahun 2023 senilai Rp47.635.366.024,45, mengalami kenaikan senilai Rp2.609.405.293,86 atau meningkat 5,80% jika dibandingkan dengan saldo pendapatan asli daerah - LO tahun sebelumnya yang

hanya senilai Rp45.025.960.730,59 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	%
1	Pajak Daerah-LO	9.973.841.753,86	8.165.075.689,10	1.808.766.064,76	22,15
2	Retribusi Daerah-LO	3.446.922.122,51	9.535.591.852,38	(6.088.669.729,87)	(63,85)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	4.169.644.947,00	4.826.937.576,19	(657.292.629,19)	(13,62)
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	30.044.957.201,08	22.498.355.612,92	7.546.601.588,16	33,54
Jumlah		47.635.366.024,45	45.025.960.730,59	2.609.405.293,86	5,80

1) Pajak Daerah – LO

Realisasi pendapatan pajak daerah – LO tahun 2023 senilai Rp9.973.841.753,86 mengalami kenaikan senilai Rp1.808.766.064,76 atau meningkat 22,15% jika dibandingkan dengan saldo Pajak Daerah - LO tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp8.165.075.689,10. Rincian pendapatan pajak daerah – LO tahun 2023 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pajak Hotel - LO	803.345.593,00
2	Pajak Restoran - LO	3.261.129.098,00
3	Pajak Hiburan - LO	19.786.365,00
4	Pajak Reklame - LO	125.436.500,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	2.449.118.928,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	5.858.320,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	2.548.991.999,86
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	760.174.950,00
Jumlah		9.973.841.753,86

2) Retribusi Daerah – LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah – LO tahun 2023 senilai Rp3.446.922.122,51 mengalami penurunan senilai Rp6.088.669.729,87 atau turun sebesar 63,85% jika dibandingkan dengan saldo Retribusi Daerah - LO tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp9.535.591.852,38. Rincian pendapatan retribusi daerah – LO tahun 2023 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	3.019.495.310,51
2	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	427.426.812,00
Jumlah		3.446.922.122,51

a) Retribusi Jasa Umum - LO

Jumlah retribusi jasa umum - LO Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp3.019.495.310,51 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	149.494.001,51

No	Uraian	Nilai (Rp)
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	2.354.138.309,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	59.520.000,00
4	Retribusi Los-LO	455.943.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	400.000,00
Jumlah		3.019.495.310,51

b) Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Jumlah retribusi perizinan tertentu - LO Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp 427.426.812,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	220.161.712,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	300.000,00
3	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO	206.965.100,00
Jumlah		427.426.812,00

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO tahun 2023 senilai Rp4.169.644.947,00, mengalami penurunan senilai Rp657.292.629,19 atau turun sebesar 13,62% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp4.826.937.576,19. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Bank Papua.

4) Lain-lain PAD yang Sah – LO

Realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2023 senilai Rp30.044.957.201,08, mengalami kenaikan senilai Rp7.546.601.588,16 atau naik sebesar 33,54% jika dibandingkan dengan saldo lain-lain PAD yang sah - LO tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp22.498.355.612,92. Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO menurut objek pendapatan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	821.113.948,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	419.936.445,00
3	Jasa Giro-LO	1.367.628.858,24
4	Pendapatan Bunga-LO	40.360.756,00
5	Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain-LO	2.149.943.717,84
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	558.901.800,00
7	Pendapatan dari Pengembalian-LO	419.227.472,00
8	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	24.267.844.204,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
Jumlah		30.044.957.201,08

a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan- LO tahun 2023 senilai Rp821.113.948,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	823.785.813,00
2	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO	(2.671.865,00)
Jumlah		821.113.948,00

b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO

Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan - LO tahun 2023 senilai Rp419.936.445,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hasil Sewa BMD-LO	42.300.000,00
2	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO	377.636.445,00
Jumlah		419.936.445,00

c) Pendapatan Jasa Giro - LO

Jumlah pendapatan jasa giro - LO tahun 2023 senilai Rp1.367.628.858,24 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.305.512.475,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	57.411.995,24
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	175.603,00
4	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	4.528.785,00
Jumlah		1.367.628.858,24

d) Pendapatan Bunga-LO

Jumlah pendapatan bunga - LO tahun 2023 senilai Rp40.360.756,00 yang merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah berupa bunga deposito di Bank BRI.

e) Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain-LO

Jumlah penerimaan komisi potongan, atau bentuk lain - LO tahun 2023 senilai Rp2.149.943.717,84.

f) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Jumlah pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan - LO tahun 2023 senilai Rp558.901.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
1	DPUPR2KP	Setoran pengembalian denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan ponndok pesantren Muhammadiyah pada Dinas PUPR An. CV. Ugar Sejahtera TA 2022	3.010.000,00

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
2	DPUPR2KP	Setoran pengembalian denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pondok Pasantren Muhammadiyah An. CV Darma Citra Utama pada Dinas DPUPR Kab. Fakfak TA 2022	230.000,00
3	DPUPR2KP	Setoran pengembalian denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah tokoh masyarakat An. CV. Renggo Konsultan pada Dinas DPUPR Kab. Fakfak TA 2022	70.000,00
4	DPUPR2KP	Setoran pengembalian denda keterlambatan pekerjaan atas pekerjaan rekonstruksi /peningkatan kapasitas struktur jalan Bomberay-Goras TA 2022 Pada Dinas PUPR	51.012.800,00
5	DPUPR2KP	Setoran keterlambatan pekerjaan pembayaran atas pekerjaan rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan di Distrik Furwagi An. CV.Almukhlis Pratama Mandiri pada Dinas PUPR Kab. Fakfak TA 2022	41.797.000,00
6	DPUPR2KP	Setoran denda keterlambatan pekerjaan atas pekerjaan rekonstruksi / peningkatanana kapasitas struktur jalan di Distrik Furwagi An. CV. Almukhlis Pratama Mandiri pada Dinas DPUPR Kab. Fakfak TA 2022	1.695.000,00
7	DPUPR2KP	Setoran atas denda keterlambatan pekerjaan rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan (Fakfak-Waserat) An. CV Mekampuder Jaya pada Dinas PUPR Kab. Fakfak TA 2022	87.942.000,00
8	DPUPR2KP	Setoran pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan pematangan Bandara Siboru sisi darat An. PT. Aulia Mitra Dewata pada Dinas PUPR Kab. Fakfak TA 2021	150.000.000,00
9	DPUPR2KP	Setoran pengembalian kelebihan pembayarana atas pekerjaan pematangan Bandara Siboru sisi darat TA 2021 An. PT. Aulia Mitra Dewata pada Dinas PUPR Kab. Fakfak	89.190.000,00
10	Dinas Kesehatan	Setoran pengembalian denda untuk paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Tomage An. CV. Iskarif pada Dinas Kesehatan Kab. Fakfak TA 2022	30.000.000,00
11	Dinas Kesehatan	Setoran pengembalian denda untuk paket pekerjaan renovasi Puskesmas Fakfak Kota An. CV. Pusaka Papua pada Dinas Kesehatan Kab. Fakfak TA 2022	20.000.000,00
12	Dinas Kesehatan	Setoran pengembalian kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan pengadaan barangn (refokusing) An. PT. Sinar Medika Papua pada Dinas kesehatan TA 2021	17.770.000,00
13	Dinas Kesehatan	Setoran pengembalian kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan pengadaan barang (refokusing) An. PT. Karya Sindo Papua pada Dinas Kesehatan TA 2021	43.578.000,00
14	Dinas Perhubungan	Setoran atas perhitungan denda keterlambatan pekerjaan pematangan Bandara Siboru sisi darat an. cv. Mbaham Sejahtera pada Dinas Perhubungan Kab. Fakfk TA 2022	17.061.000,00
15	DISKOMINFO	Setoran pengembalian nilai denda kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan akses internet pada Dinas KOMINFO Kab. Fakfak TA 2022	5.546.000,00
Jumlah			558.901.800,00

g) Pendapatan dari Pengembalian - LO

Jumlah pendapatan dari pengembalian - LO tahun 2023 senilai

Rp419.227.472,00, yang merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

h) **Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO**

Jumlah pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)-LO tahun 2023 senilai Rp24.267.844.204,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Fasilitas Kesehatan/Instansi	Nilai
1	Puskesmas Weri	208.048.675,00
2	Puskesmas Bomberay	227.355.355,00
3	Puskesmas Fakfak Kota	1.677.824.161,00
4	Puskesmas Fakfak Tengah	831.779.739,00
5	Puskesmas Werba	365.584.713,00
6	Puskesmas Sekban	771.953.544,00
7	Puskesmas Karas	212.342.307,00
8	Puskesmas Kokas	248.850.922,00
9	Puskesmas Kramongmongga	295.350.894,00
10	Puskesmas Degen	312.135.352,00
11	BPKAD	19.116.618.542,00
Jumlah		24.267.844.204,00

Salah satu pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersumber dari BPKAD dan bukan dari RSUD. Hal ini disebabkan karena dana tersebut tidak dianggarkan di RSUD tapi dianggarkan di BPKAD, sehingga secara aplikasi pendapatannya hanya bisa diinput di BPKAD.

b. **Pendapatan Transfer – LO**

Realisasi pendapatan transfer – LO tahun 2023 senilai Rp1.291.380.830.846,60, mengalami kenaikan senilai Rp140.805.150.201,60 atau naik sebesar 12,24% jika dibandingkan dengan jumlah saldo pendapatan transfer - LO tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp1.150.575.680.645,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.274.081.364.998,60	1.133.630.770.366,00	140.450.594.632,60	12,39
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	17.299.465.848,00	16.944.910.279,00	354.555.569,00	2,09
Jumlah		1.291.380.830.846,60	1.150.575.680.645,00	140.805.150.201,60	12,24

1) **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO**

Pendapatan transfer pemerintah pusat - LO tahun 2023 senilai Rp1.274.081.364.998,60, mengalami kenaikan senilai Rp140.450.594.632,60 atau naik sebesar 12,39% jika dibandingkan dengan saldo pendapatan transfer pemerintah pusat - LO tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp1.133.630.770.366,00, terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dana Perimbangan - LO	993.887.808.664,60
2	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur - LO	280.193.556.334,00
Jumlah		1.274.081.364.998,60

a) Dana Perimbangan - LO

Dana perimbangan - LO tahun 2023 senilai Rp993.887.808.664,60 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	155.772.318.593,60
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	655.353.979.578,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	101.638.056.848,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	81.123.453.645,00
Jumlah		993.887.808.664,60

b) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur - LO

Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur - LO tahun 2023 senilai Rp280.193.556.334,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat- LO	244.634.217.334,00
2	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO	35.559.339.000,00
Jumlah		280.193.556.334,00

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Pendapatan transfer antar daerah - LO tahun 2023 senilai Rp17.299.465.848,00, mengalami kenaikan senilai Rp354.555.569,00 atau naik sebesar 2,09% jika dibandingkan dengan saldo pendapatan transfer antar daerah - LO tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp16.944.910.279,00 dan merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	1.913.073.326,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	1.319.207.484,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	9.426.188.447,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	4.640.996.591,00
Jumlah		17.299.465.848,00

c. **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah - LO tahun 2023 senilai Rp213.440.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp213.440.000,00 jika dibandingkan dengan saldo lain-lain pendapatan yang sah - LO tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp0,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO merupakan Pendapatan Hibah-LO berupa penambahan aset tanah yang berasal dari hibah masyarakat untuk pembangunan tower pemancar seluler.

2. **Beban Daerah**

Beban daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Pemerintah Kabupaten Fakfak tahun 2023 senilai Rp1.259.637.798.531,81 mengalami kenaikan senilai Rp108.622.238.733,12 atau naik sebesar 9,44% jika dibandingkan dengan beban daerah tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp1.151.015.559.798,69 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Operasi	1.039.777.520.611,75	912.642.776.771,00	127.134.743.840,75	13,93
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	157.217.460.168,06	166.082.761.414,69	(8.865.301.246,63)	(5,34)
3	Beban Transfer	62.642.817.752,00	72.290.021.613,00	(9.647.203.861,00)	(13,35)
Jumlah		1.259.637.798.531,81	1.151.015.559.798,69	108.622.238.733,12	9,44

a. **Beban Operasi**

Jumlah beban operasi Tahun 2023 senilai Rp1.039.777.520.611,75, mengalami kenaikan senilai Rp127.134.743.840,75 atau naik sebesar 13,93% jika dibandingkan dengan saldo beban operasi tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp912.642.776.771,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Pegawai	460.447.979.710,00	421.118.378.833,00	39.329.600.877,00	9,34
2	Beban Barang dan Jasa	498.072.030.053,43	423.821.157.266,44	74.250.872.786,99	17,52
3	Beban Hibah	62.656.125.284,00	46.971.286.121,00	15.684.839.163,00	33,39
4	Beban Bantuan Sosial	18.029.857.500,00	16.207.690.140,00	1.822.167.360,00	11,24
5	Beban Penyisihan Piutang	571.528.064,32	4.524.264.410,56	(3.952.736.346,24)	(87,37)
Jumlah		1.039.777.520.611,75	912.642.776.771,00	127.134.743.840,75	13,93

1) **Beban Pegawai**

Beban pegawai tahun 2023 adalah senilai Rp460.447.979.710,00, mengalami kenaikan senilai Rp39.329.600.877,00 atau naik sebesar 9,34% jika dibandingkan dengan saldo beban pegawai tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp421.118.378.833,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	293.780.762.365,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	118.325.382.534,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	32.158.042.000,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	11.591.773.419,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	161.638.323,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	554.114.893,00
7	Beban Pegawai BOS	3.876.266.176,00
Jumlah		460.447.979.710,00

a) **Beban Gaji dan Tunjangan ASN**

Beban gaji dan tunjangan ASN tahun 2023 adalah senilai Rp293.780.762.365,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Gaji Pokok ASN	202.687.493.298,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	17.138.434.455,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.370.426.500,00
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	10.913.984.000,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.661.440.851,00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	18.039.078.896,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	359.800.173,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	3.027.317,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.401.444.004,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	413.821.149,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.219.435.214,00
12	Beban Tunjangan Khusus	23.572.376.508,00
Jumlah		293.780.762.365,00

b) **Beban Tambahan Penghasilan ASN**

Beban tambahan penghasilan ASN tahun 2023 adalah senilai Rp118.325.382.534,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	114.777.018.399,00
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.548.364.135,00
Jumlah		118.325.382.534,00

c) **Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun 2023 adalah senilai Rp32.158.042.000,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
----	--------	------------

1	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	23.577.785.200,00
2	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.411.986.800,00
3	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.524.500.000,00
4	Beban Honorarium	1.643.770.000,00
Jumlah		32.158.042.000,00

d) **Beban Gaji Dan Tunjangan DPRD**

Beban gaji dan tunjangan DPRD tahun 2023 adalah senilai Rp11.591.773.419,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Uang Representasi DPRD	453.524.400,00
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	28.606.200,00
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	40.844.880,00
4	Beban Uang Paket DPRD	38.682.000,00
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	45.942.210,00
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	23.659.572,00
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	419.659.572,00
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	458.832.888,00
11	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.640.736.304,00
12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.264.000.000,00
13	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	2.914.893,00
Jumlah		11.591.773.419,00

e) **Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

Beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH tahun 2023 adalah senilai Rp161.638.323,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	55.955.440,00
2	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
3	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	724.200,00
4	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.191.803,00
5	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.920,00
6	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.241.600,00
7	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	102.960,00
8	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	140.400,00
Jumlah		161.638.323,00

f) **Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

Beban penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2023 adalah senilai Rp554.114.893,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	154.114.893,00
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
Jumlah		554.114.893,00

g) **Beban Pegawai BOS**

Beban pegawai BOS tahun 2023 adalah senilai Rp3.876.266.176,00 yang merupakan beban pegawai pada penggunaan Dana BOS di Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri.

2) **Beban Barang dan Jasa**

Beban barang dan jasa tahun 2023 adalah senilai Rp498.072.030.053,43, mengalami kenaikan senilai Rp74.250.872.786,99 atau naik sebesar 17,52% jika dibandingkan dengan saldo beban barang dan jasa tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp423.821.157.266,44 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Barang	204.546.218.897,38
2	Beban Jasa	151.399.185.845,05
3	Beban Pemeliharaan	12.660.675.392,00
4	Beban Perjalanan Dinas	105.853.741.758,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.447.712.100,00
6	Beban Barang Ekstra Komtable	1.239.423.287,00
7	Beban Barang dan Jasa BOS	10.492.306.778,00
8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.432.839.263,00
9	Beban Barang dan Jasa BLUD	(73.267,00)
Jumlah		498.072.030.053,43

a) **Beban Barang**

Beban barang tahun 2023 adalah senilai Rp204.546.218.897,38 yang merupakan beban barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.664.888.495,00
2	Beban Bahan Kimia	1.377.896.289,00
3	Beban Bahan Bakar dan Pelumas	21.360.151.435,00
4	Beban Bahan/Bibit Tanaman	759.008.370,00
5	Beban Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	25.000.000,00
6	Beban Suku Cadang Alat Pertanian	325.129.835,00
7	Beban Alat Tulis Kantor	3.936.554.392,00
8	Beban Kertas dan Cover	5.434.114.674,00
9	Beban Bahan Cetak	9.737.955.087,00
10	Beban Benda Pos	344.007.794,00
11	Beban Bahan Komputer	3.743.107.995,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
12	Beban Perabot Kantor	3.239.755.575,00
13	Beban Alat Listrik	670.313.848,00
14	Beban Perlengkapan Dinas	406.607.650,00
15	Beban Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.359.405.153,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.450.153.939,00
17	Beban Obatan-Obat	(1.562.253.424,64)
18	Beban Obat-Obatan Lainnya	399.406.500,00
19	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	64.738.419.403,02
20	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	21.325.782.719,00
21	Beban Natura	7.532.852.338,00
22	Beban Pakan	329.656.200,00
23	Beban Makanan dan Minuman Rapat	18.686.983.366,00
24	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.251.760.492,00
25	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	448.776.000,00
26	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.685.676.021,00
27	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.068.464.000,00
28	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.022.099.098,00
29	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	33.300.000,00
30	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	122.975.000,00
31	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.000.000,00
32	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	518.849.840,00
33	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	753.781.500,00
34	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	13.492.710,00
35	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	191.852.000,00
36	Beban Pakaian Penyelamatan	45.701.676,00
37	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	724.476.000,00
38	Beban Pakaian Batik Tradisional	1.051.793.535,00
39	Beban Pakaian Olahraga	1.072.058.750,00
40	Beban Pakaian Paskibraka	436.388.956,00
41	Beban Pakaian Jas/Safari	17.980.000,00
42	Beban Komponen-Attachment	(542.662.350,00)
43	Beban Komponen-Komponen Lainnya	(7.666.441.963,00)
Jumlah		204.546.218.897,38

b) Beban Jasa

Beban jasa tahun 2023 senilai Rp151.399.185.845,05 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	137.362.579.599,05
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	728.435.468,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.980.091.280,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	6.481.013.498,00
5	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	994.588.000,00
6	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	404.000.000,00
7	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.448.478.000,00
Jumlah		151.399.185.845,05

c) **Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan tahun 2023 senilai Rp12.660.675.392,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.913.099.017,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	732.576.375,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000,00
Jumlah		12.660.675.392,00

d) **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas tahun 2023 senilai Rp105.853.741.758,00 yang merupakan beban perjalanan dinas dalam daerah.

e) **Beban Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat tahun 2023 senilai Rp6.447.712.100,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	1.040.412.500,00
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	5.407.299.600,00
Jumlah		6.447.712.100,00

f) **Beban Barang Ekstra Komptable**

Beban barang ekstra komptable tahun 2023 senilai Rp1.239.423.287,00. yang merupakan beban Reklas aset peralatan dan mesin ke ekstrakomptable.

g) **Beban Barang dan Jasa BOS**

Beban Barang dan Jasa BOS tahun 2023 senilai Rp10.492.306.778,00 yang merupakan beban barang dan jasa pada penggunaan Dana BOS di Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri.

h) **Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas**

Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas tahun 2023 senilai

Rp5.432.839.263,00 yang merupakan beban barang dan jasa pada penggunaan Dana BOK Puskesmas.

3) Beban Hibah

Beban hibah tahun 2023 senilai Rp62.656.125.284,00, mengalami kenaikan senilai Rp15.684.839.163,00 atau naik sebesar 33,39% jika dibandingkan dengan saldo beban hibah tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp46.971.286.121,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.126.666.807,00
2	Beban Hibah Dana BOS	12.122.770.852,00
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	406.687.625,00
Jumlah		62.656.125.284,00

a) Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Beban hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia tahun 2023 senilai Rp50.126.666.807,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	25.336.270.800,00
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	24.823.293.421,00
3	Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Keci	22.500.000,00
4	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	(55.397.414,00)
Jumlah		50.126.666.807,00

b) Beban Hibah Dana BOS

Beban hibah dana BOS tahun 2023 senilai Rp12.122.770.852,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	28.092.000,00
2	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	12.094.678.852,00
Jumlah		12.122.770.852,00

c) Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Beban hibah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2023 adalah senilai Rp406.687.625,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai Politik	Nilai (Rp)
1	Partai Gerindra	32.097.475,00
2	Partai Perindo	34.343.025,00

No	Partai Politik	Nilai (Rp)
3	Partai Nasdem	50.733.225,00
4	Partai Hanura	26.263.675,00
5	Partai Bulan Bintang	27.849.450,00
6	Partai PKS	33.717.975,00
7	Pdi Perjuangan	35.257.450,00
8	Partai Demokrat	20.290.975,00
9	Partai Kebangkitan Bangsa	44.112.325,00
10	Partai Golkar	79.242.450,00
11	Partai PAN	22.779.600,00
Jumlah		406.687.625,00

4) **Beban Bantuan Sosial**

Jumlah beban bantuan sosial tahun 2023 senilai Rp18.029.857.500,00, mengalami kenaikan senilai Rp1.822.167.360,00 atau naik sebesar 11,24% jika dibandingkan dengan saldo beban bantuan sosial tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp16.207.690.140,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	12.414.547.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.615.310.500,00
Jumlah		18.029.857.500,00

a) **Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu**

Beban bantuan sosial uang kepada individu tahun 2023 senilai Rp12.414.547.000,00 yang dilaksanakan di beberapa SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	440.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.100.000.000,00
3	Sekretariat Daerah	10.874.547.000,00
Jumlah		12.414.547.000,00

b) **Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**

Beban bantuan sosial uang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) tahun 2023 senilai Rp5.615.310.500,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak berupa bantuan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan pemerintah daerah dan bantuan iuran PBPU Mandiri Kelas 3 Tahun 2023.

5) **Beban Penyisihan Piutang**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 senilai Rp571.528.064,32, mengalami penurunan senilai Rp3.952.736.346,24 atau turun 87,37% jika

dibandingkan dengan saldo Beban Penyisihan Piutang tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp4.524.264.410,56 berupa beban penyisihan piutang pajak daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyisihan Pajak Reklame	12.812,50
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	571.515.251,82
Jumlah		571.528.064,32

b. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi tahun 2023 senilai Rp157.217.460.168,06, mengalami penurunan senilai Rp8.865.301.246,63 atau turun sebesar 5,34% jika dibandingkan dengan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp166.082.761.414,69 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Naik/(Turun)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	43.165.822.057,06	38.373.224.320,69	4.792.597.736,37	12,49
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.076.520.595,00	19.874.416.025,00	1.202.104.570,00	6,05
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	92.975.117.516,00	107.835.121.069,00	(14.860.003.553,00)	(13,78)
Jumlah		157.217.460.168,06	166.082.761.414,69	(8.865.301.246,63)	(5,34)

1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Jumlah beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2023 senilai Rp43.165.822.057,06 yang merupakan Beban Penyusutan Alat Kantor. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan senilai Rp4.792.597.736,37 atau naik sebesar 12,49% jika dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp38.373.224.320,69.

2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2023 senilai Rp21.076.520.595,00 yang merupakan Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan senilai Rp1.202.104.570,00 atau naik sebesar 6,05% jika dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp19.874.416.025,00.

3) Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jumlah Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 senilai Rp92.975.117.516,00, yang merupakan Beban Penyusutan Jalan Kabupaten, mengalami penurunan senilai Rp14.860.003.553,00 atau turun sebesar

13,78% jika dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp107.835.121.069,00.

c. Beban Transfer

Jumlah beban Transfer tahun 2023 senilai Rp62.642.817.752,00 yang merupakan beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yaitu Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari APBD, mengalami penurunan senilai Rp9.647.203.861,00 atau turun sebesar 13,35% jika dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp72.290.021.613,00.

5.4.2. SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI

Jika dibandingkan antara realisasi pendapatan-LO tahun 2023 senilai Rp1.339.229.636.871,05 dengan beban-LO tahun 2023 senilai Rp1.259.637.798.531,81 maka Pemerintah Kabupaten Fakfak tahun 2023 mengalami surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp79.591.838.339,24.

5.4.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan non operasional tahun 2023 senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO senilai Rp0,00.
2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO senilai Rp0,00.
3. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO senilai Rp0,00.
4. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO senilai Rp0,00.

5.4.4. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa senilai Rp79.591.838.339,24 mengalami kenaikan senilai Rp35.005.756.762,34 atau naik 78,51% jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp44.586.081.576,90. Berikut adalah perhitungan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa:

A	Surplus / Defisit Dari Operasi	79.591.838.339,24	
B	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	0,00	
C	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	79.591.838.339,24	C = A + B

5.4.5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Saldo Pos Luar Biasa tahun 2023 senilai Rp13.669.273.920,00, mengalami kenaikan senilai Rp1.960.242.350,00 atau naik 16,74% jika dibandingkan dengan saldo pos Luar Biasa tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp11.709.031.570,00 yang merupakan beban tak terduga.

5.4.6. SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa tahun 2023 senilai Rp(13.669.273.920,00) dengan

perhitungan sebagai berikut:

A	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	0,00	
B	Pos Luar Biasa	13.669.273.920,00	
C	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	(13.669.273.920,00)	C = A - B

5.4.7 SURPLUS/(DEFISIT) – LO

Berdasarkan realisasi Pendapatan – LO dan Beban tahun anggaran 2023 dihasilkan Surplus – LO senilai Rp65.922.564.419,24 dengan perhitungan sebagai berikut:

A	Pendapatan – LO	1.339.229.636.871,05	
B	Beban	1.259.571.289.865,81	
C	Surplus/(Defisit) Dari Operasi	79.591.838.339,24	C = A - B
D	Surplus/(Defisit) Dari Keg. Non Operasional	0,00	
E	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	79.591.838.339,24	E = C + D
F	Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	(13.669.273.920,00)	
G	SURPLUS/(DEFISIT) – LO	65.922.564.419,24	G = E + F

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan keluar kas dan setara kas pemerintah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal pelaporan.

Laporan Arus Kas yang disajikan dalam Laporan Keuangan ini adalah LAK menurut SAP yang menggambarkan aliran kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran yang terjadi di Bendaharawan Umum Daerah.

Ringkasan laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

5.5.1. Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Fakfak selama tahun 2023 senilai Rp202.429.850.819,54 dengan perincian sebagai berikut.

Arus Kas Masuk	Rp1.429.229.006.401,59
Arus Kas Keluar	Rp1.226.799.155.582,05
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp202.429.850.819,54

5.5.2. Laporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk

meningkatkan operasi pemerintah dan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang.

Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Fakfak selama tahun 2023 senilai Rp(279.232.142.958,74) dengan perincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk	Rp990.543.980,00
Arus Kas Keluar	Rp280.222.686.938,74
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp(279.232.142.958,74)

5.5.3. Laporan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto yang tidak mempengaruhi anggaran.

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Fakfak selama tahun 2023 senilai Rp66.140.689,00 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk	Rp105.723.375.350,00
Arus Kas Keluar	Rp105.657.234.661,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp66.140.689,00

5.5.4. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Penurunan kas selama periode tahun 2023 senilai Rp(76.736.151.450,20) menunjukkan adanya defisit realisasi APBD tahun 2023 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih kecil dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan penurunan kas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	202.429.850.819,54
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(279.232.142.958,74)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	66.140.689,00
Jumlah		(76.736.151.450,20)

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas senilai Rp41.876.709.764,73 merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Fakfak yang ada di BUD per 31 Desember 2023. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Kenaikan / (Penurunan) Kas	(76.736.151.450,20)
Saldo Awal Kas	118.612.861.214,93
Saldo Akhir Kas	41.876.709.764,73

Saldo Akhir Kas terdiri dari :

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	36.566.435.583,61
2	Kas di Bendahara Penerimaan	171.012.981,12
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.312.929.470,00
4	Kas Dana BOS	182.452.570,00

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.643.879.160,00
Jumlah		41.876.709.764,73

Selain itu, terdapat saldo kas berupa Kas Lainnya yang tidak terkait dengan PFK yaitu senilai Rp585.321.310,71 dengan penjelasan rinci pada Neraca-Kas Lainnya.

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Ekuitas Awal	2.619.756.353.397,81	2.588.598.659.017,85
SURPLUS/DEFISIT-LO	65.922.564.419,24	32.877.050.006,90
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi nilai persediaan	0,00	0,00
Selisih revaluasi aset tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas	(48.236.209.575,50)	(1.719.355.626,94)
EKUITAS AKHIR	2.637.442.708.241,55	2.619.756.353.397,81

Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Saldo awal ekuitas tahun 2023 senilai Rp2.619.756.353.397,81 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022.
- Surplus/defisit – LO senilai Rp65.922.564.419,24 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2023.
- Koreksi ekuitas senilai Rp(48.236.209.575,50) merupakan koreksi atas penambahan dan pengurangan aset tetap selama tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
a	Saldo Awal	(1.719.355.626,94)
b	Penambahan	
1	Penyesuaian saldo awal koreksi ekuitas	22.786.286.340,98
2	Koreksi akumulasi penyusutan awal tahun	749.366.678,00
3	Koreksi saldo awal penyusutan KIB B	891.014.871,00
4	Koreksi Saldo Awal Penyusutan KIB D	1.310.840,00
5	Penyesuaian saldo Awal Piutang PBB, Piutang Pajak Reklame, Penyisihan Piutang PBB, dan Penyisihan Piutang Pajak Reklame yang direklas ke SKPD lain	2.240.340.408,80
6	Penyesuaian Saldo Awal Kas Di Bendahara BOS, BOP PAUD dan Kesetaraan Tahun 2023	60.213.623,00
7	Penyesuaian pendapatan BOS, BOP PAUD dan Kesetaraan tahun 2023	18.254.898.585,00
8	Penyesuaian Beban Hibah BOS, BOP PAUD dan Kesetaraan tahun 2023	12.094.678.852,00
9	Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 yang telah dibayarkan di tahun 2023	2.917.667.436,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
10	Pengakuan Kas Dana Prospek dari Tahun 2021	75.020.000,00
11	Mutasi aset tetap KIB B dari SKPD lain	1.119.910.011,70
12	Penyesuaian saldo kas di Bendahara Penerimaan yang telah disetor ke Kasda	1.238.234.158,37
13	Penyesuaian saldo penyisihan piutang bagian lancar tagihan penjualan angsuran	25.668.532,50
14	Penyesuaian piutang yang bersumber dari uang muka pengadaan barjas	77.368.327,11
Jumlah Penambahan		62.531.978.664,46
c	Pengurangan	
1	Penyesuaian saldo awal koreksi ekuitas	21.066.930.714,04
2	Koreksi Akumulasi Penyusutan Awal Tahun	51.329.070.612,00
3	Koreksi saldo awal penyusutan KIB B	753.641.003,00
4	Koreksi saldo awal penyusutan KIB C	2.945.436,00
5	Koreksi saldo awal penyusutan KIB D	340.520.782,00
6	Penyesuaian saldo Awal Piutang PBB, Piutang Pajak Reklame, Penyisihan Piutang PBB, dan Penyisihan Piutang Pajak Reklame yang direklas ke SKPD lain	2.240.340.408,80
7	Penyesuaian pendapatan BOS, BOP PAUD dan Kesetaraan tahun 2023	30.349.577.437,00
8	Mutasi aset tetap KIB B dari SKPD lain	1.119.910.011,70
9	Penyesuaian saldo kas di Bendahara Penerimaan yang telah disetor ke Kasda	1.238.234.158,37
10	Koreksi atas penghapusan tagihan penjualan angsuran	530.293.723,00
11	Penyesuaian piutang yang bersumber dari uang muka pengadaan barjas	77.368.327,11
Jumlah Pengurangan		109.048.832.613,02
Jumlah = a + b - c		(48.236.209.575,50)

4. Saldo akhir ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp2.637.442.708.241,55 sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

Pemerintah Kabupaten Fakfak adalah kabupaten yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Otonom di Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya.

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Pemerintah Kabupaten Fakfak adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Fakfak, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Fakfak, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2022-2024.

6.3. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun 2023

Selama tahun 2023 terjadi dua kali mutasi, rotasi dan promosi pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 45 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Fakfak. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut ini merupakan beberapa kesimpulan dari laporan keuangan.

1. Realisasi pendapatan daerah-LRA tahun 2023 senilai Rp1.430.219.550.381,59 atau ekuivalen 96,95% dari yang dianggarkan senilai Rp1.475.288.540.423,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp124.369.994.563,23 atau naik sebesar 9,52% dari jumlah realisasi tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp1.305.849.555.818,36.
2. Realisasi Belanja Daerah tahun 2023 senilai Rp1.506.021.842.520,79 atau ekuivalen 94,55% dari target yang dianggarkan senilai Rp1.592.894.105.914,00. Realisasi ini mengalami kenaikan senilai Rp179.023.080.965,39 atau naik sebesar 13,49% dari jumlah realisasi tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp1.326.998.761.555,40.
3. Realisasi Transfer Ke Desa tahun 2023 senilai Rp183.961.862.752,00 atau ekuivalen 101,56% dari target yang dianggarkan senilai Rp181.144.519.293,00. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp6.872.775.861,00 atau turun sebesar 3,60% dari jumlah realisasi tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp190.834.638.613,00.
4. Realisasi penerimaan pembiayaan dari penggunaan SiLPA tahun lalu senilai Rp118.740.799.114,93 dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 senilai Rp1.000.000.000,00, sehingga pembiayaan netto senilai Rp117.740.799.114,93.
5. Total pendapatan daerah – LO tahun 2023 senilai Rp1.339.229.636.871,05. Terjadi kenaikan senilai Rp143.627.995.495,46 atau naik sebesar 12,01% dari jumlah Pendapatan - LO tahun 2022 yang hanya senilai Rp1.195.601.641.375,59.
6. Total beban daerah tahun 2023 senilai Rp1.259.637.798.531,81. Terjadi kenaikan senilai Rp108.622.238.733,12 atau naik sebesar 9,44% dibandingkan jumlah beban daerah tahun 2022 yang hanya senilai Rp1.151.015.559.798,69.
7. Aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp2.637.633.990.307,55 mengalami kenaikan senilai Rp12.470.560.709,75 atau naik sebesar 0,48% dari saldo yang disajikan per 31 Desember 2022 senilai

Rp2.625.163.429.597,81.

8. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp191.282.066,00, terjadi penurunan senilai Rp5.215.794.134,00 atau turun sebesar 96,46% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2022 senilai Rp5.407.076.200,00.
9. Saldo Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp2.637.442.708.241,55, terjadi kenaikan senilai Rp17.686.354.843,74 atau naik 0,68% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2022 senilai Rp2.619.756.353.397,81.
10. Saldo Awal Ekuitas Kabupaten Fakfak tahun 2023 senilai Rp2.619.756.353.397,81, dan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2023 senilai Rp2.637.442.708.241,55, sehingga terjadi kenaikan senilai Rp17.686.354.843,74 atau naik sebesar 0,68%.

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar di atas, maka pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023 pada umumnya berjalan lancar dan telah mencapai target kinerja keuangan dan pertanggungjawaban anggaran yang telah ditetapkan. Namun perlu dipahami, di samping hasil-hasil yang telah dicapai, masih terdapat juga kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak,
pada tanggal, 7 Oktober 2024

Pjs. BUPATI FAKFAK

CAP/TTD

OCTOFIANUS MAYOR

Diundangkan di Fakfak,
pada tanggal, 7 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK

CAP/TTD

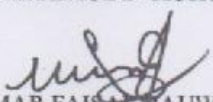
SULAEMAN USWANAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2024 NOMOR 01

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT (1/7/2024)

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


UMAR FAISAL BAUW

NIP.19720703 200111 1 001

382

Rp2.625.163.429.597,81.

8. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp191.282.066,00, terjadi penurunan senilai Rp5.215.794.134,00 atau turun sebesar 96,46% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2022 senilai Rp5.407.076.200,00.
9. Saldo Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Fakfak per 31 Desember 2023 senilai Rp2.637.442.708.241,55, terjadi kenaikan senilai Rp17.686.354.843,74 atau naik 0,68% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2022 senilai Rp2.619.756.353.397,81.
10. Saldo Awal Ekuitas Kabupaten Fakfak tahun 2023 senilai Rp2.619.756.353.397,81, dan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2023 senilai Rp2.637.442.708.241,55, sehingga terjadi kenaikan senilai Rp17.686.354.843,74 atau naik sebesar 0,68%.

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar di atas, maka pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023 pada umumnya berjalan lancar dan telah mencapai target kinerja keuangan dan pertanggungjawaban anggaran yang telah ditetapkan. Namun perlu dipahami, di samping hasil-hasil yang telah dicapai, masih terdapat juga kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Kabupaten Fakfak.